



The Habibie Center

THC REVIEW

Vol. 2/2014

**Indonesia Pasca
Pesta Demokrasi 2014**

EDITOR:
ZAMRONI SALIM

THC REVIEW

EDITOR:
ZAMRONI SALIM

THC REVIEW

Terbit Sejak 19 November 2013

ISSN: 2339-2959

Penanggungjawab:

Dr. Ahmad Watik Pratiknya, Rahimah Abdulrahim,

Ir. Hadi Kuntjara, M.Eng.Sc

Editor Pelaksana:

Zamroni Salim, Ph.D

Usaha dan Sirkulasi:

Ghazali Hasan Moesa, Natassa Irena Agam

Desain dan Layout:

M. I. Qeis

Penerbit:

The Habibie Center

Alamat Redaksi:

Jl. Kemang Selatan no.98, Jakarta 12560, Indonesia

Telp: +62 21 7817211 Fax: +62 21 7817212

e-mail: thc@habibiecenter.or.id, www.habibiecenter.or.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
Kata Pengantar	v
<i>M. I. Qeis</i>	1
BRANDING DALAM PILPRES 2014: MENGURAI DESAIN CITRA PRABOWO DAN JOKOWI DALAM MEDIA DIGITAL	
<i>Indria Samego</i>	21
KONSOLIDASI DEMOKRASI ATAU KEDIKTATORAN DEMOKRASI: ARAH REFORMASI POLITIK INDONESIA PRA DAN PASCA PEMILU 2014	
<i>Fathun Karib</i>	43
KONFLIK KEKERASAN DAN TANTANGAN PRESIDEN TERPILIH INDONESIA 2014-2019	
<i>Fina Astriana</i>	59
TANTANGAN PEMERINTAHAN BARU DALAM MENGHADAPI INTEGRASI PERBANKAN ASEAN 2020	
<i>Steven Yohanes</i>	77
PROYEKSI PELAKSANAAN POLUGRI RI ERA JOKOWI	
<i>Rizka Azizah</i>	97
POLITIK LUAR NEGERI <i>HIGH PROFILE</i> INDONESIA	
<i>A. Ibrahim Almuttaqi</i>	107
INDONESIA'S FOREIGN POLICY: REFLECTIONS ON THE YUDHOYONO YEARS AND PROSPECTS FOR THE NEXT GOVERNMENT	

Kata Pengantar

Perhelatan demokrasi di Indonesia baru saja selesai digelar, baik itu pemilihan anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), juga Pemilihan Presiden (PILPRES). Presiden hasil pilpres sudah terpilih dan sudah dilantik tanggal 20 Oktober 2014. Indonesia kini untuk lima tahun mendatang, 2014-2019 memiliki Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pasangan ini dikenal dengan sebutan Jokowi-JK. Kedua pasangan ini diharapkan bisa menjalankan roda pemerintahan dengan efektif dan efisien sehingga mampu menghantarkan masyarakat Indonesia kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih makmur baik dari sisi ekonomi maupun non-ekonomi.

Namun demikian, upaya pencapaian pemerintahan yang efektif dan efisien sepertinya harus dihadapkan pada konstelasi politik yang cukup riskan (khususnya di dalam parlemen). Hal ini karena parlemen saat ini dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang berada di luar pemerintahan Jokowi-JK, dengan posisi yang relative tidak berimbang. Bagaimana seharusnya Jokowi-JK bertindak untuk mensukseskan program-programnya dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa dan negara yang terjadi saat ini dan juga untuk masa yang akan datang?

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini tentu saja bukan hanya permasalahan baru yang muncul belakangan, tetapi juga permasalahan-permasalahan lama yang cukup pelik untuk diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya. Permasalahan-permasalahan bangsa tersebut harus bisa diselesaikan dengan baik dengan gesekan politik yang minimal dan dengan harapan bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Indonesia.

Tulisan-tulisan dalam The Habibie Center Review 2014, yang mengangkat tema: “Indonesia Pasca Pesta Demokrasi 2014”, membahas secara kritis berbagai permasalahan bangsa yang ada yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Jokowi-JK. *Tulisan Pertama* tentang branding yang tercipta dalam diri masing-masing Calon Presiden dan Wakil Presiden antara pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Terdapat perbedaan citraan *brand* yang cukup kontras dari kedua pasangan capres cawapres dalam pilpres 2014. Proses *branding* yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut pada akhirnya menghasilkan citraan *brand* yang berbeda antara satu dengan lainnya. Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mampu membedakan diri mereka dan menghasilkan interpretasi *positioning* yang unik dalam masyarakat. Interpretasi *positioning* ini pada akhirnya mampu mengantarkan Jokowi-JK dengan menjadi presiden dan wapres Indonesia untuk periode 2014 – 2019.

Tulisan Kedua, memberikan dasar pemahaman terhadap perubahan demokrasi di Indonesia. Bagaimana sebenarnya arah demokrasi di Indonesia setelah masa reformasi dan kini? “Konsolidasi demokrasi” menjadi hal penting untuk terciptanya demokrasi yang lebih baik. Namun, tantangan dalam upaya konsolidasi ini begitu besar. Hal ini karena upaya perubahan politik dari otoritarianisme menuju demokrasi, tidaklah mudah diwujudkan dengan cepat dan terbebas dari faktor-faktor yang ada di sekitarnya (*in-vacuum*). Partai politik yang ada sampai saat ini belum bisa menjadi perantara atau tali penghubung antara negara dengan masyarakat. Lalu, apakah kita harus pesimis atau optimis dalam upaya mencari konsolidasi demokrasi tersebut?

Tulisan Ketiga mengkaji hubungan di antara demokrasi, pembangunan dan konflik sosial yang mungkin terjadi. Tantangan yang harus dihadapi oleh Jokowi-JK dalam hal penyelesaian kekerasan di Indonesia adalah bagaimana mencari formula untuk menyelesaikan konflik kekerasan, termasuk yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya, dan bagaimana membangun stabilitas dalam masyarakat pasca-konflik.

Tulisan Keempat membahas integrasi perbankan ASEAN yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan bagaimana seharusnya perbankan Indonesia dibangun dan memosisikan dirinya di tengah persaingan regional, bahkan dunia. Tulisan ini menjelaskan beberapa langkah solusi, seperti memperkuat *financial safety net* dan upaya menguasai pangsa pasar domestik dan juga ekspansi ke negara ASEAN lainnya.

Selanjutnya tentang pembahasan politik luar negeri (polugri) yang harus diambil oleh Jokowi-JK. Posisi polugri ini penting khususnya dalam upaya untuk terus menjaga eksistensi kedaulatan negara dan yang lebih penting lagi untuk menjamin tercapainya kepentingan nasional secara konkret, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam *Tulisan Kelima*, diuraikan konsepsi dan prioritas kebijakan yang akan ditempuh oleh Jokowi-JK selama masa pemerintahannya.

Tulisan Keenam membahas bagaimana Indonesia, sebagai *emerging power*, dengan kelebihanannya dalam pentas politik global bisa bertindak dengan menerapkan politik luar negeri *high profile*. Dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia harus bisa berperan lebih besar dalam sistem politik internasional untuk kemajuan bangsa Indonesia. Prioritas pada pertahanan maritim bisa menjadikan Indonesia kembali berjaya dan ini merupakan langkah berani yang mencerminkan kebesaran Indonesia dengan politik luar negerinya yang *high profile* dalam lingkup regional maupun global.

Tulisan Ketujuh membahas apakah akan ada perubahan kebijakan di Indonesia dengan adanya pergantian pimpinan? Kebijakan luar negeri yang dilakukan SBY tentu saja bisa dijadikan pelajaran bagi Jokowi bagaimana seharusnya bertindak dalam lingkup global.

Kata Pengantar

Beberapa tulisan tersebut merupakan kumpulan hasil pemikiran individu-individu yang ada di The Habibie Center, dalam rangka memperingati 15 tahun The Habibie Center dan pesta demokrasi 2014, sebagai bentuk sumbang saran untuk pemerintahan Jokowi JK yang baru saja dilantik. Tugas berat menanti Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Semoga Bapak Presiden dan Wakil Presiden bisa bekerja dengan baik di tengah tantangan baik domestik maupun luar negeri yang semakin berat. Selamat bekerja untuk Indonesia yang lebih hebat.

Jakarta, 10 November 2014

Editor

Zamroni Salim

BRANDING DALAM PILPRES 2014: MENGURAI DESAIN CITRA PRABOWO DAN JOKOWI DALAM MEDIA DIGITAL

M. I. Qeis

Communication Officer, The Habibie Center & Dosen Desain Komunikasi Visual, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta
Email: qeis.m.i@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemilu Presiden (pilpres) yang diadakan tanggal 9 Juli 2014 merupakan salah satu pemilu dalam sejarah Indonesia di mana antusiasme rakyat Indonesia untuk memberikan suaranya begitu terasa dalam kehidupan sehari-hari. Antusiasme masyarakat dapat dilihat dalam tingginya perbincangan mengenai pilpres pada jejaring-jejaring sosial seperti *Facebook* dan *Twitter*. Andy Stone selaku humas dari *Facebook* mengungkapkan bahwa dalam masa kampanye pilpres 2014 ini, dari 69 juta pengguna aktif *Facebook* per bulan, terdapat jumlah perbincangan terkait pilpres yang mencapai angka 200 juta, 2/3 dari jumlah total perbincangan, yang didominasi oleh pengguna di bawah 34 tahun (kalbar.antaranews.com, 2014).

Latar belakang, kepribadian, dan idealisme dua calon presiden (capres) dalam pilpres 2014 merupakan salah satu alasan besarnya antusiasme masyarakat untuk memberikan suaranya. Kedua capres dianggap

memiliki sosok yang berlawanan, Prabowo yang dianggap sebagai elitis-tegas dan Jokowi yang dianggap sebagai populis-permisif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Roy Morgan (2014) terkait kedua capres, ditemukan bahwa kepribadian memainkan peran penting bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan siapa capres yang mereka pilih, seperti dikatakan oleh Debnath Guharoy:

The personalities of the two candidates appear to be sending out non-verbal messages to the voters. More women and older voters are responding positively to Jokowi's caring and earthy traits; the young prefer Prabowo's strong and dynamic character. (roymorgan.com, 2014)

Dua capres dengan identitas yang bertolak-belakang menjadikan opini masyarakat terfragmentasi. Tidak adanya ikatan masyarakat terhadap ideologi partai tertentu mengakibatkan masyarakat memilih capres berdasarkan citra yang mereka tangkap. Debat capres sebagai media untuk mempelajari karakter dan idealisme kedua capres pun mendadak menjadi diminati oleh masyarakat Indonesia. Minat masyarakat tersebut tercermin dari rating yang diperoleh acara debat capres pertama pada tanggal 9 Juni 2014 sebesar 4,4 (SCTV), menempati urutan kedua acara paling banyak ditonton malam itu (tabloidbintang.com, 2014). Opini masyarakat terhadap identitas kedua capres tentunya tidak terlepas dari proses rumit penanaman citra oleh kedua belah pihak, atau yang biasa disebut sebagai **branding**.

Menurut Fazarinc (dalam Meyers dan Gerstman, 2001: 14), **branding** adalah sebuah proses pengelolaan konsep yang konsisten akan janji yang diberikan dan harapan masyarakat dari sebuah *brand*. Dalam pilpres 2014, kedua capres dapat dianggap sebagai sebuah *brand*. Kotler dan Pfoertsch (2006: 4) mengatakan bahwa *brand* adalah suatu pengalaman emosional, sesuatu yang berkepribadian dan mampu menggugah pola pikir masyarakat. Pertarungan kedua capres untuk memenangkan suara, dengan demikian, dapat dianggap sebagai sebuah proses rumit *branding* untuk memenangkan *brand* yang dikenal dengan nama Prabowo dan Jokowi.

Dalam era konvergensi yang ditandai dengan berkembangnya internet, proses *branding* kemudian berkembang lebih dari sekedar penggunaan logo dan *tagline*. Internet merupakan alat yang esensial dalam proses

branding untuk mengkomunikasikan kepribadian dan jasa yang ditawarkan dari sebuah brand. Meyer dan Gerstman (2001: 2) mengutip Zyman, mantan kepala pemasaran Coca-Cola, berargumen bahwa internet telah menciptakan konsumen yang demokratis sehingga komunikasi pemasaran harus dilakukan dengan mendekati individu dan kelompok-kelompok kecil. Individu dan kelompok yang menjadi target sasaran dari sebuah *brand* akan terlihat dari berbagai media yang dipakai dalam proses *branding* dan komunikasi citra *brand*.

Schroeder (2002: 14-15) berargumen bahwa identitas dapat dilihat dari citra visual yang terdapat pada media yang tersebar di masyarakat. Hal ini memiliki implikasi bahwa kepribadian dan identitas sebuah *brand* dibentuk oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan ketika melihat *brand* tersebut. Untuk dapat mengkomunikasikan *brand* Prabowo dan Jokowi kepada individu dan kelompok sasaran melalui internet, desain visualisasi media komunikasi dan informasi kedua capres menjadi penting. Tulisan ini mengurai desain citra *brand* melalui visualisasi media digital yang dipakai oleh kedua capres untuk mengkomunikasikan dan mengkampanyekan *brand* Prabowo dan Jokowi dalam bentuk identitas visual sebagai garis depan citraan¹ *brand* capres, akun jejaring sosial yang menjadi media penghubung kepada masyarakat luas sebagai media publikasi *brand* capres, dan *website* yang menampung berbagai aktivitas dan visi misi sebagai portofolio² *brand* capres.

CITRAAN BRAND CAPRES

Identitas Visual Prabowo

Identitas visual yang digunakan oleh kubu Prabowo-Hatta sebagai citraan *brand* Prabowo mengambil bentuk burung garuda berwarna merah dengan perisai putih berisi angka satu. Di bawah burung garuda terdapat tulisan “Prabowo-Hatta” yang ditulis dengan *font* tipe serif tegap.

1 Citraan adalah cara membentuk citra mental pribadi atau gambaran sesuatu, atau kesan atau gambaran visual yg ditimbulkan oleh sesuatu (kbbi.web.id). Penulis menggunakan kata citraan untuk menggambarkan citra buatan yang dibentuk sebagai konsumsi masyarakat.

2 Dalam kbbi, portofolio memiliki arti tas untuk surat-surat, sampul kulit atau dompet (kbbi.web.id). Penulis menggunakan portofolio dalam tulisan ini dengan mengacu kepada makna portofolio dalam dunia seni dan desain yaitu sebagai kumpulan dari karya, rekomendasi, foto, dan hal-hal terkait hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang sebagai sarana presentasi kemampuan dan pengalaman dirinya (Eisenman, 2006:10).



Gambar 1. Garuda Merah sebagai identitas visual Prabowo-Hatta.

Penggunaan burung garuda sebagai identitas visual mengkomunikasikan pesan Prabowo sebagai seseorang yang nasionalis dan pengusung nilai-nilai Pancasila. Garuda merupakan hewan mitos yang melambangkan kekuatan. Pemakaian warna merah pada garuda pada logo ini memberikan kesan garuda yang garang, tegas, dan kuat. Penggunaan burung garuda juga memberikan kesan yang formal. Dominasi warna merah yang mencerminkan ketegasan mengkomunikasikan citra Prabowo dengan gaya kepemimpinan yang tegas. Smith (2005: 91) menjelaskan bahwa penggunaan *font* serif tegap memberikan kesan formal, konvensional dan konservatif. Terkait dengan kondisi politik dan gaya kepemimpinan dalam pilpres 2014, kesan konservatif terkait citra Prabowo di sini kemudian dapat dikaitkan dengan pola pemikiran konservatif yang Gronbeck kemukakan (dalam Kaid, 2004: 140), “...*only a powerful... ascendancy could secure the well-being of a commonwealth.*” Pemaknaan ini semakin memperkuat gaya kepemimpinan yang tegas dari citraan *brand* Prabowo dalam balutan sistem kepemimpinan *top-down*.

Ide semangat nasionalisme dan gaya kepemimpinan yang tegas sebagai konsep *brand* Prabowo merupakan sesuatu yang didambakan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ketegasan yang dikomunikasikan melalui citra visual juga menarik perhatian karena mengkomunikasikan gaya yang bertolak belakang dengan pemahaman akan gaya kepemimpinan SBY periode kedua yang cenderung kurang tegas dan bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Garuda yang terlihat keras dan kuat

mencerminkan ideologi Prabowo yang mengusung bangkitnya Indonesia menjadi *Macan Asia*. Hal ini menjadikan identitas visual Prabowo memiliki citraan *brand* yang mampu menggugah masyarakat yang menginginkan pemimpin Indonesia yang tegas, disiplin, dan dihormati.

Identitas Visual Jokowi

Identitas visual yang digunakan oleh kubu Jokowi-JK sangat berbeda dengan kubu Prabowo-Hatta. Stilasi³ muka berlatar bendera merah putih dengan *tagline* “Jokowi JK adalah kita” menjadi identitas visual resmi yang dimunculkan dalam iklan televisi Jokowi-JK pada masa kampanye pilpres 2014. *Tagline* ditulis menggunakan *font* sans serif yang divisualisasikan menggunakan warna yang berbeda untuk menciptakan aksentuasi dan menarik perhatian. Menebalkan kata “Jokowi” dan “kita” membuat kata tersebut menarik perhatian mata. Penggunaan kata “adalah” sebagai penghubung eksplisit antara “Jokowi JK” dengan “kita” menunjukkan adanya hubungan asosiatif diantara keduanya. Haynes (dalam Kaid, 2004: 123) menuturkan bahwa hubungan asosiatif ini menghubungkan dua buah deskripsi yang tidak ekuivalen dan bukan berupa hierarki, tetapi secara konsep menunjukkan bahwa yang satu adalah esensial bagi yang lainnya. Smith (2005: 91) menjelaskan bahwa penggunaan *font* sans serif memberikan mood modernis. Mood modernis jika dikaitkan dengan citra Jokowi dalam pilpres 2014 kemudian dapat diacu ke dalam konsep politik modernis seperti yang dijelaskan oleh Gronbeck (dalam Kaid, 2004: 141), “...modern(ist) theory... negotiate relationships between powerful governors and interested citizenries.” Dalam hal ini, pandangan dan mood modernis adalah terjalannya komunikasi antara pihak yang berkuasa dengan masyarakat untuk mendengar apa yang terjadi dan dibutuhkan masyarakat. Berbeda dari citra *brand* Prabowo, citra *brand* Jokowi mengkomunikasikan sistem kepemimpinan *bottom-up*.

Penggunaan stilasi muka alih-alih fotografi menggambarkan lebih dari sekedar gaya artistik. Walton (dalam Kenney dalam Smith, 2005: 110) berargumen bahwa, “*looking at handmade pictures is like playing children’s games of make-believe because in both cases we exercise our*

3 Stilasi adalah sebuah teknik menggambar. Stilasi digunakan untuk merubah dari bentuk alamiah menjadi bentuk baru dengan menyederhanakan bentuk tanpa meninggalkan karakter bentuk aslinya (glosaria.com).



Gambar 2. Stilasi muka dengan latar belakang bendera merah putih sebagai identitas visual Jokowi-JK.

imagination in order to understand and appreciate..." Proses *make-believe* ini mempermainkan persepsi kita akan citra visual dengan menambahkan pengaruh imajinasi. Wajah tersenyum dengan pandangan mata menatap ke atas memberikan kesan positif yang akan berpengaruh ke dalam proses *make-believe* dan menanamkan persepsi positif akan citra Jokowi. Penggunaan baju kotak-kotak kembali mengingatkan citra Jokowi ketika menghadapi pemilihan gubernur DKI Jakarta dengan baju kotak-kotak dan gaya blusukan sehingga mempengaruhi proses *make-believe* Jokowi sebagai capres yang merakyat. Hubungan asosiatif yang terjadi dalam *tagline* Jokowi JK adalah kita membuat perasaan bahwa masyarakat menjadi bagian yang sama pentingnya dalam perpolitikan bangsa. Keseluruhan identitas visual ini mengkomunikasikan citraan *brand* yang menarik bagi masyarakat Indonesia yang mendambakan pemimpin yang perhatian dan merakyat.

PUBLIKASI BRAND CAPRES

Jejaring Sosial Prabowo

Akun *Facebook* Prabowo (dengan ekstensi /PrabowoSubianto)⁴ dibuat pada tahun 2008 dan memuat riwayat hidup Prabowo dalam bentuk album foto dan video yang dikaitkan dengan berita liniwaktu mulai tahun 1951. Pada sisi kanan dapat dilihat kaitan liniwaktu yang cukup

4 Diakses oleh penulis tanggal 14 Agustus 2014.



Gambar 3. Akun Facebook Prabowo Subianto.

panjang, berisikan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Prabowo. Hal ini menandakan keaktifan Prabowo dalam penggunaan jejaring sosial *Facebook*. Akun *Facebook* Prabowo memiliki jumlah penggemar lebih dari delapan juta pengguna *Facebook*. Prabowo mengunggah puluhan album foto yang masing-masing berisikan antara enam sampai delapan buah foto. Setiap album menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Prabowo dalam aktivitasnya sebagai tokoh masyarakat. Akun *Facebook* Prabowo juga mengunggah 21 video terkait pesan kampanye Prabowo dalam pilpres 2014.

Jejaring sosial merupakan tempat publikasi efektif bagi sebuah *brand*. Foto profil, album foto, video, dan foto sampul mampu menyajikan visualisasi yang dapat menanamkan representasi *brand* terhadap para pengguna jejaring sosial. Hartley (dalam Gronbeck dalam Kaid, 2004: 146) menyatakan bahwa politik dan kebenaran sudah semakin terikat dengan apa yang terlihat dari representasi visual dalam gambar dan foto. Akun *Facebook* Prabowo menggunakan foto profil portrait dengan latar belakang putih polos yang menampilkan Prabowo dalam balutan jas resmi dengan foto menatap ke kiri atas, memperlihatkan sudut $\frac{3}{4}$ wajah sisi kiri Prabowo. Dalam bukunya *Human Facial Expression* (1994), Fridlund mengemukakan bahwa sisi kiri dari wajah menunjukkan sisi maskulin

dan ekspresi kebabakan. Tampilan ekspresi yang tenang dan tidak memainkan perasaan dengan tatapan memandang jauh menandakan keseriusan. Jas resmi memberikan kesan pribadi yang formal. Akun *Facebook* Prabowo menggunakan foto sampul yang memperlihatkan Prabowo yang sedang melakukan *selfie*.⁵ Menurut Dr. Pamela Rutledge, direktur *Media Psychology Research Center*, *selfie* memberikan pengaruh perasaan akan adanya koneksi sosial (huffingtonpost.com, 2013). Dalam hal ini, penggunaan foto tersebut mencoba memberikan kesan Prabowo yang ramah dan tidak ragu untuk bersosialisasi. Akun *Facebook* Prabowo kemudian berusaha untuk mengkomunikasikan citra *brand* Prabowo yang sedikit berbeda dengan menampilkan keramahan untuk meminimalisir citra negatif dari *brand* Prabowo yang mungkin dinilai terlalu keras oleh sebagian masyarakat.

Selain *Facebook*, *Twitter* juga dapat menjadi media publikasi *brand* yang efektif. Salah satu fenomena *branding* dalam *Twitter* adalah adanya sistem tagar (*hashtag*). Tagar resmi sebuah akun *Twitter*, dalam kaitannya dengan proses *branding*, dapat dilihat sebagai sebuah slogan atau *jingle* dari sebuah *brand*. Kotler dan Pfoertsch (2006: 92 dan 101) menyatakan bahwa sebuah slogan harus dapat merefleksikan esensi *brand*, kepribadian, dan mengkomunikasikan pemikiran dasar serta positioning, baik secara fungsional maupun emosional, dari sebuah *brand*. Menganalisis tagar sebagai sebuah pesan, terutama dalam kaitannya dengan politik, juga dapat memperlihatkan karakteristik psikologis, keyakinan, motivasi, dan strategi politik seseorang (DeMause, 1986; Winter & Carlson, 1988 dalam Kaid, 2004: 56). Untuk menganalisis pesan dalam bentuk tagar, kita dapat melihat tagar sebagai sebuah situasi hermeneutika, yaitu sebuah situasi di mana masyarakat melakukan proses interpretasi dan mendapat pemahaman atas teks dan bahasa yang terdapat di ruang publik (Alejandro, 1993: 69-71). Dalam hal ini, teks dan bahasa tersebut mengambil bentuk berupa tagar dan *Twitter* menjadi ruang publik tempat masyarakat melakukan proses interpretasi. Interpretasi inilah yang akan tertanam dan menjadi salah satu langkah dalam proses rumit *branding* yaitu menciptakan hubungan emosional antara *brand* dengan konsumennya.

5 Selfie adalah sebuah fenomena budaya populer berupa mengambil foto diri sendiri bersama orang lain tanpa dibantu oleh pihak ketiga. Kamus Oxford memberikan pengertian selfie sebagai kegiatan mengambil foto diri yang dilakukan oleh diri sendiri memakai smart-phone atau kamera dan diunggah ke dalam jejaring sosial (oxforddictionaries.com).



Gambar 4. Akun *Twitter* Prabowo Subianto.

Akun *Twitter* Prabowo (dengan ekstensi @Prabowo08)⁶ menampilkan konsep yang sama dengan akun *Facebook*nya, yaitu penggunaan foto profil Prabowo yang memakai jas formal dengan foto sampul Prabowo yang sedang melakukan *selfie*. Akun Prabowo dibuat pada Mei 2009 dan telah memiliki kicauan lebih dari 8000 kicauan, mengunggah lebih dari 350 foto dan video, serta memiliki lebih dari satu juta pengikut. Akun *Twitter* Prabowo memuat tagar resmi berupa #SelamatkanIndonesia dan #IndonesiaBangkit.

Frase “Selamatkan Indonesia”, selain dipakai menjadi tagar resmi, juga dipakai menjadi alamat *website* resmi Prabowo. Tagar tersebut dapat dikaitkan dengan kicauan Prabowo mengenai kondisi Indonesia. Dalam kicauannya, Prabowo menjabarkan kerugian Indonesia karena kekayaan alam yang mengalir ke luar dan mengemukakan jika ini terus terjadi, Indonesia akan terus menjadi miskin, lemah, dan tidak berwibawa. Prabowo juga berkicau tentang keberanian untuk melihat penyakit yang ada di tubuh sendiri agar dapat bangkit menjadi lebih baik, yang dikemukakan Prabowo sebagai *Macan Asia*. Dalam hal ini, tagar #SelamatkanIndonesia dan #IndonesiaBangkit merupakan slogan Prabowo berupa ajakan untuk keluar dari keterpurukan. Namun tagar ini juga menciptakan sebuah mitos yang muncul dari interpretasi konotatif bahwa Indonesia merupakan bangsa yang lemah dan terpuruk sehingga harus diselamatkan. Penggunaan tagar ini memunculkan citra *brand* Prabowo sebagai sosok yang memegang kunci untuk menjamin kesejahteraan Indonesia dan menyelamatkan Indonesia dari

6

Diakses oleh penulis tanggal 14 Agustus 2014.

keterpurukan. Mengacu pada pemikiran Gronbeck yang dikemukakan sebelumnya mengenai pemikiran tentang sosok yang memiliki kuasa untuk menjamin kesejahteraan, penggunaan tagar ini memperkuat citra *brand* Prabowo dengan pola pikir konservatif dan arah kebijakan *top-down*.

Jejaring Sosial Jokowi

Akun *Facebook* Jokowi (dengan ekstensi /IndonesiaHebatJokowi)⁷ dibuat pada tahun 2014 dan memuat status beserta foto-foto dan video yang hampir seluruhnya terkait dengan kegiatan Jokowi dalam rangka pilpres 2014. Jokowi tidak mengunggah secara khusus satupun album foto. Hanya terdapat album foto profil, foto sampul, dan foto kronologi pada album foto Jokowi. Keberadaan ketiga album ini menunjukkan bahwa foto yang ada di akun *Facebook* Jokowi merupakan foto hasil sharing yang dikaitkan pada update status kegiatan Jokowi di *Facebook*. Akun *Facebook* Jokowi juga mengunggah dua video terkait pesan kampanye Jokowi dalam pilpres 2014. Paparan di atas memperlihatkan perbedaan perlakuan terhadap *Facebook* sebagai media sosial antara Jokowi dengan Prabowo. Prabowo mempergunakan *Facebook* sebagai dirinya sendiri dan untuk memperlihatkan sosoknya sebagai seorang Prabowo Subianto, sementara Jokowi mempergunakan *Facebook* dalam kapasitasnya sebagai capres pada pilpres 2014 dan untuk menjangkau masyarakat dalam pemaparan pandangannya sebagai capres 2014.

Akun *Facebook* Jokowi menggunakan foto profil close-up dengan latar belakang bendera merah putih yang menampilkan Jokowi dalam balutan kemeja putih dengan foto menatap ke arah kiri, memperlihatkan sudut $\frac{3}{4}$ wajah sisi kiri Jokowi. Foto ini sedikit banyak memiliki kesamaan sudut pengambilan gambar dengan foto profil Prabowo, memperlihatkan sisi kiri yang memberikan kesan maskulin dan ekspresi kebabakan dengan tampilan ekspresi yang tenang dan tatapan memandangi jauh sembari tersenyum menandakan keramahan. Kemeja putih dengan kerah tidak dikancing memberikan kesan pribadi yang tidak formal. Akun *Facebook* Jokowi menggunakan foto sampul berupa ilustrasi karikatur Jokowi-JK. Jokowi digambarkan sedang tersenyum menyeringai dan JK diperlihatkan sedang tertawa. Senyum dan tawa memperlihatkan keramahan. Latar

⁷ Diakses oleh penulis tanggal 14 Agustus 2014.



Gambar 5. Akun *Facebook* Joko Widodo.

belakang yang menggunakan warna-warna cerah memperlihatkan keceriaan. Pada latar belakang terdapat rumah-rumah nelayan dan pohon kelapa yang menjadi indeks dan memberikan indikasi pemukiman nelayan di Indonesia. Latar belakang ini dapat memberikan kesan sosok yang merakyat karena memilih pemukiman nelayan yang sederhana alih-alih perkotaan atau suasana gedung sebagai latar belakang. Akun *Facebook* Jokowi mengkomunikasikan citra yang konsisten dengan menampilkan kesan ramah dan merakyat.

Akun *Twitter* Jokowi (dengan ekstensi @jokowi_do2)⁸ juga menampilkan konsep yang sama dengan akun *Facebook*nya, yaitu penggunaan foto profil Jokowi dengan balutan kemeja putih berlatar bendera merah putih dan foto sampul berupa ilustrasi karikatur Jokowi-JK. Akun Jokowi dibuat pada September 2011 dan memiliki kicauan lebih dari 900 kicauan, mengunggah lebih dari 20 foto dan video, serta memiliki lebih dari dua juta pengikut. Akun *Twitter* Jokowi tidak memuat tagar resmi apapun, namun melihat dari kicauan yang dilakukan oleh akun *Twitter* Jokowi, terdapat tiga buah tagar yang pernah digunakan Jokowi dalam masa-masa setelah deklarasi capres yaitu #salamduajari (kicauan 24 Juni), #pintarpilih2 (kicauan 30 Juni), dan #Jokowi9Juli (kicauan 8 Juli).



Gambar 6. Akun *Twitter* Joko Widodo.

Tagar #salamduajari merupakan tagar yang kemudian menjadi populer di ruang publik. Salam dua jari menjadi simbol bagi para pendukung Jokowi-JK. Dalam hal ini, salam dua jari menjadi slogan yang efektif dalam kampanye *brand* Jokowi. Salam dua jari pada awalnya merupakan simbol dari kemenangan yang mengacu pada era Perang Dunia II yang dikenal dengan nama “*V-for-Victory sign*” yang kemudian menjadi simbol perdamaian atau “*peace sign*” (h2g2.com, 12 Mei 2006). *Gesture* ini kemudian menjadi terkenal dalam fotografi untuk menggantikan ekspresi “*cheese!*”, terutama di daerah Asia, untuk melambangkan keceriaan dan kebahagiaan (Time.com, 4 Agustus 2014). Tagar #salamduajari kemudian menjadi langkah *branding* yang brilian karena mampu mengasosiasikan *V-sign* sebagai lambang keceriaan dan kebahagiaan dengan Jokowi sebagai capres nomor dua. Penggunaan tagar ini mengasosiasikan sosok Jokowi kepada ekspresi keceriaan, keramahan, dan kebahagiaan sehingga memunculkan citra *brand* Jokowi yang berlawanan dengan citra *brand* Prabowo yang konservatif dan tegas.

PORTFOLIO DIGITAL BRAND CAPRES

Website Prabowo

Website Prabowo-Hatta memiliki nama selamatkanindonesia.com⁹ dengan tab info bertuliskan “Mari Selamatkan Indonesia! Dengan H. Prabowo Subianto dan Ir. H. Hatta Rajasa”. Memiliki desain *home website* yang simpel dengan tautan menuju kamar lain divisualisasikan dengan stilasi grafis. *Home* juga menampilkan stilasi muka Prabowo-Hatta dan

9 Diakses oleh penulis tanggal 14 Agustus 2014.



Gambar 7. Website Prabowo-Hatta, selamatkanindonesia.com.

tagline, “Indonesia Bangkit!” Skema warna didominasi oleh warna merah dan hitam di atas latar putih sehingga memperkuat aksentuasi warna hitam dan merah yang memberikan kesan keras dan kelam. Karena desain *home* yang sederhana, *website* Prabowo-Hatta mudah untuk dibuka dan ramah bagi yang memiliki koneksi internet lambat.

Website Prabowo-Hatta lebih difokuskan untuk menampilkan riwayat hidup dan latar belakang Prabowo-Hatta dan ditampilkan dalam format *landscape*. Walaupun mencoba tampil bersih dengan penggunaan latar putih, penempatan peta Indonesia sebagai latar belakang sayangnya memberikan kesan ribut. Pengulangan peta Indonesia (mengulang penempatan Pulau Sumatra setelah Papua) alih-alih menempatkannya dalam posisi tengah (*centered*) semakin menambah kebingungan dan keributan desain *home website*. Dalam hal ini, terjadi kesalahan dalam desain sehingga visualisasi tampak kurang nyaman untuk dilihat. Schroeder (2002: 8) mengatakan bahwa pola konsumsi dan preferensi masyarakat modern tidak dapat dipisahkan dari pengalaman visual, bahwa masyarakat mengkonsumsi representasi. Visualisasi yang kurang nyaman untuk dilihat dapat memberikan kesan buruk bagi representasi identitas *brand* Prabowo. Pullman (dalam Eisenman, 2006: 76) mengatakan jika sebuah *website* terkesan terlalu datar, itu merupakan hal yang buruk, “A website can be a dangerous proposition.” Implikasi dari budaya visual di era digital menjadikan estetika visual *website*

merupakan sesuatu yang penting untuk memenangkan hati masyarakat modern yang tidak lepas dari kehidupan dunia maya.

Memandang *website* sebagai portofolio *brand* yang mencerminkan rekam jejak, visi misi, dan pola pandang dari sebuah *brand*, *website* Prabowo yang didominasi penggunaan warna yang kelam dan kurang cerah memberikan kesan *old-school* dan klasik. Volk dan Currier (2010: 54) mengatakan bahwa penggunaan skema warna hitam, putih, dan merah dalam desain portofolio menciptakan suasana dan perasaan klasik. Kesan klasik dan *old-school* ini semakin terlihat dengan penggunaan *font* yang memberikan kesan bagaikan hasil ketikan mesin tik. Kesan klasik dan *old-school* ini memperkuat citra konservatif dari *brand* Prabowo.

Website Jokowi

Website Jokowi-JK memiliki nama jkw4presiden.com¹⁰ dengan tab info bertuliskan “Mengupas Tuntas Tentang Jokowi.” Memiliki desain *home website* dengan format blog dan memiliki kolom “Donasi untuk Jokowi-JK”. Pada bagian kepala *home* menampilkan gambar-gambar yang berganti setiap beberapa menit, menampilkan ilustrasi dan fotografi terkait Jokowi-JK. Pada bagian bawah kepala *home* terdapat *header*, “Kenali Sosok, Semangat, dan Rencana Saya, Joko Widodo dalam Membangun Bangsa dan Negeri Ini.” Skema warna didominasi oleh warna putih sehingga memberikan kesan bersih dan modern. Penggunaan gaya blog sebagai *website* mengacu pada kepopuleran blog di kalangan pemuda. Volk dan Currier (2010: 167) mengatakan bahwa kepopuleran blog memunculkan trend *website* yang mengikuti format blog dan dimaksudkan untuk lebih fokus pada elemen *social networking*, *linking content*, dan memunculkan berita tentang topik terkait. Karena memakai format blog dengan konten yang berubah tiap beberapa menit, *website* Jokowi-JK memiliki waktu *load* yang relatif lama dan kurang efektif jika dilihat dalam koneksi internet lambat.

Website Jokowi-JK memfokuskan isinya kepada target dan berita-berita seputar kegiatan Jokowi-JK yang ditampilkan dalam format *portrait*. Penggunaan sistem *grid* yang rapih membuat *website* terlihat profesional dan nyaman dilihat. Gambar-gambar yang berganti setiap

10 Diakses oleh penulis tanggal 14 Agustus 2014.



Gambar 8. Website Jokowi-JK, jkw4presiden.com.

beberapa menit menghilangkan rasa monoton *website* dan memanjakan mata secara visual. Warna putih pada latar belakang memperkuat saturasi warna fotografi dan ilustrasi yang muncul sebagai referensi tautan sehingga terkesan segar. Saturasi warna fotografi yang kuat dan mencolok merupakan salah satu penanda gaya modern (van Leeuwen dan Jewitt, 2001: 30). *Font* serif tipis diatas latar putih memberikan kesan muda namun tegas dan rapih, memperkuat kesan modern dalam *website* Jokowi-JK.

Website Jokowi-JK sebagai portfolio *brand* capres mampu mengkomunikasikan citra yang berbeda dengan *website* Prabowo-Hatta. Penggunaan white space yang tertata baik memberikan kesan lapang dan nyaman. Penggunaan *header* “Kenali...saya...” mengkomunikasikan pribadi yang terbuka dan siap untuk diajak bertukar pikiran. *Header* ini mendobrak mitos elitis dari tokoh masyarakat dan membangun citra Jokowi yang merakyat. Foto sampul yang berganti-ganti memperlihatkan berbagai ekspresi foto dan ilustrasi Jokowi yang sedang tersenyum untuk menanamkan pesan keramahan dan keceriaan. Dipadu dengan kesan muda dan segar, *website* Jokowi-JK memperkuat citra modernis dari *brand* Jokowi.

KOMPETISI ANTAR BRAND

Kaid (2004:167) mengatakan bahwa nama seseorang, dalam kaitannya dengan politik dan pemilu, dapat disamakan dengan nama dari sebuah produk yang dipasarkan; keduanya merupakan sebuah *brand*. Cronin (2000:48) mengemukakan bahwa masyarakat berada dalam keadaan disorientasi dengan begitu banyak yang harus diketahui dari pilihan-pilihan yang tersedia pada saat masyarakat mencari sebuah *brand* yang tepat untuk memecahkan masalah sehari-hari. Kebutuhan masyarakat akan seorang capres yang tepat untuk memecahkan masalah Indonesia kemudian menjadi begitu subjektif sehingga memunculkan disorientasi publik. Keadaan disorientasi ini terlihat dengan banyaknya kesimpangsiuran arus informasi dalam kaitannya dengan perdebatan mengenai kedua capres pada pilpres 2014 ini. Dalam kondisi seperti ini, dan dengan dilakukannya proses *branding* yang efektif, terjadilah kompetisi antar *brand* dalam memenangkan pilihan masyarakat.

Scott Bedbury (dalam Kotler dan Pfoertsch, 2006:3) mengatakan bahwa *branding* adalah proses mengambil sesuatu yang dikenal oleh umum dan meningkatkan nilainya sehingga lebih berharga. Proses *branding* kemudian adalah suatu proses yang positif untuk meningkatkan nilai dari sebuah *brand*. Walaupun pada dasarnya *branding* merupakan suatu proses positif, perdebatan terkait citraan *brand* kedua capres dan munculnya kampanye hitam yang menyerang kedua capres juga tidak terlepas dari efek yang muncul akibat proses *branding* dalam bentuk kompetisi antar *brand*. Uli Skrypalle (dalam Bürdek, 2005:250) mengatakan bahwa proses pembangunan citra suatu produk di masa kini sudah tidak lagi terpaku pada pandangan subjektif seseorang (baik itu desainer, PR, atau konseptor); tetapi konsep di balik produk tersebut akan secara terus-menerus ditinjau oleh kelompok sasaran. Terkait pilpres dan citraan *brand* capres, proses *branding* yang dilakukan kemudian tidak terpaku hanya kepada pandangan dari timses kampanye Prabowo dan Jokowi atau hanya kepada pribadi Prabowo dan Jokowi, tetapi juga dilakukan oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini, perdebatan dan kampanye hitam berupa ejekan dan sindiran merupakan bagian dari proses peninjauan secara terus-menerus akan sebuah *brand* yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai kelompok sasaran untuk mencari sebuah *brand* yang tepat bagi permasalahan yang publik rasakan.

Meyers dan Gerstman (2001:6) mengemukakan bahwa pada saat masyarakat tertarik pada suatu *brand* dan mencoba mengajak orang lain melalui internet atau jejaring sosial, terdapat kemungkinan ajakan tersebut tersirkulasi secara *viral* dan dapat menimbulkan efek positif dan negatif. Efek positif dari kegiatan ini terkait fenomena pilpres 2014 adalah semakin banyak orang yang berdebat mengenai visi-misi capres dan membandingkan kelebihan dari masing-masing capres, sementara efek negatifnya berupa munculnya serangan kampanye hitam dan ejekan atau sindiran kepada capres saingan. Salah satu contoh efek negatif dari proses positif *branding* adalah serangan terhadap identitas visual dari *brand* Prabowo berupa garuda merah. Garuda merah yang mengkomunikasikan citra nasionalis serta ketegasan dan kegagahan kemudian menerima serangan bahwa identitas visual tersebut melecehkan lambang negara dan diklaim melanggar UU no 24 tahun 2009. Salah satu contoh negatif lainnya adalah serangan terhadap citraan *brand* Jokowi yang ramah dan merakyat yang kemudian disindir tidak tegas dan *klemar-klemer* atau loyo. Serangan-serangan yang memunculkan sindiran dan kampanye hitam ini adalah bagian dari efek negatif yang muncul dari opini masyarakat ketika melakukan proses tinjauan *brand*. Sindiran dan kampanye hitam ini juga merupakan bukti bahwa terjadi persaingan yang ketat dalam kompetisi antar *brand* sehingga dirasa perlu untuk menjatuhkan *brand* saingan ketika proses pembedaan diri melalui *branding* masih kurang mampu untuk memenangkan pilihan masyarakat.

PENUTUP

Dari berbagai media yang telah dianalisis di atas, dapat dilihat adanya perbedaan citraan *brand* dari kedua capres terkait pilpres 2014. Citraan Prabowo sebagai *brand* mengkomunikasikan citra yang konservatif dengan penggunaan warna-warna dan tata letak *layout* yang memberikan kesan klasik dan *old-school*. Kesan tegas dan keras juga dikomunikasikan bersamaan dengan kesan kebabakan dan pengayoman. Hal ini berbeda dengan citraan Jokowi sebagai *brand* yang mengkomunikasikan citra modernis. Penggunaan warna-warna dengan saturasi tinggi dan penguasaan *white space* dalam *layout* memberikan kesan modern dan

rapi. Pemakaian tema blog sebagai *website* dan ilustrasi kartun sebagai foto muka memberikan kesegaran dan kesan muda dan ekspresif.

Proses *branding* kedua capres mampu memberikan citraan *brand* yang berbeda membuat Prabowo dan Jokowi mampu membedakan diri masing-masing dan membentuk interpretasi *positioning* yang unik dan jelas di masyarakat. Walaupun muncul serangan dan kampanye hitam sebagai reaksi negatif atas proses *branding* dan kompetisi antar *brand* dari kedua capres, tidak dapat disangsikan bahwa citraan *brand* Prabowo dan Jokowi sukses terkomunikasikan kepada masyarakat Indonesia. Keberhasilan proses *branding* kedua capres tercermin dari hasil pemungutan suara pilpres 2014 yang dimenangkan oleh Jokowi begitu tipis dengan *margin of victory* sebesar 6,30%.

Margin of victory yang kurang dari 10% menunjukkan bahwa masyarakat memiliki *value of trust* yang sama besarnya bagi kedua capres. *Value of trust* yang terbangun di masyarakat muncul dari proses *branding* yang terangkum dalam dua hal, yaitu pada saat seseorang memilih sebuah *brand* dan saat orang tersebut merasakan bahwa *brand* yang ia pilih sesuai dengan yang diinginkannya (Kotler dan Pfoertsch, 2006:VI). Kecilnya angka *margin of victory* juga menunjukkan adanya perbedaan pola pandang yang jelas di antara masyarakat Indonesia akan siapa yang dibutuhkan saat ini untuk memecahkan permasalahan Indonesia. Disorientasi publik kemudian menjadi teratur namun terfragmentasi menjadi dua pola pandang yang terbentuk dari *positioning* atas *brand* kedua capres; Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas dan Indonesia membutuhkan pemimpin yang merakyat. Besarnya *value of trust* masyarakat terhadap kedua capres menunjukkan bahwa proses *branding* capres Prabowo dan Jokowi berhasil menciptakan ikatan emosional masyarakat terhadap *brand* pilihannya. Mengutip pernyataan Peters (dalam Schroeder, 2002:23), “*You can’t be a leader in the next five years and not be totally into design ... They are your distinguishing characteristics, your brand’s brand*”, pilpres 2014 menunjukkan bahwa proses *branding* dalam era digital menjadi penting untuk menciptakan ikatan emosional dan pembentukan *value of trust* target sasaran yaitu masyarakat Indonesia kepada citraan *brand* capres pilihannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alejandro, Roberto. (1993). *Hermeneutics, Citizenship, and the Public Sphere*. New York: SUNY Press.
- Bürdek, Bernhard E. (2005). *DESIGN. History, Theory and Practice of Product Design*. Frankfurt: Birkhäuser
- Cronin, Anne M. (2000). *Advertising and Consumer Citizenship*. London: Routledge
- Eisenman, Sara. (2006). *Building Design Portfolios*. Massachusetts: Rockport Publ.
- Fridlund, Alan J. (1994). *Human Facial Expression*. London: Academic Press.
- Kaid, Lynda Lee (ed.). (2004). *Handbook of Political Communication Research*. New Jersey: LEA Publ.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2014). Citraan. (n.d.) dalam *KBBI versi online/daring (dalam jaringan)*. Diakses 8 September 2014 dari <http://kbbi.web.id/citra>.
- Kotler, Philip dan Pfoertsch, Waldemar. (2006). *B2B Brand Management*. Berlin: Springer.
- van Leeuwen, Theo dan Jewitt, Carey (ed.). (2001). *Handbook of Visual Analysis*. London: SAGE Publ.
- Meyers, Herbert M. dan Gerstman, Richard (ed.). (2001). *Branding @ the Digital Age*. New York: Palgrave.
- Schroeder, Jonathan E. (2002). *Visual Consumption*. London: Routledge.
- Smith, Ken (et.al). (2005). *Handbook of Visual Communication*. New Jersey: LEA Publ.
- Volk, Larry dan Currier, Danielle. (2010). *No Plastic Sleeves: The Complete Portfolio Guide for Photographers and Designers*. Oxford: Elsevier.

- Antaraneews.com. (2014, 14 Juli). *200 Juta Interaksi di Facebook Terkait Pilpres 2014*. Diakses 10 Agustus 2014 dari <http://kalbar.antaraneews.com/berita/324539/200-juta-interaksi-di-facebook-terkait-pilpres-2014>.
- H2g2.com. (2006, 12 Mei). *The V-Sign*. Diakses 14 Agustus 2014 dari http://h2g2.com/edited_entry/A11047132.
- Huffingtonpost.com. (2013, 16 Desember). *Why You Just Can't Help But Selfie*. Diakses 14 Agustus 2014 dari http://www.huffingtonpost.com/2013/12/16/science-of-the-selfie_n_4435308.html.
- Roymorgan.com. (2014, 1 Juli). *Jokowi leads the way in most parts of Indonesia with a week to go. While women clearly favour Jokowi, men narrowly prefer Prabowo*. Diakses 10 Agustus 2014 dari <http://www.roymorgan.com/findings/5666-indonesian-presidential-election-age-gender-june-2014-201407010533>.
- Tabloidbintang.com. (2014, 10 Juni). *"Debat Capres" dan "Catatan Hati Seorang Istri" Depak "Mahabharata" dan "Mahadewa" dari Top 5*. Diakses 10 Agustus 2014 dari <http://www.tabloidbintang.com/articles/film-tv-musik/ulasan/8714-debat-capres-dan-catatan-hati-seorang-istri-depak-mahabharata-dan-mahadewa-dari-top-5>.
- Time.com. (2014, 4 Agustus). *Have You Ever Wondered Why East Asians Spontaneously Make V-Signs in Photos?* Diakses 14 Agustus 2014 dari <http://time.com/2980357/asia-photos-peace-sign-v-janet-lynn-konica-jun-inoue>.
- Portofolio. (n.d.) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*. Diakses 8 September 2014 dari <http://kbbi.web.id/portofolio>.
- Selfie. (n.d.) dalam *Oxford Dictionaries Online*. Diakses 8 September 2014 dari <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/selfie>.
- Stilasi. (n.d.) dalam *Glosarium Pengetahuan, Pengertian, Arti, Definisi, Kamus, Istilah Kata*. Diakses 8 September 2014 dari <http://glosaria.com/glosa/?id=Stilasi>.

**KONSOLIDASI DEMOKRASI ATAU KEDIKTATORAN DEMOKRASI:
ARAH REFORMASI POLITIK INDONESIA PRA DAN PASCA
PEMILU 2014**

Indria Samego

*Senior Research Fellow, The Habibie Center & Profesor Riset Bidang
Perkembangan Politik dan Pemikiran Pembangunan, LIPI*

Email: indriasamego@yahoo.com

Dari sisi politik, Indonesia Pasca Presiden Soeharto adalah Indonesia yang “bebas dan merdeka”. Negara tidak lagi memiliki kemampuan untuk membatasi aspirasi politik masyarakat dalam mewarnai perubahan yang terjadi. Aturan perundangan di bidang politik yang sebelumnya sangat ampuh di dalam mendukung hegemoni negara, sekarang tidak lagi dapat dipertahankan. Setiap upaya yang dilakukan untuk membatasi lahir dan tumbuhnya partai politik, dipandang sebagai bentuk rekayasa yang tidak demokratis.

DPR RI yang semula menjadi instrumen demokrasi Rejim Soeharto, belakangan telah tumbuh menjadi sebuah kekuatan pengawas dan penyeimbang Eksekutif yang cukup ampuh. Bahkan karena begitu ampuhnya, mekanisme penyelenggaraan pemerintahan seolah-olah telah bergeser dari *Executive Heavy* ke *Legislative Heavy*. Tentara dan

Birokrasi Sipil yang di masa lalu menjadi actor politik yang dominant, sekarang didorong untuk meninggalkan gelanggang politik praktis. Iklim politik Indonesia kontemporer ditandai oleh dua kata kunci yang menurut Robert A Dahl (1971) inti dari demokrasi, yaitu kontestasi (*contestation*) dan partisipasi (*participation*).” Negara, bukan lagi menjadi satu-satunya pusat kekuasaan. Sebagai akibat dari kontestasi dan partisipasi tersebut, muncul kekuatan politik baru di luar Negara, yakni partai politik, kalangan professional, *businessmen*, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat serta berbagai kelompok-kelompok kepentingan yang mengusung bermacam sentiment primordial.

Perubahan politik yang amat mendasar ini dimungkinkan karena, di satu pihak, makin lemahnya pemerintah di dalam memberdayakan sumberdaya politik dan ekonomi negara, di pihak lain, karena kian kuatnya tuntutan demokratisasi. Setelah untuk sekian lama negara memegang monopoli interpretasi mengenai demokrasi, sejak reformasi digulirkan masyarakat sendirilah yang menentukan bagaimana partisipasi harus dilembagakan, dan partai politik apa yang berhak mengikuti kontes demokrasi. Tidak terlalu mengherankan jika penyelenggaraan “pesta” demokrasi pasca Orde Baru jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Apabila di masa Presiden Soeharto, UU Politik sangat membatasi jumlah peserta pemilu, sejak Pemilu 1999 tidak ada lagi kekuatan politik yang mampu melakukannya. Justru melalui pemilu lah kita menyaksikan bagaimana nasib sebuah partai politik ditentukan. Ada yang tetap bertahan, dan dapat bersaing dalam kontes demokrasi tersebut, namun tidak sedikit partai politik yang terpelanting, untuk kemudian lenyap dari persaingan politik yang mengedepankan prinsip-prinsip “luber” (langsung, umum, bebas dan rahasia) serta “jurdil” (jujur dan adil). Jika dalam Pemilu 2009 terdapat 38 Partai Nasional dan 6 Partai Lokal di Aceh yang berhak mengikuti Pemilu, dalam Pemilu 2014 yang tinggal menghitung hari ini, jumlahnya jauh mengecil, yakni 12 Partai Nasional dan 3 Partai Lokal di Aceh. Bahkan dalam pemilihan presiden (Pilpres), persiapan dan pelaksanaannya jauh lebih radikal dibanding era Orde Baru. Bila di masa tersebut, tak terlihat adanya kontestasi antar calon, karena calonnya sudah direkayasa dan hanya satu, sekarang semuanya terbuka dan sangat kompetitif. Jauh sebelum pilpres dilaksanakan 9 Juli mendatang, hingar binger sosialisasi calon presiden dan wakil presiden sudah kita rasakan. Ada partai politik yang mencalonkan ketua

umumnya, namun ada pula partai yang membuka kesempatan calon dari mana pun sejauh dipilih lewat sebuah konvensi. Ini sebuah kemajuan besar dan cenderung liberal.

Kemudian, partisipasi massa pun tidak lagi dibatasi oleh organisasi peserta pemilu sebagaimana berlaku di masa Orde Baru, melainkan oleh segenap warganegara dan kelompok social yang ingin menyuarakan aspirasinya. Dengan tidak diberlakukannya UU mengenai Organisasi Massa (UU No. 5/1985), Pemerintah tidak lagi memiliki dasar hukum untuk mengatur politik massa di luar partai politik. Pendekatan korporatisme negara yang dahulu digunakan untuk mengkooptasi organisasi social, sejak era reformasi politik itu kian tidak populer.¹ Bahkan sejumlah organisasi massa yang sebelumnya sangat bangga menjadi kekuatan quasi negara, belakangan berusaha memutuskan hubungan dengannya dan mengikrarkan diri sebagai organisasi massa independen. Kekuatan-kekuatan social alternatif yang di masa lalu berlindung di balik baju lembaga swadaya masyarakat (LSM) “plat merah”, juga berganti warna dan harus bersaing dengan sejumlah LSM baru yang lebih radikal dan progresif.

Dan *last but not least*, Pers pun – sebagai salah satu cabang kekuasaan ke empat (*the Fouth Estate*) dalam sistem politik yang demokratis – mengalami perkembangan yang sangat eksponensial. Baik organisasi wartawan maupun jenis media massa serta isi pemberitaannya, tidak lagi ditentukan oleh negara. Alam kebebasan, telah sungguh-sungguh dinikmati begitu Presiden Soeharto tidak lagi berkuasa. Rasa takut politik massa seolah-olah hilang, setelah kekuatan sentral tergusur. Optimisme yang muncul sekarang adalah bahwa demokrasi yang sesungguhnya harus ditumbuh-kembangkan menggantikan system lama yang otoriter atau paling tidak mengadopsi model pluralisme yang terbatas (*limited pluralism*).

1 Pengertian mengenai korporatisme negara (state corporatism) di sini diambil dari pandangan Phillippe Schmitter yang menekankan adanya campur tangan negara dalam menentukan nasib, struktur dan kepemimpinan organisasi masyarakat. Keberadaan organisasi model ini tidak lebih dari perpanjangan tangan negara dalam mengendalikan partisipasi masyarakat ketimbang memperjuangkan kepentingan anggotanya.

KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN MASALAHNYA

Setelah lebih dari empat belas tahun reformasi politik itu digulirkan, nampaknya apa yang disebut sebagai “konsolidasi demokrasi” tidak kunjung juga terwujud. Lembaga-lembaga politik dan social memang bermunculan, dan pemerintah tidak mungkin lagi memiliki upaya untuk mengawasinya. Kemajemukan telah menjadi semangat zaman sekarang. Namun tidak berarti bahwa pelembagaan demokrasi (*democratic institutionalization*) secara *inherent* terkait di dalamnya.

Pada tataran negara, misalnya, kita menyaksikan munculnya berbagai perubahan aturan perundangan yang memperkuat posisi lembaga perwakilan rakyat. Bukan hanya Undang-Undang Politik yang berubah dari waktu ke waktu, melainkan UUD 1945 pun telah berhasil diamandemen sebanyak empat kali. Bahkan sekarang, sejumlah anggota MPR, terutama DPD, telah berusaha keras untuk segera melakukan Amandemen V, terutama yang menyangkut wewenang DPD (Pasal 22 D) Semuanya ditujukan untuk memperkuat proses demokratisasi. Sekarang, Pemerintah bukan lagi actor utama perubahan. Tanpa konsultasi dan pengawasan dari lembaga perwakilan rakyat, mustahil penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan. Dengan kata lain, Negara telah memberi peluang banyak terhadap Lembaga Legislatif baik di pusat maupun di daerah untuk menjalankan fungsinya. Hak-hak serta wewenang DPR dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat ditingkatkan dan dieksplisitkan dalam rangka membangun mekanisme *checks and balance* yang selama Orde Baru dinafikan.

Namun, apa yang kita peroleh dari perbaikan *political leverage* lembaga perwakilan rakyat itu? Suara-suara kritis terhadap DPR dan DPRD muncul di sana-sini. Alih-alih digunakan untuk membela kepentingan rakyat, kekuasaan politik yang diperolehnya justru telah banyak disalahgunakan. Fungsi pengawasan dan budgeting dewan telah dijadikan instrument untuk menekan pihak eksekutif. Lembaga perwakilan rakyat, lebih merupakan kepanjangan tangan dari partai politik ketimbang wakil rakyat yang sesungguhnya. Celakanya, bila yang terjadi dalam kehidupan partai politik adalah personalisasi atau faksionalisasi kekuasaan bukan pelembagaan demokrasi, maka DPR dan DPRD pun akan dijadikan medium utama untuk mempertaruhkan nasib politik mereka.

Dengan mengacu pada sejumlah fenomena di atas, barangkali tidak terlalu keliru bila kemudian kita sepakat dengan pandangan yang mengatakan bahwa perubahan politik dari otoritarianisme menuju demokrasi, tidaklah dapat berlangsung secara cepat dan bebas dari faktor-faktor di sekelilingnya (*in-vacuum*). Setidaknya dalam proses konsolidasi demokrasi tersebut – dengan mengutip pikiran Samuel Huntington (1991) – terdapat tiga persoalan mendasar yang harus diselesaikan.

Pertama, kesadaran bersama untuk secara pasti melewati “*transition problems*”. Karena kekuatan atau budaya politik lama masih berusaha untuk terus berkuasa, penguasa dan budaya politik baru tidak mungkin secara otomatis menggantikannya. Kalaupun peluang untuk itu terjadi, harus dilakukan secara elegan, agar peralihan dapat berlangsung secara damai. Tanpa ditemukannya kiat-kiat konstruktif dalam masalah ini, maka perubahan yang terjadi tidak akan berlangsung secara gradual (*gradual changes*), melainkan secara radikal, dengan diikuti oleh pertikaian yang terus-menerus.

Kedua, *contextual problems* yang dihadapi negara-bangsa merupakan sebuah fenomena yang sudah *given*. Persoalan komunal menjadi faktor potensial bagi munculnya disintegrasi bangsa. Artinya, abai untuk mendekatinya secara arif, akan mendorong lahirnya persoalan baru. Sementara yang lama belum tersingkirkan, masalah lain – misalnya kesenjangan ekonomi - muncul kemudian.

Ketiga, *systemic problems* dihadapi sehubungan dengan adanya kesenjangan antara aturan yang ada dengan menguatnya tuntutan masyarakat. Aturan hukum merupakan produk politik. Artinya, bukan hanya nuansa, melainkan substansinya pun sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik rejim lama. Sementara tuntutan demokrasi yang makin meluas, tidak akan dapat direspons oleh ketentuan yang sudah dibuat sebelumnya.² Kegagalan di dalam mengantisipasi ketiga masalah di atas, tentunya akan dibayar dengan cara yang amat mahal, dan boleh jadi bukan konsolidasi demokrasi yang muncul, melainkan *permanent anarchy*, yang pada gilirannya membawa pada gerakan politik yang anti demokrasi (*reverse wave*).

2 Diskusi lebih rinci mengenai konsolidasi demokrasi dalam perspektif komparasi dapat dilihat dalam Huntington (1991). Sementara untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai keniscayaan demokrasi sebagai idiom pembangunan politik di masa-masa yang akan datang, lihat Francis Fukuyama (1992).

Ada banyak teori demokrasi yang ditawarkan para ahli untuk mencegah pembalikan arus demokrasi tersebut. Samuel Huntington (1991), misalnya, pada mulanya amat yakin dengan teori pembangunan yang ditemukan dari hasil studi komparatifnya. Memang diakui bahwa kendati faktor ekonomi memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap demokratisasi, namun dia tidaklah sangat menentukan (*determinative*). Artinya sulit untuk ditemukan sebuah korelasi antara pembangunan ekonomi dan demokrasi yang pada gilirannya dapat dijadikan model untuk merancang sebuah perubahan menuju demokratisasi.

Akan tetapi, dengan menggunakan rujukan pada Gelombang Ketiga Demokratisasi yang terjadi sejak paruh pertama 1970an, ia kembali pada keyakinannya bahwa pembangunan ekonomi merupakan kunci utama bagi pertumbuhan iklim politik yang menghargai kemajemukan, penegakan hukum serta perubahan secara damai. Dari perspektif ini, logika politik yang ingin dibangun adalah bahwa demokrasi dan demokratisasi sangat tergantung pada adanya tiga komponen yang merupakan akibat dari adanya tingkat pembangunan ekonomi yang lebih tinggi (*higher level of economic development*). Pertama, di satu sisi, pembangunan ekonomi sangat membuka peluang bagi berkembangnya kesempatan belajar seluruh warga negara, yang pada gilirannya akan melahirkan masyarakat yang lebih terdidik (*more highly educated public*). Kedua, pada sisi yang lain, pembangunan ekonomi yang memadai akan memperbesar lahirnya kelompok menengah (*larger middle-class*). Tentu saja dengan syarat bahwa pertumbuhannya bukan karena hasil korupsi, kolusi dan nepotisme, tapi karena kemampuan mereka dalam memanfaatkan peluang dan berkompetisi. Ketiga, penggabungan dari kedua sisi tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap berkembangnya budaya kewargaan (*civic culture*) dan perilaku (*attitudes*) yang didasarkan pada saling percaya (*mutual trust*), kepuasan (*satisfaction*) dan kompetensi (Huntington, 1991).

Ketika negara sangat dominan di hadapan masyarakat, mungkin bisa saja peran serta masyarakat diabaikan. Selain karena lemahnya posisi masyarakat dibanding negara, keperluan untuk menjalankan peran negara secara efektif pun dijadikan alasan untuk tidak mengembangkan budaya politik ini. Kendati urusan politik harus difafsirkan sebagai bukan persoalan pribadi (*private*) atau perorangan, melainkan sebagai komponen penting negara, banyak negara kuat (*strong state*) yang

cenderung mengabaikan azas ini, dan menerapkan system politik yang otoriter (Dewey, 1927).³ Sebagai akibatnya, hampir setiap kebijakan publik diputuskan secara sepihak oleh negara, yang terkadang sama sekali tidak memerlukan konsultasi publik. Bahkan, tidak jarang pula, negara hanya di atasnamakan oleh segelintir orang yang sangat berkuasa demi memperjuangkan kepentingan mereka.

KONTEKS INDONESIA

Tentu, indicator ekonomi bukanlah segala-galanya.⁴ Dalam konteks Indonesia kontemporer, apa yang kurang dari – untuk sebagian – Kelas Menengah dan Tingkat Pendidikan mereka. Tidak sedikit pula di antara anggota dewan yang masuk dalam kategori tersebut. Paling tidak bila dilihat dari gaya hidup dan pendidikan formal mereka, mestinya para wakil rakyat yang terhormat itu mulai melembagakan demokrasi dalam praktek politik yang dijalaninya. Tapi yang banyak kita dengar sekarang justru sebaliknya. Mereka baru memahami demokrasi secara prosedural, belum sampai pada tingkat pelembagaannya. Karena berbagai pertimbangan pribadi, tidak sedikit di antaranya memanfaatkan perubahan politik sekarang untuk menjadi preman politik atau broker ekonomi dari kalangan konglomerat atau siapa pun yang berinisiatif menggunakan dewan untuk kepentingan pribadi. Dan bila diteliti lebih lanjut, maka mereka yang mempraktekkan sikap yang anti demokrasi itu pun tidak didukung oleh tingkat kemakmuran ekonomi dan pendidikan yang sesungguhnya. Justru dengan menjadi anggota dewan itulah mereka kemudian dapat melakukan mobilita vertikal, mengubah nasib dan menjadi kaya.

Berarti, selain perlu diciptakannya iklim pembangunan ekonomi yang kian kondusif, satu hal lagi patut disodorkan kepada mereka untuk lebih menghargai praktek politik yang lebih beretika, beradab dan santun. Menurut Stephen Carter (1998), "*Civility*" dapat dijadikan pegangan bagi masyarakat di dalam menyelesaikan perbedaan pandangan secara demokratis. Tanpa harus menghilangkan penghargaan terhadap pihak

3 Tradisi pemisahan antara urusan privat dan publik secara tegas ini memang sudah menjadi kelaziman dalam system politik yang demokratis (Dewey, 1927).

4 Pidato Pengukuhan Profesor Boediono di Universitas Gadjah Mada, merupakan salah satu rekonstruksi kaum cerdik-cendekia yang terlalu yakin dengan teori determinisme ekonomi dalam demokrasi.

lain, konsep ini menjauhkan nuansa “saya” dan menggantikannya dengan “kita”. Dengan kata lain, *civility* merupakan “*manners, morals and the etiquette of democracy*”. Sebagai sebuah “*proper standards of moral conduct*”, *civility*, harus dijadikan pegangan bagi setiap warga masyarakat di dalam menyelesaikan pertikaian yang muncul di antara mereka. Konsekuensinya, “pengorbanan (*sacrifices*)” menjadi kunci penentu di dalam mempertahankan kebersamaan di antara sesama warga. Sebagai aturan utamanya adalah “*rules of morality*”.

Dalam konteks kekinian, ketiga persoalan demokratisasi yang diungkapkan Huntington di atas jelas kita hadapi sekarang. Perubahan yang begitu cepat dan *unpredictable* sebagai akibat dari “Revolusi Mei” 1998, tidak dengan sendirinya melapangkan jalan menuju Indonesia yang semakin demokratis. Persyaratan awal untuk membangun sebuah sistem politik yang menghargai kemajemukan, memang sudah dipenuhi. Lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan yang telah dikuasainya sekitar tiga dasawarsa telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk mengganti sistem yang sudah sekian lama mempengaruhi kehidupan kita dalam bernegara. Seandainya mekanisme kerja negara-bangsa ini dapat disamakan dengan otomotif, dengan mudah saja kita dapat mengganti sistemnya. Asal ada biaya untuk membeli mesin yang baru, akan selesai sudah persoalannya. Tapi, karena yang menjadi obyek adalah politik, tentu tidak semudah itu melakukannya.

Sudah empat presiden yang memimpin kita di dalam mencoba menjalankan roda organisasi yang namanya negara-bangsa ini dengan cara yang baru. Secara ideal, kita membayangkan adanya sistem baru yang lebih demokratis menggantikan sistem politik lama yang otoriter. Tapi prakteknya tidak semudah itu. Perubahan berjalan begitu lambat – untuk tidak mengatakan jalan di tempat. UU Politik yang lebih demokratis, memang, sudah dibuat dan dijadikan dasar bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang memiliki azas persaingan dan keadilan. Berbeda dengan enam kali pemilu sebelumnya, dua pemilu legislative Pasca Orde Baru, yakni Pemilu 1999 dan 2004 diakui banyak pihak sebagai memenuhi ketentuan normatif bagi sebuah kontes demokrasi. Ditambah lagi dengan keberhasilan kita dalam menyelenggarakan pemilihan umum untuk mencari presiden dan wakil presiden secara langsung pada 2004 dan 2009, lengkap sudah prosedur demokrasi dilaksanakan di negeri ini.

Dengan kata lain, baru setelah Presiden Soeharto tidak lagi berkuasa, proses pembentukan pemerintahan sungguh-sungguh didasarkan pada hasil pilihan rakyat.

Namun yang tetap menjadi pertanyaan, mengapa sampai sekarang kita masih menyaksikan begitu kuatnya pengaruh sistem politik lama dalam kehidupan politik mutakhir, baik pada tingkat nasional maupun regional? Berkat iklim *liberal politics*, partai politik mengalami masa keemasannya, bebas lahir dan berkembang tanpa menghadapi kendala-kendala kekuasaan di luar dirinya. Bagi mereka yang memperoleh kemenangan dalam pemilu, secara otomatis memiliki hak untuk membentuk pemerintahan. Selain itu, partai politik pula yang paling berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden. Kecuali di Provinsi NAD, parpol pula yang dijadikan kendaraan politik bagi para calon kepala daerah. Oleh karenanya, minat untuk mendirikan partai politik tidak pernah padam. Akan tetapi, ironinya, kesadaran untuk mengakui adanya kemajemukan dan menerapkannya, masih terbatas pada retorika.

Power struggle dalam arti sempit – lebih mengandalkan *instinct* dan *desire* ketimbang *morality* – tetap menjadi sumber pengambilan keputusan dalam partai politik. Artinya, dalam situasi yang “*incivility*” semacam ini, jangan berharap ada ruang bagi yang lemah sumberdaya politik dan ekonominya untuk dapat ikutserta di dalam proses yang sedang dibangun.⁵ Karena begitu kuatnya budaya politik istana dan juga patrimonial, setiap kekuatan alternatif yang datangnya dari luar, dipandang secara negatif. Siapa pun yang melakukan evaluasi kritis terhadap pusat kekuasaan, akan dituduh sebagai ingin mengganti penguasa. Banyaknya partai politik, masih belum identik dengan kuatnya pelembagaan demokrasi di negeri ini. Karena masih kuatnya budaya politik patrimonial di atas, demokrasi masih sebatas wacana. Sumber dan otoritas kekuasaan bukan terletak pada rakyat atau pengikut, melainkan pada kekuatan lain yang lebih konkrit. Di masa lalu, sebagaimana pernah dikatakan Ben Anderson, “kasekten” lah yang menjadikan seseorang berkuasa. Kemudian di masa Orde Baru, ABRI menjadi sumber kekuasaan baru. Kini, nampaknya uang telah begitu kuat mengintervensi kehidupan politik di tanah air. Kepiawaian para elite dalam mengartikulasikan

5 Carter (1998) menekankan perlunya keseimbangan antara *desire and instinct*, di satu pihak, dan “*doing what is morally required*” di pihak lain. Lihat, hlm. 229 dalam buku yang sama, yang membahas “*Where civility Begins*”.

sumber kekuasaan tersebut telah mengesankan seolah-olah demokrasi telah berjalan di sini.

Dengan demikian, yang menjadi persoalan sesungguhnya dalam kehidupan politik dan system kepartaian kita bukanlah jumlah partai politik *as such*, melainkan pada kualitas pelembagaannya. Memang, kuantitas partai politik akan menjadi masalah dalam proses pengambilan keputusan. Makin banyak makin tidak efektif. Apalagi jika motif utamanya bukan ideology, melainkan kepentingan, maka kian susah saja permufakatan diambil. Di dalam satu partai politik pun, bisa muncul berbagai macam kepentingan. Tanpa disertai dengan alokasi sumberdaya yang merata dan jelas (*authoritative allocation of values*), keputusan akan sulit diterima oleh para penentu kebijakan. Sebaliknya, proses politik akan berlangsung aman, apabila semua kepentingan menerima bagiannya. Tapi, semua itu berarti mahal. Sementara sumber daya negara makin menipis, di satu pihak, dan demokrasi bertambah mahal, di pihak lain, kapan rakyat mendapat perhatian dan bagian dalam proses pengalokasian tersebut? Barangkali di sinilah urgensinya rasionalisasi partai politik. Bukan jumlah parpol semata yang menjadi fokusnya, melainkan bagaimana kita merekayasa parpol dalam masa depan yang pendek ini, menjadi sebuah alat intermediasi antara Negara dengan rakyat, bukan sekedar kendaraan politik para elit belaka.

PERSONALISASI PARTAI POLITIK

Dalam kenyataannya, enam belas tahun Era Reformasi, partai politik yang kita harapkan menjadi tali penghubung antara negara dengan masyarakat, belum kunjung terwujud. Alih-alih terjadi pelembagaan kepartaian dan internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam masing-masing partai, yang muncul kemudian adalah bentuk-bentuk aroganisme para tokoh partai dengan mengatasnamakan demokrasi dan kepentingan rakyat. Partai politik kita belum naik kelas. Ia lebih banyak dipersonalisasi oleh para pemimpinya. Ibarat sebuah perusahaan, partai politik di Indonesia, kalau tidak mengatakan semua, sebagian besar masih tetap dikuasai oleh para oligar partai, yang menganggangi dan mereka merasa menghidupi partai yang dipimpinya. Seorang pengurus partai, apalagi pimpinannya, dapat diibaratkan komisaris dalam perusahaan. Merekalah yang dapat dan berhak menentukan warna partai selanjutnya,

melaksanakan kaderisasi, dan bahkan memecat kader yang dipandang tidak mendukung sikapnya.

Tak terlah sulit untuk membuktikan fenomena seperti itu. Pola rekrutmen para calon anggota legislative dalam Pemilu Legislatif 9 April 2014 yang lalu, sangat ditentukan oleh Ketua Umum atau penguasa (Dewan Pembina) dalam konteks Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Hanya mereka yang diberi lampu hijau oleh para oligarlah yang bisa masuk daftar calon anggota legislative. Makin disukai oleh penguasa partai, makin tinggi nomor urutnya. Dengan demikian, tak terlah mengherankan pula jika para caleg terpilih dalam Pileg yang lalu masih belum menunjukkan kehandalan sebagai politisi. Politisi karbitan atau politisi "*tiban*" (dalam Bahasa Jawa) yang artinya politisi instan (*overnight politicians*) masih sangat mewarnai kehidupan kepartaian di Indonesia mutakhir. Bisa jadi terdapat pergantian orang dalam satu partai, namun kualitasnya tak beda jauh dari yang digantikannya. Karena *factor like and dislike* tersebut, pimpinan partai tidak melakukan seleksi caleg berdasarkan system meritokrasi. Hal yang sama juga dirasakan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Meski secara kasat mata keterbukaan dan kontestasi yang dikedepankan, namun dalam kenyataannya, bukan soal kualitas calon yang diutamakan, melainkan karena restu para penguasa partai itu sendiri, dan masing-masing kader harus berusaha sekuat tenaga mendapatkan simpati public. Dalam konteks kekinian, yang paling efektif dalam menggalang massa adalah membagi-bagi hadiah berupa uang maupun barang (*money politics*). Oleh karenanya, tidak mengherankan pula bila banyak kepala daerah yang terpilih, tidak memenuhi kualifikasi yang diperlukan sebagai pemimpin daerah. Bahkan tragisnya lagi, tak sedikit dari kepala daerah atau politisi yang harus berurusan dengan institusi penegak hukum, karena melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya.

Pentingnya partai politik dalam era demokratisasi ini dimungkinkan oleh adanya amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa partailah yang berhak mengikuti pemilihan umum, dan partai pula yang memiliki hak untuk mencalonkan kepala daerah dan presiden. Dengan demikian, tanpa melewati atau didukung partai politik, sehebat apa pun seorang tokoh dan sepopuler apa pun dia miliki, mustahil untuk dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Meski DPR atau DPRD kependekan dari Dewan Perwakilan Rakyat, dalam kenyataannya, siapa pun yang ingin

menjadi anggota parlemen kita harus melewati partai politik. Ketentuan perundangan mengatakan, hanya Dewan Perwakilan Daerahlah yang mencerminkan ajang kontestasi perorangan dalam meraih posisi sebagai politisi nasional. Sayang, sampai sekarang, peran DPD masih sangat marginal, dibandingkan DPR RI. Sementara untuk menjadi anggota DPR, seleksinya harus melalui partai politik. Dalam posisi yang demikian, meski sampai sekarang partai politik di Indonesia masih menghadapi problem keuangan, namun untuk menyelenggarakan kerja politik, partai apa pun seolah tak kekurangan sumber pendanaannya. Informasi yang sudah diketahui masyarakat luas adalah bahwa setiap anggota parlemen harus menyumbang sebagian dari penghasilannya – baik yang halal maupun tak halal - kepada partai politik. Kemudian, donasi dari sumber di dalam negeri juga dimungkinkan. Makin besar dan berpengaruh sebuah partai politik, kian mudah pula mengumpulkan sumbangan tersebut.

Namun, sejauh ini, besar dan kecilnya sebuah partai politik di Indonesia, juga masih sangat bergantung pada pengaruh figure yang memimpinnya. Persoalan ideology – jika masih ada -, atau platform partai, tak terasa benar di dalam menentukan pasang naik dan pasang surutnya sebuah partai politik. Asumsi yang diterima masyarakat luas, misalnya, tanpa Megawati dalam posisi sentral di DPP PDI P, partai berkepala banteng ini, tak mungkin sehebat PNI di masa lalu. Demikian juga halnya dengan Partai Demokrat. Ia menjadi partai pemenang pemilu 2009 dan membawa SBY untuk meneruskan kekuasaannya. Namun, dalam Pemilu 2014, perolehan suaranya, merosot drastic. Hampir 50% suaranya hilang. Ada yang mengatakan bahwa kemerosotan Partai Demokrat dikarenakan sebagian fungsionarisnya terlibat korupsi. Namun, argument ini agak lemah bila dibandingkan dengan fenomena korupsi di partai lain. Ada sejumlah tersangka korupsi oleh KPK, ternyata masih mendapatkan dukungan suara sangat besar untuk terus melenggang ke Senayan. Bagi penulis sendiri, factor yang menyebabkan Partai Demokrat merosot menjadi partai pemenang ke empat dalam Pemilu April 2014 yang lalu, adalah karena makin menurunnya pamor Presiden SBY. Harap diingat bahwa setelah 20 Oktober 2014, ia tak boleh meneruskan kekuasaannya sebagai orang nomor satu di negeri ini. Berarti, SBY tidak lagi memiliki sumber kekuatan politik lain, kecuali kepemimpinan ganda di partai tersebut.

Dalam posisi yang berlawanan, Partai Gerindra yang usianya baru 7 tahun, dan dalam pemilu 2009 hanya memperoleh sekitar 5% kursi di DPR, dalam Pemilu April lalu memperoleh kemenangan yang cukup signifikan. Meski belum mampu menggeser Partai Demokrasi Perjuangan atau Partai Golkar, setidaknya, Partai Gerindra telah masuk ke posisi tiga besar partai pemenang pemilu 2014. Hal ini disebabkan oleh begitu dominannya peran Ketua Dewan pembinanya, Prabowo Subiyanto. Dengan semangat “Partai Gerindra Menang, Prabowo menjadi presiden” partai ini berhasil menggebrak konstelasi kekuasaan partai politik di Indonesia. Lebih terbukti lagi adalah ketika Partai Golkar gagal mengirim calon presidennya, ARB dalam Pilpres 9 Juli 2014 yang lalu, maka selain calon presiden pilihan Megawati, tinggal calon lain yang diusung oleh Partai Gerindra. Sangat masuk akal, begitu Prabowo menyatakan siap menjadi calon presiden, Hatta Radjasa yang Ketua Umum PAN pun menyambut pinangannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam Pilpres 9 Juli 2014 yang lalu, hanya terdapat dua pasangan calon yang diterima KPU untuk bersaing, yaitu Pasangan No 1 yang terdiri dari Prabowo-Hatta, dan pasangan No.2 yakni Jokowi -JK yang non partai.

Sejak ditentukannya kedua pasangan capres dan cawapres tersebut, terjadilah pengelompokan partai politik ke dalam dua kubu, yakni Partai Golkar, PPP, PKS, PAN, Partai Gerindra dan PBB mendukung Pasangan No.1, sementara pasangan no2, Jokowi-JK, didukung oleh PDI P, PKB, Partai Nasdem dan Partai Hanura serta PKPI. Masing-masing menghitung kemampuan pasangan yang didukungnya semata-mata karena pesona pribadi, bukan karena ideology atau platform. Keyakinan politik itu berlanjut ketika masa kampanye pilpres dimulai. Pasangan No 1 “menjual” habis siapa, latar belakang dan jaringan Prabowo Subianto. Sebagian besar mengaitkannya dengan kiprah Letjen Prabowo Subiyanto di masa lalu yang merupakan salah satu “super star “ dalam jajaran pimpinan ABRI. Namun, pada saat yang sama pula, kehebatan Jenderal Prabowo tersebut dihadapkan pada data mengenai pelanggaran HAM berat yang diduga menjadi tanggung jawab Prabowo.

Sementara Jokowi, diangkat sebagai pribadi yang akan memperhatikan nasib *wong cilik*. Gaya blusukannya ketika mengawali kepemimpinannya di DKI, pemihakannya terhadap nasib rakyat jelata dipasarkan habis-habisan oleh para pendukungnya. Ia dianggap sebagai pemimpin

alternative bagi solusi masalah yang dihadapi Indonesia sekarang, bukan pemimpin model Prabowo yang sangat flamboyant. Namun, kampanye negative dan kampanye hitam menghabisi Jokowi sebagai sosok yang patut dikritisi dari sisi keagamaan dan rasnya. Sebuah Tabloid yang diedarkan ke sebagian pesantren di Jawa mengupas habis-habisan latar belakang dan kaitan Jokowi dengan ideology atau lingkungan yang tidak dapat diterima oleh umat Islam. Dengan kata lain, bukan platform yang dijadikan argumentasi, melainkan sisi personal dari sang calon presiden.

Pilpres sudah berlalu. Bahkan KPU telah mengumumkan siapa pemenang dalam pilpres yang lalu, yakni pasangan No urut 2, Jokowi JK. Namun, kemenangan tersebut tidak diakui Prabowo sampai sekarang. Sebagai wujud ketidak puasan Pasangan No urut 1 terhadap keputusan KPU tersebut, dibawah sengketa hasil pilpres ini ke MK yang keputusannya “bersifat final dan mengikat”. Di MK pun, semua keberatan pasangan Prabowo-Hatta digugurkan oleh para hakim MK secara aklamasi. Namun, Prabowo tetap tidak mau mengakui kekalahannya oleh Jokowi. Dalam berbagai kesempatan, dia mengatakan “*never surrender* (pantang menyerah)”. Artinya, Prabowo akan terus membawa hasil pilpres ini ke ranah yang lain. Setelah keinginannya untuk memperkarakan keputusan KPU ke PTUN menemui jalan buntu, dan berharap pula MA dapat menjadi lembaga peradilan terakhir, namun Kubu Praboowo tak mendapatkan dukungan. Akhirnya, dibentuklah Koalisi Merah Putih (KMP) yang sebelumnya disebut sebagai Koalisi Permanen. Koalisi ini diharapkan akan menjadikan hasil pilpres ini sebagai langkah politik awal dalam mendelegitimasi kemenangan Jokowi. Dengan kata lain, Kubu KMP ini akan menggunakan ranah politik sebagai tempat untuk menunjukkan keunggulan Prabowo. Dan ini dibuktikannya pertamakali dengan keberhasilannya mengubah UU MD3 lama menjadi UU MD3 baru pada 8 Juli 2014 yang pada intinya membuat perhitungan terhadap kubu Jokowi PDIP. Meski banyak klausula lain yang dijadikan alibi untuk diubah, tapi, tujuan utamanya adalah merebut kepemimpinan di DPR RI, dengan mengajukan usulan agar Pimpinan DPR selanjutnya tidak didasarkan pada perolehan suara terbanyak dalam Pileg 2014, melainkan atas dasar pemilihan para anggota dewan sendiri. Dengan alasan bahwa Pimpinan DPR (*House speaker*) harus mencerminkan kualitas DPR, maka tidak boleh bila pemilihannya diserahkan kepada partai pemenang. Menurut

KMP, jika mengikuti UU MD 3 lama, sudah otomatis PDIPlah yang akan memimpin DPR RI, dan Puanlah yang akan direstui Megawati untuk memimpin DPR RI. Begitulah rumor yang kencang terdengar di sekitar itu. Karena dukungan suara KMP jauh lebih besar ketimbang Koalisi Indonesia Hebat, maka dengan mulus pula perubahan itu dilakukan.

Dengan modal koalisi permanen yang tetap solid itu pula kubu Prabowo melakukan perubahan atas UU Pemilihan Kepala Daerah. Dengan dalih ingin mengembalikan azas musyawarah mufakat ke dalam kehidupan politik di Indonesia, pemilihan langsung oleh rakyat dalam memilih kepala daerah, dianggap tak perlu diteruskan. Ditambah lagi dengan dukungan sebagian elite NU yang membenarkan berbagai dampak negative dari pilkada langsung, maka pada 26 September 2014 diputuskanlah oleh Rapat Paripurna DPR untuk mengembalikan pilkada itu ke DPRD. Partai Demokrat yang sejak awal tidak jelas sikapnya, belakangan secara tidak langsung mendukung Koalisi MP, lewat cara yang seolah-olah elegan, yakni *walk out*. Meski belakangan, karena begitu keras dan massifnya suara rakyat yang mengkeritik Presiden SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Pemerintah mengajukan Perpu No 1 tahun 2014 mengenai pemilihan langsung kepala daerah, public tetap skeptic bahwa Presiden SBY sesungguhnya lebih condong memihak Prabowo ketimbang Jokowi.

Usai pelantikan anggota DPR RI pada 1 Oktober 2014, KMP kembali meneruskan perjuangannya untuk menunjukkan soliditas mereka. Karena dominannya suara KMP, dan tak jelasnya posisi Partai Demokrat, pada tanggal 1 malam itu pun diputuskan struktur pimpinan DPR berdasarkan system paket, yang terdiri dari 5 orang. Masing-masing akan menduduki Ketua DPR, dan empat orang wakil ketuanya. Melihat konstelasi suara anggota DPR yang mayoritas memihak Kubu Prabowo, dan Partai Demokrat pun tidak mendukung Kubu Indonesia Hebat, kali ini, Koalisi pendukung Jokowi meninggalkan ruang sidang (*walk out*) Karena voting yang dijadikan penentu keputusan, maka sudah pasti bahwa Koalisi Indonesia Hebat gigit jari lagi. Kembali, KMP memperoleh kemenangan dalam berbagi kueh di DPR. Berkat rekayasa politik KMP tersebut, pimpinan DPR dikuasai oleh Kubu KMP, dengan menetapkan Setya Novanto (Partai Golkar) sebagai Ketua DPR, dan Fachry Hamzah (PKS), Fadli Zon (Partai Gerindra), Agus Hermanto (Partai Demokrat) serta Taufik (Partai PAN) sebagai wakil ketua. Dalam waktu yang tak

lama lagi, 6 Oktober, nampaknya KMP pun akan memegang kendali lagi dalam pemilihan Pimpinan MPR. Sudah ramai diberitakan bahwa KMP akan memberikan kursi Ketua MPR kepada Partai Demokrat, dan sisanya juga akan dibagi rata di antara pendukung Prabowo.

Sudah bisa diduga bahwa kemenangan demi kemenangan di ranah politik ini akan memberikan kredit tersendiri kepada Prabowo, dan sebaliknya mempersulit posisi Jokowi. Jika Jokowi tak mampu memecah koalisi tersebut, maka sampai dengan akhir kekuasaannya, lima tahun mendatang, Pemerintah Jokowi harus mengikuti terus apa yang dimau oleh Kubu Prabowo. Kalau tak salah, mereka pun berusaha melakukan berbagai amandemen atas UU dan bahkan UUD yang dianggap merugikan kepentingan mereka. Dengan berdalih demi kepentingan rakyat dan Negara Indonesia, serta mengurangi pengaruh asing terutama ideologi liberal dan pasar bebas, mereka berusaha mengamandemen pilpres, dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh anggota MPR saja. UU penanaman modal dan perbankan – yang konon terlalu memihak pada pasar bebas - juga akan direvisi.

Semua fenomena di atas menunjukkan bahwa personalisasi partai politik makin terasa meski sebagai Negara kita sudah melewati usia ke 69 tahun. Hidup, mati dan beroperasinya partai politik sangat ditentukan oleh figure sentral di dalamnya. Artinya, bukan pengembangan system yang berlangsung dalam kehidupan semua partai politik, melainkan pengembangan kepemimpinan personal (personal rulership). Akhirnya, bukan platform dan ideology partai yang menjadi modal dasar bagi sebuah partai politik, melainkan siapa figure yang memimpinnya. Celaknya, bila sang pemimpin tua dan kemudian mundur dari partai yang dipimpinya, partai tersebut juga akan terpengaruh perkembangannya. Sebaliknya, bila sang pemimpin makin kuat, maka hidupnya sangat bergantung kepada sang pemimpin. Pada gilirannya, regenerasi partai secara terbuka dan demokratis, masih jauh dari kenyataan.

PROSPEK

Kita mesti optimis dalam menghadapi ketiga persoalan konsolidasi di atas. Bila kemauan untuk mengadakan perubahan didasari oleh pikiran-pikiran yang mendukung prinsip perubahan secara bertahap dan

damai (*gradual and peaceful changes*), maka cara-cara transformasi dan penggantian (*transplacement*) harus dilakukan. Secara kultural, peran dan teladan pemimpin masih sangat menentukan dalam proses perubahan. Di mana pun, masyarakat kita masih sangat menghargai esensi seorang pemimpin. Di sanalah makna Negara patrimonial baru (*Neo-Patrimonial State*) masih dapat dipertahankan. Pepatah “raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah”, nampaknya tetap dapat dijadikan rujukan para pemimpin kita. Kemudian, konsistensi dalam melakukan perubahan – terutama perubahan tingkah laku - juga harus ditunjukkan oleh mereka. Sesuai dengan norma-norma demokratis, transparansi dan kompetensi hendaknya dijadikan pegangan juga di dalam melakukan fungsi yang terakhir ini. Unsur-unsur *like - dislike* harus dibuang jauh-jauh bila ingin melakukan pembaharuan. Dengan cara ini, *political supports* dan legitimasi seorang pemimpin akan terus dipertahankan.

Namun siapa pun pemimpinnya, bila aturan dasar kenegaraan yang ada sekarang tidak diperbaharui, ada kecenderungan munculnya otoritarianisme atau kediktatoran demokrasi (*Democratic Dictatorship*) dalam bingkai yang baru. Hasil Amendemen atas UUD 1945 – yang belakangan diributkan kembali - tidak mengubah skeptisme publik terhadap perubahan politik di tanah air. Khususnya berkaitan dengan system dan proses penyelenggaraan pemerintahan, nampaknya belum banyak menunjukkan adanya perbedaan antara aspek *das sollen* (*normative*) dengan *das sein* -nya (*reality*). Kesenjangan antara kebijakan (*policy*) dan pelaksanaan (*implementation*), masih menjadi cirri utama penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pembasmian praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang semula menjadi salah satu tujuan reformasi, masih terbatas pada ucapan, belum dilaksanakan. Kalau pun ada, masih tebang pilih sifatnya. Otonomi Daerah, berjalan namun belum seperti yang diharapkan. Sementara itu, penyelenggaraan pemerintahan di pusat pun tidak banyak bedanya. Selain tetap ingin mendominasi, efektivitasnya jauh di bawah Pemerintahan Orde Baru. Tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam proses pelembagaan demokrasi, pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada pengembangan system (*system building*), akan tinggal menjadi catatan kaki.

Untuk mengamankan proses pelembagaan demokrasi di tanah air, di satu pihak, dan melihat perkembangan perilaku dan budaya politik para

elite seperti di atas, di pihak lain, tulisan ini menawarkan pemikiran sebagai berikut:

Pertama, pada tataran Pemimpin Negara, tingkah laku para pemimpin diharapkan menghargai prinsip-prinsip negara modern. Selain menerapkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik (efektif, jujur, transparan, menghargai kesetaraan dan akuntabel), dalam penegakan hukum juga musti memperhatikan etika pemerintahan. Di Negara maju, ada dua cara untuk menilai kinerja seorang pemimpin, yakni lewat penegakan hukum dan tekanan politik. Untuk yang disebut pertama, bukti-bukti formal tentang kesalahan seorang pemimpin dicari dan dijadikan dasar tuntutan. Namun untuk yang kedua, seorang pemimpin akan mundur dengan sendirinya bila public menilai bahwa sang pemimpin telah melakukan kekeliruan – menyalahgunakan jabatan. Jika tekanan tersebut makin kencang, maka tidak ada jalan lain kecuali untuk melepaskan jabatan yang dipegangnya. Sebab, bila tetap bertahan pada kekuasaannya, yang terjadi kemudian adalah ketidakpercayaan public (*public distrust*) kepada yang bersangkutan, yang bisa membawa konsekuensi pada tidak efektifnya pelaksanaan pemerintahan. Contoh mutakhir adalah mundurnya Gubernur Bank Dunia, Paul Wolfowitz yang dianggap telah melakukan skandal dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hanya karena mengusulkan kenaikan gaji salah seorang stafnya, yang kemudian ditengarai sebagai “teman tapi mesra”-nya itu, sahabat dekat Presiden Bush tersebut dipandang telah berlaku tidak etis. Di Jepang, Menteri Pertaniannya mengundurkan diri karena melakukan kebijakan yang merugikan kepentingan public. Bahkan masih terjadi praktik bunuh diri bila ada pejabat yang terbukti di mata public telah melakukan skandal.

Kedua, bila di masa Orde Baru stabilitas dijadikan paradigma dalam memerintah, sekarang kemajemukan dan pelaksanaan *check and balances* harus dikembangkan di antara ke tiga cabang kekuasaan yang ada: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Hal ini mengandung konsekuensi perlunya mewujudkan lembaga perwakilan rakyat yang lebih jelas fungsinya. Keinginan untuk membentuk sistem Dua Kamar (*bicameral*) dalam lembaga perwakilan rakyat kita – mewakili suara pemilih dan wilayah – nampaknya tidak dibarengi dengan sikap politik untuk mewujudkannya dalam praktik kenegaraan. Untuk mengurangi

kekuasaan Presiden yang kerap kali dipersonalkan, dan tidak dipandang sebagai puncak piramida kekuasaan, UUD 1945 yang diperbaharui itu pun sudah merealisasikannya lewat pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Demikian pula dengan pemimpin daerahnya. Sejalan dengan implementasi otonomi dan prinsip-prinsip demokrasi daerah, setiap kepala daerah mulai 2005 dipilih oleh rakyat secara langsung, bukan anggota dewan. Selain akan mengurangi peran uang di dalamnya (*money politics*) secara vulgar, rakyat diajak untuk secara terbuka menentukan pemimpinnya. UUD baru pun telah dijadikan dasar dalam menentukan sistem pemerintahan yang kita anut selanjutnya, yakni Presidensial bukan Parlemerter. Demikian pula halnya dengan bentuk negara, tetap seperti yang sejak semula diharapkan oleh sebagian besar elite politik kita, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, pada tataran cabang-cabang kekuasaan, pemerintah (*Executive*) harus sungguh-sungguh melaksanakan “amanat penderitaan rakyat baru”, yakni mengatasi kesulitan ekonomi dan kesenjangan pendapatan baik antar sector maupun antar golongan. Jangan seperti sekarang, semua urusan hendak diatasi, namun dalam praktiknya, tak satu pun yang kelihatan menonjol sebagai tindakan yang ampuh dalam mengatasi keadaan. Tidak adanya prioritas, telah menjadikan Pemerintah SBY (JK dan kini Boediono) menjadi sebuah pemerintah yang tidak efektif. Soal kejujuran, kita sendiri menerka-nerka. Seberapa jauh prinsip tersebut dijadikan pegangan Pemerintah. Apakah dengan adanya konferensi pers Presiden SBY tentang aliran dana untuk kampanye pilpres di masa lalu, pada Jumat, 26 Mei 2007 semuanya jadi terang benderang? Rasanya tidak. Yang paling menarik adalah bahwa sejak itu, suasana kian memanas, polarisasi terjadi antara Kubu SBY vs. Amien Rais.

Khawatir akan berdampak negative terhadap stabilitas politik, tokoh-tokoh yang lain menyarankan agar keduanya menghentikan permusuhan. Dari pada membuka aib semuanya, lebih baik mengalah untuk tidak meneruskan iklim “buka-bukaan”. Budaya politik elite yang menghargai kesantunan terasa lebih penting ketimbang penegakan hokum. Ketika Sementara para anggota lembaga perwakilan rakyatnya harus berpikiran ke depan, tidak hanya membahas persoalan-persoalan politik kekinian (baca: kekuasaan), melainkan mengembangkan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran dalam arti yang luas. Siapa pun yang

duduk pada posisi yudikatif, sudah sepatasnya untuk secara obyektif dan jujur melakukan terobosan hukum yang mendukung penegakan keadilan dan sistem hukum nasional yang lebih demokratis.

Keempat, bagi pemimpin masyarakat, berbagai rekayasa sosial hendaknya ditingkatkan untuk membangun sebuah masyarakat yang lebih mandiri dan tidak tergantung kepada negara. Partai politik dan berbagai Kelompok Penekan, hendaknya dapat menjadi fasilitator bagi pengembangan masyarakat madani. Partai politik mestinya tidak semata-mata dijadikan medium bagi mobilitas vertikal para aktivisnya, melainkan sungguh-sungguh didorong untuk mengembangkan dua fungsi utamanya: *inputs* dan *outputs*. Fungsi *inputs* berupa: artikulasi dan agregasi kepentingan, sosialisasi dan pendidikan politik rakyat. Fungsi *outputs*-nya berupa keterlibatan dalam pembuatan keputusan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan. Sejauh ini, nampaknya, peran partai politik masih jauh dari fungsi tersebut, dan tertinggal di belakang ketimbang Kelompok Penekan atau pun organisasi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Jujur harus diakui bahwa Revolusi Mei pun, sebagian besar dipengaruhi oleh maraknya pikiran demokratisasi yang ada di organisasi yang disebutkan belakangan, bukan partai politik.

Kelima, lahirnya berbagai organisasi pengawas independent dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan Negara. Khawatir akan terjadinya kolusi antara lembaga pengawas pemerintah yang sebelumnya terbentuk dengan lembaga yang diawasi, bermacam elemen masyarakat membentuk berbagai komisi yang ditujukan untuk memperkuat makna *Civil Society* di negeri ini. Ada di antaranya yang mampu menarik batas dengan Negara (pemerintah), namun tidak sedikit pula yang dibentuk oleh Negara. Seluruh cabang kekuasaan pemerintahan sekarang telah diimbangi oleh adanya berragam komisi pengawas independent. Kita berharap agar cita-cita tersebut dapat diwujudkan. Mereka yang masuk menjadi anggotanya sangat diharapkan untuk mampu merealisasi idealisme di atas, bukan menjadi calo politik (*political brockeraage*). Semoga, penyimpangan atas lembaga pengawas independent ini terjadi hanya pada KPU dan Komisi Yudisial, tidak untuk yang lain-lain. Sebab bila hal ini terbukti, pupus sudah kepercayaan public terhadap lembaga yang mengatas-namakan *Civil Society* tersebut.

Tentu, kita semua berharap agar Pemilu akan menjadi titik balik bagi konsolidasi demokrasi di tanah air. Dalam arti , bukan hanya kontestasi dan partisipasi secara lebih masif dan terbuka yang terjadi dalam , melainkan juga kualitas demokrasinya yang kian berkembang. Munculnya partai politik dan figure-figur politik baru merupakan sebuah keniscayaan dari kemajemukan. Tapi yang jauh lebih penting adalah seberapa besar fenomena politik yang demokratis tersebut mempunyai dampak langsung terhadap peningkatan kualitas kita dalam bernegara dan bermasyarakat. Barangkali sudah tiba masanya bagi para pemimpin politik kita untuk memberi perhatian pada pentingnya etika kekuasaan, bukan sekedar ambisi untuk berkuasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Carter, Stephen. (1998). *Civility*, Harper Perrenial, New York, 1998.
- Dahl, Robert A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven, Yale University, 1971
- Dewey, John. (1927). *The Public and Its Problems*, New York: Henry Holt and Co, 1927
- Fukuyama, Francis. (1992). *The End of History and the Last Man*, Avon Books, New York, 1992
- Huntington, Samuel P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Pers, Norman and London, 1991

KONFLIK KEKERASAN DAN TANTANGAN PRESIDEN TERPILIH INDONESIA 2014-2019

Fathun Karib

*Peneliti Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) – The Habibie
Center (THC) & Dosen Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
Email: fathun.karib@gmail.com*

PENDAHULUAN

Pemilu Presiden pada 9 Juli 2014 telah dilaksanakan dengan dua kandidat yaitu pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa bersaing dengan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebelumnya KPU telah mengumumkan hasil pemilu presiden dimana pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangkan 53,15% suara mengalahkan pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa yang mendapatkan 46,85% suara (KPU, 2014). Setelah melalui proses gugatan hasil pemilu di Mahkamah konstitusi, akhirnya pada 22 Agustus 2014 pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla disahkan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.

Indonesia akan mengalami pergantian kepemimpinan nasional dalam waktu dekat ini dan sistem demokrasi Indonesia berada pada titik kritis dan menentukan. Apakah proses yang sudah berjalan 16 tahun dapat memasuki tahap konsolidasi demokrasi atau harus menjalani

demokratisasi berkepanjangan? Agenda demokrasi kedepan menghadapi tantangan dan kepemimpinan yang baru oleh Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah yang baru kedepan adalah mengatasi konflik kekerasan yang masih terjadi didalam masyarakat Indonesia serta mengantisipasi munculnya kekerasan dalam bentuk varian-varian konflik baru.

Secara umum Indonesia dipandang telah bangkit dan menjadi negara dengan kekuatan demokrasinya di kawasan Asia. Ahli Hubungan Internasional, Profesor Amitav Acharya mengidentifikasi bahwa Indonesia pasca-Soeharto dapat bangkit dan mengalami kemajuan karena bersandar pada tiga fondasi dasar kebijakannya yaitu demokrasi (*democracy*), pembangunan (*development*) dan stabilitas (*stability*) (Acharya, 2014, hal. 19). Acharya melihat tiga fondasi ini digunakan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai formula yang mampu mengangkat Indonesia sebagai salah satu kekuatan Asia yang baru. Demokrasi, pembangunan dan stabilitas saling berhubungan dan bersinergi positif membentuk apa yang disebut oleh Acharya sebagai *lingkaran kebajikan* (*virtuous circle*) (Acharya, 2014, hal. 19). Lebih lanjut, Acharya melihat bahwa demokrasi memupuk stabilitas domestik yang berdampak bagi majunya pembangunan ekonomi dan pada saat yang bersamaan pembangunan ekonomi dan stabilitas domestik mendukung legitimasi bagi proses konsolidasi demokrasi (Acharya, 2014, hal. 19-20).

Terlepas dari optimisme Acharya dengan “lingkaran kebajikan”nya dalam melihat kondisi Indonesia selama sepuluh tahun terakhir ini, pemerintahan SBY masih meninggalkan beberapa permasalahan terkait konflik dan kekerasan. Hubungan ketiga elemen *lingkaran kebajikan* dipermukaan nampak memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap keadaan Indonesia. Namun, hubungan di antara demokrasi, pembangunan dan stabilitas yang di klaim positif sebagai tesis utama dari karyanya tersebut tidak berhasil menangkap secara utuh perubahan (*transformation*) dan pergeseran (*shifting*) konflik dan kekerasan selama berlangsungnya 16 tahun proses demokratisasi yang terjadi di

Indonesia.

Tulisan ini berusaha memberikan gambaran lain mengenai hubungan di antara demokrasi, pembangunan dan stabilitas selama kurun waktu 2005-2013. Dengan menggunakan data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK), konflik kekerasan sebagai bagian dari kontinum stabilitas-instabilitas internal akan diposisikan sebagai isu sentral dalam hubungannya dengan demokrasi dan pembangunan. Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) dibangun oleh kerjasama antara Kemenkokesra dengan Bank Dunia dan The Habibie Center (THC) bertujuan mengidentifikasi pola-pola kekerasan yang terjadi guna untuk melakukan pencegahan kekerasan di masa yang akan datang. Di dalam kerjasama tersebut, THC berperan dalam komponen studi dan analisis untuk mendukung kebijakan bagi para pemangku kepentingan terkait.

Saat ini, data SNPK disusun dari insiden-insiden kekerasan yang berasal dari 13 provinsi yang dianggap sebagai daerah-daerah *conflict hotspot*. Terdapat empat jenis kekerasan yaitu 1) konflik kekerasan, 2) kekerasan dalam rumah tangga, 3) kekerasan aparat dan 4) kekerasan dalam kriminalitas. Dari keempat jenis kekerasan tersebut Tim SNPK - THC memfokuskan pada konflik kekerasan dengan enam tipe konflik yang terkait kekerasan didalamnya yaitu, a) konflik sumber daya, b) konflik tata kelola pemerintahan, c) konflik pemilihan dan jabatan, d) konflik identitas, e) konflik main hakim sendiri dan f) konflik separatisme.

Bagian pertama tulisan ini akan mengulas beberapa argumentasi mengenai klaim stabilitas internal sebagai bagian dari lingkaran kebajikan berada pada tingkat permukaan dan bersifat jangka pendek. Data SNPK digunakan untuk memperlihatkan bahwa klaim kesuksesan pemerintahan SBY dalam menjaga stabilitas internal di Indonesia yang dinyatakan oleh Profesor Acharya tidak bersifat menyeluruh mengingat di daerah-daerah pantauan SNPK konflik kekerasan dengan bentuk varian-varian baru bermunculan. Bagian kedua, akan membahas desentralisasi dan pola konflik kekerasan di daerah serta keterkaitan diantara kekerasan dibidang politik, ekonomi dan sosial. Bagian terakhir merupakan catatan kesimpulan yang perlu mendapatkan perhatian bagi presiden terpilih dalam agenda pemerintahannya lima tahun kedepan.

LINGKARAN KEBAJIKAN ATAU LINGKARAN KEKERASAN?

Merebaknya konflik dan kekerasan di awal proses transisi demokrasi periode 1997-2004 menandakan bahwa perubahan sistem politik di Indonesia membuka ruang bagi konflik horizontal di masyarakat. Konflik komunal dengan skala besar berbasis identitas etnik dan agama bermunculan. Jacques Bertrand melihat proses ini sebagai *titik kritis (critical Junctures)* dimana perubahan institusional pada momen kritis dalam perjalanan sejarah politik di Indonesia menjadi faktor penting untuk menjelaskan pengelompokan dan waktu terjadinya kekerasan dalam konflik etnik (Bertrand, 2010, hal. 86). Titik kritis ini disebabkan oleh adanya perubahan institusional karena jatuhnya rezim Orde Baru yang sentralistik dan pergantian sistem politik dari otoriter menjadi sistem yang lebih demokratis.

Setelah melewati titik kritis ini, Acharya melihat bahwa dalam periode 10 tahun pemerintahan SBY telah berhasil membangun stabilitas domestik Indonesia. Acharya misalnya menyebutkan salah satu keberhasilan adalah kebijakan rekonsiliasi yang ditawarkan pemerintahan SBY dalam menyelesaikan isu separatisme sehingga sudah tidak menjadi masalah besar bagi Indonesia (Acharya, 2014, hal. 42). Salah satu keberhasilan yang dimaksud oleh Acharya adalah perjanjian damai Helsinki di tahun 2005 antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia. Keberhasilan ini dan penyelesaian konflik-konflik yang ada selama periode kepemimpinan SBY yang dianggap Acarnya sebagai cerminan stabilitas dan bekerjanya lingkaran kebajikan.

Di lain sisi, keberhasilan dalam stabilitas tersebut bila diperhatikan lebih mendalam berada pada tingkat permukaan dan bersifat jangka pendek. Bank Dunia dalam laporannya di tahun 2011 mengidentifikasi adanya "siklus berulangnya kekerasan" (*repeated cycles of violence*) dimana konflik kekerasan yang telah mereda memiliki potensi untuk muncul kembali ke permukaan atau mendorong munculnya konflik kekerasan baru (World Bank, 2011). Ada beberapa fakta yang berasal dari data SNPK memperkuat bahwa upaya menciptakan stabilitas di era pemerintahan SBY pada saat yang bersamaan membuka peluang bagi terbentuknya konflik dan kekerasan baru.

Dari pantauan tim SNPK-THC selama periode 2005-2013 terdapat tiga konflik terkait bidang politik, ekonomi dan sosial yang mengalami kenaikan insiden kekerasan dibalik stabilitas selama periode sepuluh tahun terakhir ini. Konflik di bidang politik terkait dengan demokratisasi di daerah dimana praktek demokrasi lokal melalui pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) memiliki potensi konflik kekerasan terutama di wilayah pasca-konflik. Di bidang ekonomi, sumber daya alam sebagai salah satu sumber aktivitas ekonomi dalam kegiatan pembangunan menjadi salah satu faktor yang dapat

mendorong terjadinya konflik kekerasan. Di bidang sosial terkait hubungan antarkelompok di masyarakat, meskipun konflik komunal berskala besar mengalami penurunan, kehidupan dan hubungan sosial antarkelompok dengan latar belakang identitas budaya seperti etnik, suku, agama dan antar-golongan masih memiliki potensi tersembunyi (*laten*) bagi munculnya kekerasan.

Di bidang politik, Perubahan institusional dari terpusat menjadi menyebar membuka ruang bagi sistem demokrasi lokal dan pada saat bersamaan mendorong konflik yang berada pada tingkat nasional mengambil tempat di tingkat sub-nasional. Konflik vertikal separatisme di Aceh antara GAM dan pemerintah telah usai namun demokratisasi dan desentralisasi membuka ruang bagi munculnya konflik horizontal pasca Helsinki di antara para anggota GAM dalam memperebutkan posisi dan kekuasaan di provinsi Aceh.

Muhammad Hasan Ansori melihat dengan terbentuknya Partai Aceh sejumlah mantan anggota GAM menduduki beberapa jabatan bergengsi dan strategis serta mendapatkan kontrak menandakan terbentuknya lingkaran baru kekuasaan dan struktur sosial yang mendorong munculnya persaingan internal dan konflik sosial di Aceh (Ansori, 2012, hal. 35). Persaingan internal ini mendorong munculnya tiga bentuk konflik antar aktor yaitu konflik antara elit GAM, antar komandan kombatan dengan elit GAM dan diantara etnik mayoritas Aceh dengan kelompok etnik minoritas (Ansori, 2012, hal. 35-39). Manifestasi kekerasan dalam konflik baru ini menemukan kontekstualisasinya dalam kekerasan terkait Pemilukada dan Pemilu Legislatif 2014.

Semenjak Pemilukada dilaksanakan pada tahun 2005, Tim SNP-K-THC menemukan 9 dari 13 provinsi yang dipantau terdapat 585 insiden kekerasan terkait Pemilukada dengan dampak mematikan 47 tewas, 510 cedera dan 416 bangunan rusak.¹ Meskipun kekerasan berjumlah cukup besar dalam Pemilukada, 48% insiden tersebut berskala kecil yaitu kerusakan properti milik pesaing seperti alat peraga (baliho dan spanduk), posko partai dan kendaraan. Kekerasan dalam Pemilukada paling sering terjadi di Aceh dengan 204 insiden berdampak 6 orang tewas dan 125 cedera.

Kontestasi politik dalam Pemilu nasional juga memperlihatkan bertambahnya deretan konflik kekerasan. Teror penembakan terkait Pemilu legislatif 2014 di Aceh beberapa waktu lalu merupakan indikasi bagi munculnya konflik kekerasan dalam Pemilu nasional. Dari data SNP-K periode Januari-April 2014 ini, telah terjadi 162 insiden kekerasan terkait Pemilu legislatif yang lalu dengan dampak 7 tewas, 62 cedera dan 54 bangunan rusak.² Terdapat kesamaan pola dengan Pemilukada dimana Aceh merupakan wilayah yang paling banyak

1 Lihat publikasi Kajian Perdamaian dan Kebijakan Edisi 04/Agustus 2013. Edisi ini membahas kekerasan di dalam Pemilukada.

2 Lihat publikasi Kajian Perdamaian dan Kebijakan Edisi 07/Juni 2014. Edisi ini membahas kekerasan dalam Pemilu Legislatif Mei 2014

terjadi insiden kekerasannya (53.7%), diikuti dengan NTB (12.3%), Papua (8.6%) dan insiden lainnya tersebar secara merata di 9 provinsi lainnya (25.3%).

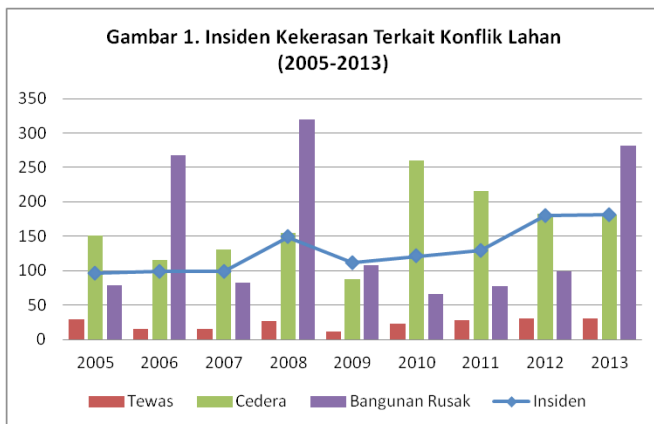
Kekerasan dalam dua pemilu ini memperlihatkan bahwa instabilitas dalam derajat tertentu masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dalam konteks Pemilukada, kekerasan bersifat lokal dan terkait dengan kondisi transisi pasca-konflik seperti yang terjadi di Aceh. Berkembangnya persaingan lokal di antara para mantan anggota GAM dalam memperebutkan kursi jabatan formal ditingkat provinsi, kabupaten/kota dan kursi legislatif DPRD Aceh memperlihatkan faktor lokal yang khas dalam insiden-insiden kekerasan yang terjadi. Dalam konteks pasca Pemilu Legislatif 2014 yang lalu, selain terkait dengan konteks lokal dan kondisi pasca-konflik beberapa pengamat memberikan analisisnya akan bahaya kembali ke otoritarianisme jika salah satu calon presiden dengan latar belakang pelanggaran hak asasi manusia terpilih dalam Pemilu Presiden (Aspinal, 2014, Bourchier, 2014, Aspinal, Mietzner, et al, 2014). Baik Pemilukada dan Pemilu Legislatif 2014 menunjukkan demokratisasi dan penyelenggaraan praktek demokrasi memiliki potensi dan dampak yang tidak langsung bagi munculnya kekerasan.

Di bidang ekonomi, konflik sumber daya terkait kegiatan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan merupakan elemen yang dapat mengganggu stabilitas. Dalam periode sembilan tahun, kekerasan terkait konflik lahan meningkat dari tahun 2005 ke tahun 2013 dengan total 1166 insiden berdampak 210 tewas, 1483 cedera dan 1481 bangunan rusak (lihat Gambar 1). Pada periode 2005-2013, NTT adalah daerah dengan insiden kekerasan terkait konflik lahan tertinggi yaitu 191 insiden dengan dampak mematikan 68 tewas, 244 cedera dan 284 bangunan rusak.³

Tanah merupakan sumber daya yang penting dalam proses pembangunan karena memiliki beberapa kegunaan yang dapat dikelompokkan dalam dua fungsi krusial⁴. *Fungsi Pertama*, sebagai lahan untuk melaksanakan

3 Data tersebut diambil pada 19 Februari 2014 dari www.sn timer-indonesia.com.

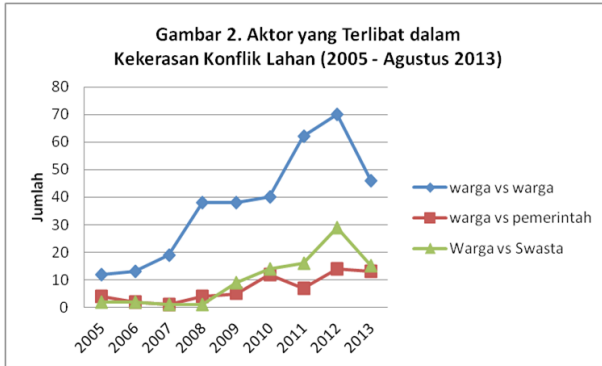
4 Untuk fungsi tanah untuk pembangunan dapat dilihat undang-undang Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan dan Kepentingan Umum Nomor 2 tahun 2012; Pasal 3 "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak" dan Pasal 10 Ta-



Sumber: Diolah Dari Data SNPK 2005-2013.

kegiatan pembangunan ekonomi seperti pembuatan infrastruktur jalan, bangunan kantor, pabrik serta untuk industri perkebunan dan pertanian. *Fungsi kedua* adalah bahwa tanah di berbagai penjuru Indonesia dibawah permukaannya menyimpan sumber daya alam seperti minyak dan gas serta berbagai kandungan mineral mulai dari emas sampai dengan batubara, Tanah dan kedua fungsinya yang krusial bagi kepentingan pembangunan seringkali bersebrangan dengan kepentingan masyarakat lokal dimana bagi mereka tanah adalah sumber kehidupan sosio-ekonomi dan budaya. Pada titik persinggungan dua kepentingan yang berbeda ini aktor pembangunan seperti negara dan perusahaan seringkali berkonflik dengan warga masyarakat lokal (adat) dalam klaim kepentingan atas tanah.

nah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: a. pertahanan dan keamanan nasional; b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; j.fasilitas keselamatan umum; k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya; n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan: pasar umum dan lapangan parkir umum.

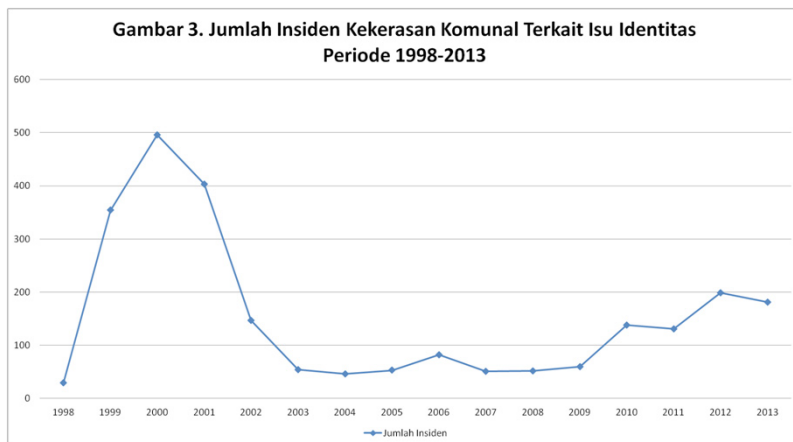


Sumber: Diolah Dari Data SNPK 2005-2013.

Dalam proses demokratisasi selama 16 tahun ini konflik lahan mengalami perubahan hubungan antar aktor yang terkait konflik kekerasan. Disatu sisi, konflik vertikal terkait perebutan lahan antara negara dengan masyarakat lokal atau perusahaan dengan masyarakat lokal tetap terjadi. Namun, dilain sisi, selama periode 2005- Agustus 2013 konflik horizontal terkait perebutan lahan antarwarga (baik antarwarga lokal, maupun antara warga lokal dan warga pendatang) bermunculan (lihat Gambar 2).

Dalam data SNPK, dari 13 provinsi yang dikaji, NTT merupakan wilayah dengan insiden kekerasan tertinggi terkait lahan yang didominasi oleh kekerasan antarwarga terkait klaim kepemilikan individu dan kepemilikan komunal dengan 155 insiden, 87 tewas dan 258 cedera.⁵ Konflik klaim kepemilikan individu adalah dimana kekerasan terjadi antar individu, keluarga atau antarkelompok akibat perebutan lahan antar tetangga (domestik) serta lahan garapan. Sedangkan konflik klaim kepemilikan komunal dimana konflik lahan terjadi antara kelompok suku/desa dengan kelompok suku/desa lainnya dalam memperebutkan lahan bersama seperti batas desa atau tanah ulayat. Untuk konflik lahan kepemilikan komunal seringkali kekerasan didorong oleh kebijakan

⁵ Lihat publikasi Kajian Perdamaian dan Kebijakan Edisi 05/November 2013. Edisi ini membahas mengenai tren kekerasan terkait konflik lahan dengan mengambil studi kasus konflik antarwarga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data mengenai konflik lahan antarwarga di NTT merupakan data gabungan dari publikasi Kajian Perdamaian dan Kebijakan, Edisi 05/ November 2013 dengan data yang diambil pada 19 Februari 2014 dari www.snpk-indonesia.com.



Sumber: Kajian Perdamaian dan Kebijakan – The Habibie Center, Edisi 06/Maret 2014, hal 8

struktural seperti pemekaran daerah dan pembangunan wilayah ekonomi. Sengketa klaim lahan 15 hektar antara Desa Lewonara dengan Desa Lewobunga, Adonara Timur, misalnya dipicu oleh naiknya nilai tanah karena pemerintah setempat berencana membangun pasar hewan, rumah sakit dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Dalam hubungan antarkelompok di masyarakat, sejak 2005 kekerasan komunal berskala besar mengalami penurunan. Namun demikian konflik antar kelompok berbasis identitas masih terus terjadi dengan skala yang lebih kecil dari periode sebelumnya (**lihat Gambar 3**). Data SNPK mencatat telah terjadi 610 insiden kekerasan dengan 182 tewas, 2271 cedera dan 1916 bangunan rusak terkait konflik antar kelompok etnis/suku, agama, pendatang vs lokal dan antar golongan lainnya di sepanjang 2005-2013⁶. Selain faktor perbedaan identitas, data SNPK juga mencatat sejumlah insiden-insiden kekerasan di masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari akibat main hakim sendiri (10537 insiden), kriminalitas (55074 insiden) dan KDRT (8505 insiden).

Salah satu permasalahan terkait kehidupan sosial dan antarkelompok adalah kebijakan struktural dalam penanganan konflik pada periode pasca-konflik. Dari hasil penelitian Tim SNPK – The Habibie Center

⁶ Lihat publikasi Kajian Perdamaian dan Kebijakan Edisi 06/Maret 2014. Edisi ini membahas konflik antarkelompok di Indonesia.

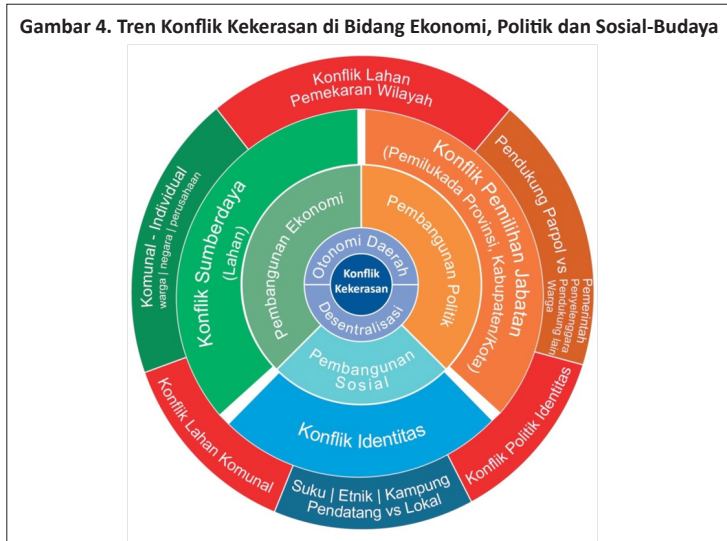
mengenai kebijakan rekonstruksi pasca-konflik di Ambon yang mengakibatkan akibat tidak langsung (*indirect*) dan tidak disengaja (*unintended consequence*) dalam munculnya segregasi sosio-spasial baru dalam hubungan masyarakat Islam dan Kristen di Ambon (Tim SNPK: 2014). Salah satu kebijakan yang menimbulkan segregasi diantara masyarakat Islam dan Kristen di Ambon adalah kebijakan relokasi sehingga daerah Ambon yang relatif heterogen dihuni oleh kedua kelompok masyarakat menjadi homogen hanya dihuni oleh penduduk dari satu kelompok masyarakat.

Hubungan di antara demokrasi, pembangunan dan stabilitas seperti pedang bermata dua dimana ketiga elemen tersebut tidak hanya dapat menciptakan sebuah lingkaran kebajikan tetapi juga dapat mendorong bagi munculnya masalah-masalah baru yang memiliki potensi konflik dan kekerasan. Ini menunjukkan bahwa hubungan di antara demokrasi, pembangunan dan stabilitas tidak bersifat statis dan dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Keberhasilan suatu proses perdamaian yang mengantarkan suatu masyarakat pada kondisi pasca konflik perlu dipelihara dari waktu ke waktu atau dapat menjadi "*bom waktu*" dan menjadi bagian dari lingkaran kekerasan.

DESENTRALISASI DAN POLA KONFLIK KEKERASAN DI DAERAH

Tren kekerasan dari data SNPK memperlihatkan bahwa insiden-insiden kekerasan mewujud di tingkat sub-nasional (provinsi & kabupaten) sampai dengan tingkat lokal (kecamatan dan keluarahan/desa). Ini berarti Presiden terpilih Joko Widodo bersama wakilnya Jusuf Kalla dan kabinetnya harus memiliki wawasan dan visi yang jelas terhadap proses desentralisasi dan otonomi daerah untuk mencegah dan mengatasi potensi dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh keduanya.

Rachael Diprose dengan menggunakan studi kasus di Sulawesi Tengah melihat bahwa proses desentralisasi memiliki dampak positif dan negatif yang perlu diperhatikan terutama di wilayah-wilayah pasca-konflik dan berpotensi konflik. Secara positif desentralisasi telah meredakan ketegangan hubungan diantara pusat-daerah, membuka ruang bagi kelompok-kelompok identitas yang selama ini termarginalkan di daerah-daerah serta meningkatkan otonomi lokal dan partisipasi dalam mengambil keputusan memilih kepala daerah melalui Pemilukada



Sumber: Diolah Dari Data SNPK 2005-2013.

(Diprose, 2009). Pada saat yang bersamaan, proses ini menimbulkan ketegangan baru bila tidak dimonitor dengan baik dimana potensi segregasi berdasarkan etnik-agama dan acuan identitas lainnya dapat bertambah akibat pemekaran unit administratif ditingkat subnasional (Diprose, 2009).

Ada dua hal yang perlu diperhatikan terkait desentralisasi dan pola konflik kekerasan di daerah pada masa periode pemerintahan 2014-2019 nantinya. *Pertama*, Dari hasil pemetaan data SNPK secara struktural tren kekerasan yang mengemuka menunjukkan bahwa satu kasus atau insiden kekerasan dapat sekaligus melingkupi konflik di bidang ekonomi, politik dan sosial (lihat Gambar 4). Konflik lahan sebagai perebutan sumberdaya ekonomi dapat bersinggungan dengan konflik dibidang politik terkait pemekaran wilayah. Dalam proses pemekaran wilayah seringkali pembentukan suatu daerah administratif baru tidak diiringi oleh pemetaan tanah secara historis dan akurat sehingga sering kali menimbulkan perebutan klaim kepemilikan diantara kelompok masyarakat ditingkat desa.

Tanah yang menjadi sumber subsisten kelompok-kelompok ulayat yang digarap bersama statusnya dapat bermasalah setelah dipotong

oleh garis administrasi yang baru. Akhirnya konflik lahan berkembang tidak hanya menjadi konflik pemekaran dibidang politik tetapi juga berkembang menjadi konflik dibidang sosial diantara dua kelompok adat. Insiden-insiden kekerasan terkait lahan di sejumlah daerah seperti NTT dan Lampung menunjukkan adanya perebutan sumber daya yang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi yang beririsan dengan isu politik seperti pemekaran wilayah batas desa dan hak sosial-budaya atas tanah (hak ulayat). Faktor ekonomi politik ini dapat mengambil wujud konflik dan persetujuan antarkelompok berbasis identitas seperti etnis/suku, agama, pendatang vs lokal dan antar golongan lainnya.

Kedua, proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diwariskan oleh pemerintahan SBY berpotensi konflik dan perlu untuk ditinjau kembali. Kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah baik di tingkat nasional dan sub-nasional seringkali tidak mengindahkan faktor *human security* (keamanan manusia). Dalam kasus sengketa lahan misalnya, proyek pembangunan seringkali melakukan proses penyingkiran manusia dari tanah (*land dispossession*) sehingga menjadi korban *internal displacement* (pengungsi internal). Studi yang dilakukan oleh tim peneliti Sajogyo Institute mensinyalir mega proyek MP3EI bahkan memiliki dampak yang lebih besar yaitu percepatan dan perluasan krisis sosial-ekologis di Indonesia (Sajogyo Institute, 2014). Sajogyo Institute menemukan bahwa:

Salah satu yang jelas disembunyikan dan diabaikan oleh para designer pembangunan dan pemerintah yang mengusung MP3EI adalah bahwa Indonesia telah dan sedang mengalami krisis sosial-ekologis yang akut dan mendalam...Krisis itu dapat berupa kemiskinan kronik, eksploitasi tenaga kerja, konflik agrarian yang bersifat laten dan kronis, kerusakan lingkungan, perampasan tanah serta berbagai macam kekerasan, dan lainnya (Sajogyo Insitute, 2014, 68)

Terkait dengan perampasan tanah dalam proyek pembangunan, hubungan manusia dengan tanah dan hak untuk tinggal di wilayah tertentu secara internasional diakui sebagai hak asasi universal. PBB misalnya pada tahun 1998 mengesahkan Prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal dimana pada prinsip ke enam (c) dinyatakan “setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi dari pemaksaan sewenang-

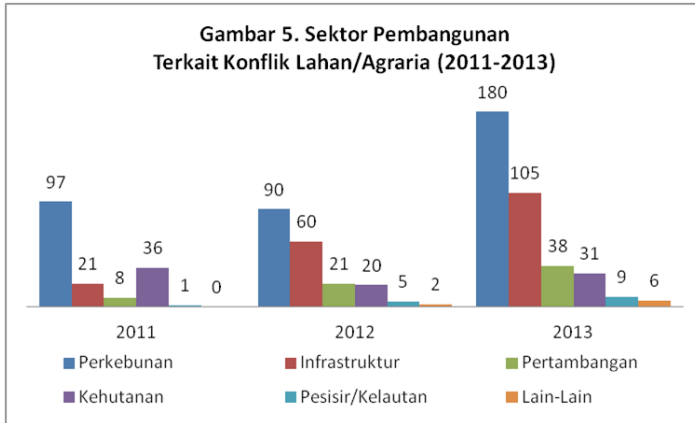
wenang untuk mengungsi dari rumahnya atau dari tempat dia bisa tinggal dalam kasus proyek pembangunan berskala besar yang tidak bisa dibenarkan atas nama kepentingan umum” (Komnas HAM, 2007, hal. 98). Dalam konteks ini, UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres No.71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum perlu ditinjau kembali apakah tidak bertentangan dengan prinsip PBB tersebut.

Rancangan dan implementasi MP3EI yang tengah berlangsung mengambil ruang dan waktu di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa. Ini berarti kegiatan pembangunan terkait sektor infrastruktur, perkebunan, pertambangan, kehutanan, pesisir/kelautan dan yang lainnya memiliki potensi konflik di tingkat daerah. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat kasus konflik lahan/agraria terkait sektor-sektor pembangunan tersebut (lihat Gambar 5). Infrastruktur pembangunan sebagai salah satu agenda utama MP3EI untuk membangun konektivitas ekonomi di daerah mendorong meningkatnya kasus konflik lahan terkait infrastruktur selama tiga tahun terakhir dimana pertahunnya terjadi 21 kasus (2011), 60 kasus (2012) menjadi 105 kasus (2013). Presiden terpilih dan kabinetnya perlu mempertimbangkan kenyataan-kenyataan ini dalam memformulasikan program pembangunan ekonomi mengingat sampai saat ini sensitifitas terhadap isu konflik kekerasan terkait pembangunan tidak nampak dalam program-program yang ditawarkan.

CATATAN AKHIR DAN TANTANGAN PRESIDEN TERPILIH

Pasangan Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan langsung menghadapi tiga hal penting terkait isu konflik kekerasan setelah pelantikan. *Pertama*, mencari formula untuk menyelesaikan konflik kekerasan yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya dan sudah terjadi dalam kurun 16 tahun setelah pasca Orde Baru. Pengalaman wakil presiden terpilih, Bapak Jusuf Kalla dalam menyelesaikan konflik dapat berguna bagi proses penyelesaian konflik yang ada. Salah satu kontribusi beliau adalah peran mediasi penyelesaian konflik antara pemerintah dan GAM dalam perjanjian Helsinki.

Kedua, membangun stabilitas jangka panjang dengan memelihara perdamaian dalam masyarakat pasca-konflik. Penyelesaian konflik



Sumber: Data diolah dari laporan KPA 2011-2013.

seperti yang terjadi di Aceh dan Ambon misalnya hanya merupakan salah satu tahapan. Secara jangka panjang perjanjian perdamaian antara kelompok-kelompok yang berkonflik perlu ditindaklanjuti dengan program-program perdamaian jangka panjang seperti program rekonsiliasi, pengatasan trauma dan pemberdayaan masyarakat yang telah mengalami konflik. Bank Dunia menekankan akses pada keamanan, keadilan dan pekerjaan bagi warga negara sebagai faktor-faktor yang dapat memutuskan siklus kekerasan (World Bank, 2011, hal. 8). Faktor-faktor tersebut perlu untuk diperhatikan oleh pemerintahan presiden terpilih sebagai prasyarat yang dapat mendukung pemeliharaan perdamaian jangka panjang. Selain itu kapasitas institusional yang memadai dari lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat berperan dalam menjaga perdamaian.

Ketiga, secara struktural sebab utama kekerasan seperti ketidakadilan dan tidak terdistribusinya kesejahteraan ekonomi dapat menimbulkan kesenjangan di antara masyarakat. Hal ini akan mendorong rapuhnya hubungan sosial antar kelompok sehingga rentan terhadap provokasi dan konflik yang dapat berujung pada kekerasan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah membangun hubungan positif antara pembangunan dan stabilitas tanpa menyingkirkan dan memarginalkan secara ekonomi kelompok-kelompok yang lemah. Proses pembangunan yang mengambil ruang dan waktu di wilayah provinsi, kabupaten/kota,

kecamatan dan desa harus berbanding lurus dengan usaha distribusi kesejahteraan kepada masyarakat daerah tersebut. Inilah tantangan-tantangan konsolidasi demokrasi yang dihadapi oleh presiden terpilih dan masyarakat Indonesia di tahun 2014-2019 nanti.

REFERENSI

- Acharya, Amitav. (2014). *Indonesia Matters; Asia's Emerging Democratic Power*, Singapore; World Scientific, Co, Pte, Ltd.
- Ansori, Mohammad Hasan. (2012). "From Insurgency to Bureaucracy: Free Aceh Movement, Aceh Party and the New Face of Conflict", *Stability*, 1(1): 31-44.
- Aspinal, Edward. (2014). "Indonesia on the Knife's Edge". Diakses dari <http://inside.org.au/indonesia-on-the-knifes-edge/> pada Kamis, 28-08-2014, 15:58 WIB
- Aspinal, Edward, Mietzner, Marcus, ett all. (2014). "Prabowo Subianto: Vote for me, but Just the Once". Diakses dari <http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/06/30/prabowo-subianto-vote-for-me-but-just-the-once/> pada Kamis 28-08-2014, 16:08 WIB.
- Bourchier, David. (2014). "Return to Autocracy in Indonesia?" Diakses dari <http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/06/25/return-to-autocracy-in-indonesia/> pada Kamis, 28-08-2014, 16.00 WIB.
- Boyle, Peter. (2014). "Indonesia: 'Prabowo's Deferat Will Keep Open Democratic Space'". Diakses dari <https://www.greenleft.org.au/node/56820> pada Kamis, 28-08-2014, 04.02 WIB.
- Dirpose, Rachael. (2009). "Decentralization, Horizontal Inequalities and Conflict Management in Indonesia", *Ethnopolitics*, 8(1): 107-134.

- Kementerian Koordinator Ekonomi dan Bapenas. 2011. MP3EI; Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Jakarta: Kementerian Koordinator Ekonomi Indonesia.
- Komnas HAM. (2007). Suatu Manual: Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal & Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia.
- KPU. (2014). Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Provinsi dan Luar Negeri Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 diakses pada hari Rabu, 10 September 2014 dari http://kpu.go.id/koleksigambar/PPWP_-_Nasional_Rekapitulasi_2014_-_New_-_Final_2014_07_22.pdf.
- Sajogyo Insitute. (2014). MP3EI; Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia, Yogyakarta & Bogor; Penerbit Tanah Air Beta bekerjasama dengan Sajogyo Institute
- Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK). (2013-2014). Sumber Data SNPK 2005 – 2013 di akses pada 19 Februari 2014 dari <http://www.snpk-indonesia.com/DataTools/UnduhData?lang=ina&randdo=1ebb8196-e867-424d-aca4-b931d0b7dc30&userid=563577>.
- The World Bank. (2011). The World Development Report 2011; Conflict, Security and Development, Washington DC, USA; The World Bank
- Tim SNPK THC. (2013, Edisi 04/Agustus). Peta Kekerasan di Indonesia (Januari-April 2013) dan Kekerasan dalam Pemilukada.
- (2013, Edisi 05/November). Peta Kekerasan di Indonesia (Mei-Agustus 2013) dan Konflik Lahan Antarwarga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2014, Edisi 06/Maret). Peta Kekerasan di Indonesia (September-Desember 2013) dan Konflik Antarkelompok di Indonesia.
- (2014, Edisi 07/Juli). Peta Kekerasan di Indonesia (Januari-April 2014) dan Kekerasan Pemilu Legislatif.

TANTANGAN PEMERINTAHAN BARU DALAM MENGHADAPI INTEGRASI PERBANKAN ASEAN 2020

Fina Astriana

Peneliti ASEAN Studies Program, The Habibie Center

Email: fina.astriana@habibiecenter.or.id

PENDAHULUAN

ASEAN merupakan salah satu institusi regional yang terus berkembang sejak didirikan pada tahun 1967. Bahkan melalui KTT ASEAN ke-9 pada tahun 2003, ASEAN bercita-cita ingin membentuk suatu komunitas bersama yaitu Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) pada tahun 2020. Namun pada saat KTT ASEAN ke-12 pada tahun 2007 di Cebu, Filipina, pelaksanaan Masyarakat ASEAN dimajukan ke tahun 2015.

Masyarakat ASEAN dibentuk berdasarkan tiga pilar, dimana salah satunya adalah pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA mensyaratkan adanya aliran bebas barang, jasa, modal, investasi, dan tenaga kerja terampil. Ada berbagai macam bentuk kerja sama ekonomi, liberalisasi maupun integrasi yang akan dilakukan melalui MEA. Salah satunya adalah integrasi perbankan melalui *ASEAN Banking Integration Framework* pada tahun 2020. Sektor keuangan negara-negara ASEAN masih didominasi oleh sektor perbankan sehingga integrasi perbankan akan memudahkan

integrasi keuangan di ASEAN. Lebih jauh lagi, integrasi tersebut akan memperkuat integrasi ekonomi secara keseluruhan.

Sektor perbankan Indonesia juga akan menjadi bagian dari integrasi perbankan ASEAN. Meskipun kinerja perbankan domestik sudah lebih baik pasca krisis moneter 1997/1998 dan mampu bertahan pada saat krisis keuangan global pada tahun 2008, namun posisi sektor perbankan masih berada di bawah sektor perbankan negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh sektor perbankan domestik. Inilah yang menjadi tugas bagi pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden terpilih Joko Widodo. Dalam kurun waktu lima tahun, Joko Widodo harus berupaya untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing sektor perbankan Indonesia agar dapat bersaing ketika integrasi perbankan terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini memberikan penjelasan mengenai integrasi perbankan ASEAN yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, menjabarkan beberapa tantangan sektor perbankan yang dihadapi oleh pemerintahan baru, dan diakhiri dengan rekomendasi kebijakan agar sektor perbankan Indonesia dapat bersaing ketika integrasi perbankan ASEAN terwujud.

INTEGRASI PERBANKAN ASEAN 2020

Salah satu pilar yang dibentuk untuk mendukung terwujudnya Masyarakat ASEAN adalah pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pilar tersebut terdiri dari empat karakteristik. Pertama, pasar tunggal dan basis produksi. Menurut Hew (2007, hal. 15), pasar tunggal adalah pasar dimana tidak ada diskriminasi terhadap barang dan jasa yang diperjualbelikan di suatu kawasan berdasarkan tempat asal barang atau jasa tersebut. Dengan kata lain tidak ada segmentasi secara geografis lagi ketika pasar tunggal terbentuk. Pasar tunggal dan basis produksi ditandai dengan adanya aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil.

Kedua, kawasan yang memiliki daya saing tinggi. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, diharapkan kompetisi antara perusahaan-perusahaan akan meningkat. Seiring dengan meningkatnya kompetisi

tersebut, kualitas barang dan jasa yang diperjualbelikan diharapkan akan meningkat. Selain meningkatkan daya saing di dalam kawasan, ASEAN akan dibentuk menjadi kawasan yang dapat bersaing dengan kawasan lain.

Ketiga, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Tidak dapat dipungkiri jika pembangunan ekonomi di ASEAN masih belum merata. Di satu sisi terdapat negara-negara ASEAN yang memiliki pembangunan ekonomi yang sangat pesat seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand namun di sisi lain masih ada negara ASEAN dengan pembangunan ekonomi yang masih rendah seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam atau CLMV. Oleh karena itu, pada tahun 2000 para pemimpin ASEAN menciptakan *Initiative for ASEAN Integration (IAI)* untuk mengurangi ketimpangan dan mempercepat integrasi negara-negara CLMV.

Keempat, kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian global. ASEAN akan menjadi bagian dari *global supply networks* sehingga ASEAN akan lebih terintegrasi dengan perekonomian global. Selain itu, ASEAN juga terus meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain melalui berbagai skema seperti *comprehensive economic partnership agreements* dengan tetap menjadi sentralitas ASEAN.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa aliran jasa akan menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya pasar tunggal dan basis produksi. Salah satu sektor jasa yang akan diliberalisasikan pada skema tersebut adalah sektor jasa keuangan. Liberalisasi jasa keuangan merupakan langkah penting menuju integrasi keuangan di kawasan ASEAN. Integrasi keuangan ini didukung dengan adanya kesepakatan yang disetujui oleh Menteri Keuangan ASEAN yaitu peta jalan integrasi moneter dan keuangan atau *Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN (RIA-fin)* pada tahun 2003.

Terdapat empat hal yang diatur dalam RIA-fin. Pertama, pengembangan pasar modal. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan infrastruktur pasar modal negara-negara ASEAN. Kedua, liberalisasi jasa keuangan yang ditargetkan akan dilakukan pada tahun 2015. Ketiga, liberalisasi arus modal. Hal ini diwujudkan

dengan mengurangi hambatan terhadap aliran modal seperti *foreign direct investment* (FDI) dan *foreign portfolio investment* (FPI). Keempat, kerja sama mata uang. Namun karena penggunaan mata uang bersama dianggap belum memungkinkan sehingga diskusi mengenai kerja sama mata uang tersebut belum berlanjut (Ganie, 2012).

Salah satu bagian sektor keuangan yang akan diliberalisasikan adalah sektor perbankan. Pada bulan April 2011, Gubernur Bank Sentral ASEAN sepakat dengan pembentukan *ASEAN Banking Integration Framework* (ABIF). Dalam upaya mematangkan konsep serta rencana pelaksanaan integrasi perbankan tersebut dibentuklah *Task Force on ASEAN Banking Integration Framework*. Tujuan dari ABIF adalah untuk melaksanakan liberalisasi multilateral di sektor perbankan pada tahun 2020 dan untuk meningkatkan stabilitas keuangan di kawasan (Wihardja, 2013:4). Integrasi perbankan dinilai penting untuk dilakukan agar semakin memperkuat integrasi keuangan dan integrasi ekonomi secara keseluruhan di kawasan ASEAN. Hal ini dilakukan dengan mengeliminasi berbagai hambatan sehingga perbankan ASEAN yang sesuai dengan dengan kriteria *Qualified ASEAN Banks* (QAB) dapat melakukan ekspansi ke negara ASEAN lainnya. Integrasi perbankan di ASEAN tidak bersifat *fully-integrated* tapi *semi-integrated*.

Implementasi integrasi perbankan mensyaratkan adanya empat pra kondisi yaitu harmonisasi regulasi, ketersediaan infrastruktur stabilitas keuangan, *capacity building* untuk negara Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (BCLMV), dan kesepakatan atas kriteria bank ASEAN (*Qualified ASEAN Banks/QAB*) (Wihardja, 2013, hal. 4). Pertama, harmonisasi regulasi. Menurut Kalemli-Ozcan dan Manganelli (2008) yang dikutip oleh Stavarek, Repkova, dan Gajdosova (2011), menghilangkan perbedaan regulasi yang dapat menimbulkan diskriminasi terhadap pihak-pihak berdasarkan tempat asal mereka merupakan prakondisi dari integrasi keuangan. Dengan demikian, dalam pembentukan integrasi perbankan ASEAN diperlukan adanya harmonisasi regulasi. Selama ini beberapa regulasi terkait sektor perbankan di masing-masing negara ASEAN masih berbeda satu sama lainnya. Perbedaan tersebut seperti regulasi yang mengatur kepemilikan saham bank oleh asing dan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank asing agar dapat membuka cabang di suatu negara.

Kedua, pembangunan infrastruktur stabilitas keuangan. Untuk menjamin stabilitas keuangan seiring dengan akan dilakukannya liberalisasi keuangan, diperlukan adanya sistem monitoring dan pengawasan regional, protokol manajemen krisis regional, dan *regional financial safety net* (Wihardja, 2014, hal. 3).

Ketiga, *capacity building* terutama untuk negara BCLMV. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas tenaga kerja di sektor keuangan negara BCLMV untuk mengurangi ketimpangan kualitas pada sektor keuangan di ASEAN.

Keempat, kesepakatan atas *Qualified ASEAN Banks* (QAB). QAB akan memuat kriteria-kriteria perbankan yang dapat melakukan ekspansi ke negara ASEAN lainnya karena tidak semua bank lokal akan dapat berpartisipasi di dalam integrasi perbankan tersebut. Hal ini dilakukan agar bank lokal yang masuk ke negara lain adalah bank yang sehat dan dapat menjadi agen pembangunan di negara penerima.

Berdasarkan laporan *Asian Development Bank*, terdapat tiga dimensi terkait dengan pembentukan integrasi perbankan di ASEAN. Dimensi pertama yaitu akses yang sama (*equal access*). Para pemimpin ASEAN harus sepakat untuk memberikan akses yang sama antara bank domestik dengan bank asing dari negara ASEAN lainnya yang memenuhi kriteria QAB. Dengan demikian, bank-bank tersebut juga akan dapat mengakses pangsa pasar domestik. Dimensi kedua yaitu perlakuan yang sama (*equal treatment*). Ke depannya, diskriminasi antara bank lokal dengan bank asing asal negara ASEAN lainnya harus dihilangkan. Dimensi ketiga adalah lingkungan yang sama (*equal environment*). Hal ini diwujudkan melalui harmonisasi regulasi untuk mencegah konflik antara otoritas nasional masing-masing negara (ADB, 2013, hal. 10-12).

Tidak seperti sektor jasa lainnya yang akan diliberalisasikan pada tahun 2015, integrasi perbankan baru akan dilakukan pada tahun 2020 sedangkan integrasi pasar modal dan asuransi tetap dilakukan pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan adanya risiko sistemik yang terdapat di sektor perbankan sehingga dibutuhkan persiapan yang lebih lama mengingat dana masyarakat tersimpan di sektor ini (Tempo, 2010).

Integrasi perbankan akan dilakukan dengan menggunakan skema *double track implementation* dimana negara-negara ASEAN dibagi menjadi dua

kelompok yaitu ASEAN-5 (Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina) dan BCLMV (Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) (East Asia Forum, 2012). ASEAN-5 akan melakukan integrasi perbankan terlebih dahulu kemudian BCLMV akan melakukan integrasi ketika sektor perbankan mereka sudah siap. Penerapan skema ini sesuai dengan formula *ASEAN minus X* dimana negara yang siap akan melakukan liberalisasi terlebih dahulu dan negara lain akan melakukan liberalisasi setelah siap.

TANTANGAN PEMERINTAH BARU

Dalam kurun waktu 2014 – 2019, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Joko Widodo memiliki peranan penting dalam mempersiapkan dan meningkatkan daya saing sektor perbankan Indonesia. Setahun setelahnya, persaingan antara bank-bank asal Indonesia seperti Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan bank dari Singapura seperti *Development Bank of Singapore* (DBS), dan bank dari Malaysia seperti Maybank dan CIMB akan semakin meningkat. Tidak dapat dipungkiri, meskipun bank-bank di Indonesia telah mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas pasca Krisis Ekonomi 1997/1998 dan mampu bertahan ketika krisis keuangan global pada tahun 2008 terjadi, namun secara keseluruhan sektor perbankan Indonesia masih berada di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura dan Malaysia.

Berdasarkan *The Financial Development Report 2012* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF) diketahui bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-53 dari 62 negara dalam hal sektor perbankan.¹ Posisi ini jauh tertinggal dibandingkan dengan Singapura yang menduduki peringkat ke-10. Selain itu, jika dibandingkan dengan keseluruhan negara ASEAN-5 (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia), sektor perbankan Indonesia berada di urutan terakhir.

1 Peringkat sektor perbankan pada *The Financial Development Report 2012* diukur berdasarkan tiga indikator utama yaitu indeks ukuran, indeks efisiensi, dan *financial information disclosure*.

Tabel 1. Peringkat Sektor Jasa Perbankan ASEAN-5 Tahun 2012

No.	Negara	Peringkat
1	Singapura	10
2	Malaysia	11
3	Thailand	28
4	Filipina	49
5	Indonesia	53

Sumber : *World Economic Forum* (2012)

Pemerintahan baru akan menghadapi banyak tantangan untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing sektor perbankan Indonesia di ASEAN. **Pertama**, masih rendahnya aset bank-bank asal Indonesia bila dibandingkan aset bank asal Singapura. Mengacu pada data Statistik Perbankan Indonesia dari Bank Indonesia pada bulan Juli 2014, sektor perbankan Indonesia saat ini terdiri dari 119 bank umum dengan total aset sebesar Rp 5.131 triliun. Pemilik total aset perbankan terbesar di Indonesia adalah Bank Mandiri dengan nilai sebesar Rp 674,74 triliun per bulan Juni 2014. Posisi ini disusul oleh BRI dan BCA dengan total aset masing-masing sebesar Rp 621,98 triliun dan Rp 512,84 triliun (Kompas, 2014).

Namun demikian, total aset tiga bank terbesar di Indonesia tersebut masih berada di bawah total aset perbankan Singapura. Singapura memiliki tiga bank terbesar yaitu *Development Bank of Singapore* (DBS), *Overseas-Chinese Banking Corporation* (OCBC), dan *United Overseas Bank* (UOB). Pada tahun 2013, DBS memiliki total aset terbesar yang mencapai US\$ 321 miliar, sementara itu total aset OCBC dan UOB masing-masing mencapai US\$ 270 miliar dan US\$ 94 miliar. Total aset masing-masing bank tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan total aset Bank Mandiri yaitu US\$ 64 miliar pada tahun yang sama (Tempo, 2014).

Kedua, masih terbatasnya kemampuan pemerintah Indonesia dalam melindungi dana nasabah di perbankan. Integrasi perbankan di ASEAN akan membuat masyarakat Indonesia dihadapkan pada lebih banyak pilihan bank untuk menempatkan dananya. Salah satu faktor yang dapat menjadi pertimbangan oleh masyarakat terkait dengan skema *deposit*

insurance. Menurut Diamond and Dybvig (1983) yang dikutip oleh Chu (2011, hal. 101), *deposit insurance* bertujuan untuk mencegah *bank runs* dengan menjaga dan mempromosikan stabilitas keuangan. Melalui *deposit insurance*, pemerintah dapat melindungi deposito nasabah untuk mencegah terjadinya penarikan dana oleh nasabah dari bank secara besar-besaran (*bank runs*) ketika ada masalah yang muncul di perekonomian terutama di sektor perbankan.

Di Indonesia, pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin dana simpanan masyarakat hingga maksimal Rp 2 miliar. Dalam hal ini, pemerintah mengadopsi skema *limited guarantee*. Bila dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia, jumlah ini cukup rendah. Kedua negara tersebut mengadopsi *blanket guarantee* dimana pemerintah menjamin semua dana simpanan masyarakat di bank. Bank sentral Singapura yaitu *Monetary Authority of Singapore* (MAS) menegaskan bahwa pemerintah menjamin semua deposito baik dalam dolar Singapura maupun dalam denominasi mata uang asing lainnya (Kok, Buthia, dan Chin, 2010: 744). Singapura dan Malaysia merupakan negara ASEAN yang memberikan jaminan paling besar dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Semakin besar *deposit insurance*, dana nasabah yang dilindungi akan semakin besar. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sektor perbankan. Kebijakan *limited guarantee* yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia dapat membuat masyarakat kalangan atas di Indonesia yang memiliki dana di atas Rp 2 miliar merasa lebih aman untuk meletakkan sebagian besar dananya di Singapura dan Malaysia dibandingkan di Indonesia. Adanya integrasi perbankan akan memudahkan masyarakat Indonesia memindahkan dananya ke negara ASEAN lainnya.

Ketiga, tantangan pemerintahan baru lainnya terkait dengan terwujudnya asas resiprokal. Selama ini bank-bank asing termasuk dari negara ASEAN lainnya seperti DBS dari Singapura mudah untuk membuka kantor cabang di Indonesia. Sebaliknya, aturan dan perizinan bank sentral di negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia cenderung mempersulit pendirian bank asing. Hambatan regulasi tersebut membuat bank lokal Indonesia sulit membuka cabang di negara-negara tersebut. Meskipun sudah memiliki kantor cabang, aktivitas bank lokal pun sering dibatasi.

Tabel 2 menunjukkan bahwa tiga bank terbesar di Singapura telah memiliki kantor cabang di Indonesia. Begitu pula dengan Maybank dan CIMB dari Malaysia. Sebaliknya, bank asal Indonesia yang memiliki kantor cabang di Malaysia dan Singapura hanya Bank Mandiri. BCA dan Bank Negara Indonesia (BNI) hanya memiliki cabang di Singapura. Apabila dilihat persebaran bank di ASEAN, hanya Malaysia dan Singapura yang memiliki cabang di hampir seluruh negara ASEAN. Sebaliknya, bank asal Indonesia hanya memiliki cabang di Singapura dan Malaysia.

Tabel 2. Keberadaan Bank-Bank ASEAN-5 (per Januari 2014)

Negara	Nama Institusi Keuangan	Malaysia	Singapura	Indonesia	Thailand	Filipina	Brunei Darussalam	Vietnam	Kamboja	Laos	Myanmar
Singapura	DBS	√	√	√	√	√		√			√
	OCBC	√	√	√	√	√	√	√			
	UOB	√	√	√	√	√	√	√			√
Malaysia	Maybank	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	CIMB	√	√	√	√		√	√	√		√
	Public Bank							√	√	√	
Indonesia	Bank Mandiri	√	√	√							
	Bank Rakyat Indonesia (BRI)			√							
	Bank Central Asia (BCA)			√							
Thailand	Bangkok Bank	√	√	√	√	√		√		√	√
	Siam Commercial Bank		√		√			√	√	√	√
	Krung Thai Bank		√		√			√	√		√
Filipina	BDO Unibank		√			√					
	Metrobank		√			√					
	Bank of the Philippines Islands					√					

Sumber : Hayashi (2014)

Saat ini pemerintah terus berupaya untuk memastikan terwujudnya asas resiprokal pada saat integrasi perbankan terjadi. Dalam negosiasi terkait dengan integrasi perbankan tersebut, Bank Indonesia terus menekankan kepada negara ASEAN lainnya agar asas resiprokal dapat terlaksana. Dengan demikian, berbagai hambatan regulasi tidak akan dihadapi lagi oleh bank asal Indonesia sehingga bank nasional akan mudah melakukan ekspansi. Hal ini sesuai dengan salah satu arah kebijakan Presiden terpilih Joko Widodo yaitu memberikan dukungan kepada bank-bank nasional untuk melakukan ekspansi ke luar negeri khususnya ASEAN. Namun ekspansi perbankan domestik ke negara ASEAN hanya bisa dilakukan jika asas resiprokal terwujud. Inilah yang harus diperjuangkan dalam negosiasi antara Bank Indonesia dengan bank sentral negara ASEAN.

Keempat, kepemilikan saham bank oleh investor asing. Di antara negara ASEAN, Indonesia merupakan salah satu negara yang relatif terbuka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999, pihak asing dapat memiliki saham di perbankan nasional hingga 99%. Aturan ini telah banyak dikritik karena berpotensi membuat industri perbankan domestik dikuasai oleh pihak asing. Peraturan lainnya yaitu Peraturan Bank Indonesia No.14/8/PBI/2012 menyatakan bahwa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat memiliki saham hingga 40%. Meskipun demikian, kepemilikan saham di atas 40% masih dimungkinkan apabila investor asing dapat memenuhi ketentuan dan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aturan tersebut dianggap belum dapat melindungi industri perbankan nasional.

Di sisi lain, negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia termasuk negara yang membatasi kepemilikan saham oleh pihak asing dalam jumlah yang besar. Di Malaysia, Bank Negara Malaysia hanya membatasi kepemilikan saham bank oleh investor asing hingga 30% (Djaafara, *et. al.* 2012, hal. 192). Selain itu, Singapura sebagai negara ASEAN yang memiliki sektor perbankan paling maju justru lebih ketat dengan menerapkan pembatasan kepemilikan asing hanya 10%. Kepemilikan asing lebih dari 10% harus mendapatkan persetujuan *Monetary Authority of Singapore* (MAS) (Djaafara, *et. al.*, 2012, hal. 192). Dari perbandingan aturan mengenai kepemilikan asing ini terlihat bahwa Indonesia termasuk negara ASEAN yang paling liberal terkait dengan sektor perbankan.

Upaya pemerintah untuk membatasi kepemilikan investor asing di industri perbankan Indonesia terus dilakukan. Saat ini Bank Indonesia dan DPR sedang dalam proses penyelesaian draft rancangan undang-undang Perbankan. Salah satu isi draft tersebut adalah membatasi kepemilikan saham oleh investor asing hingga 40%. Upaya untuk melindungi industri perbankan ini masih akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Pada visi dan misi Presiden terpilih Joko Widodo disebutkan bahwa penjualan saham bank nasional kepada investor asing akan dilakukan lebih ketat. Hal ini bertujuan untuk melindungi industri perbankan nasional dari dominasi pihak asing.

Selain itu, seiring dengan semakin tingginya persaingan antara bank lokal dengan bank dari negara ASEAN lainnya akibat adanya integrasi

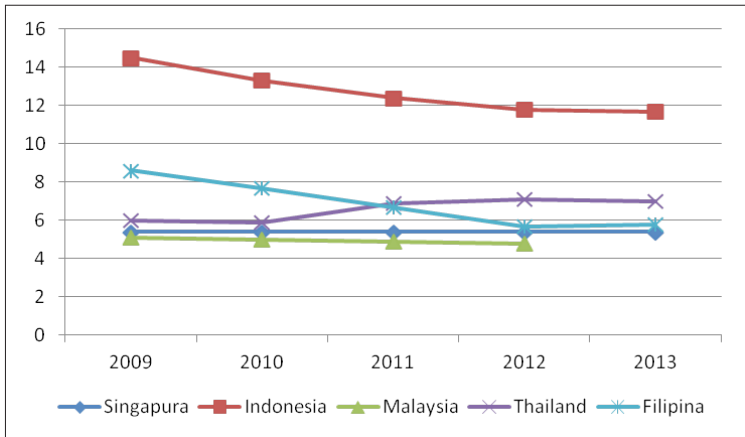
perbankan, struktur kepemilikan bank perlu diatur. Ditambah lagi mengacu pada data sebelumnya yang menunjukkan bahwa perbedaan ketentuan terhadap kepemilikan bank asing ini tentu merugikan Indonesia. Investor asing seperti dari Singapura dapat memiliki saham yang cukup besar di perbankan Indonesia namun tidak berlaku sebaliknya. Menurut Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliawan D. Hadad, pembatasan kepemilikan saham oleh asing tidak akan bertentangan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Suara Pembaruan, 2014).

Kelima, sektor perbankan di Indonesia masih tergolong kurang efisien terutama bila dibandingkan dengan sektor perbankan Singapura dan Malaysia. Salah satu indikator efisiensi perbankan adalah BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). BOPO bank umum di Indonesia mencapai 76,54% menurut data Bank Indonesia per Juli 2014. Rasio ini cukup jauh di atas rata-rata BOPO di ASEAN yaitu 40 – 60%.

Salah satu penyebab tingginya biaya operasional perbankan di Indonesia adalah kondisi geografis Indonesia. Wilayah Indonesia sangat luas dan terdiri dari banyak pulau sehingga dibutuhkan biaya yang besar untuk mengelola kantor cabang bank-bank yang tersebar di berbagai tempat. Di sisi lain, keberadaan bank-bank di daerah-daerah terpencil masih dibutuhkan agar masyarakat dapat mengakses perbankan. Namun demikian, perlu biaya yang besar bagi suatu bank untuk membuka kantor cabang di daerah-daerah terpencil. Kondisi ini memang hanya ditemukan di Indonesia karena negara ASEAN lainnya tidak memiliki wilayah sebesar Indonesia terutama Singapura. Dengan wilayah yang kecil, biaya operasional perbankan Singapura tentu tidak akan sebesar Indonesia. Akan tetapi, kondisi ini harus diatasi oleh pemerintahan baru dan perbankan harus lebih inovatif dalam memberikan pelayanan perbankan bagi masyarakat di daerah terpencil namun dengan biaya operasional yang tidak terlalu besar.

Tingginya biaya operasional tersebut membuat tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan oleh bank-bank di Indonesia menjadi semakin lebih tinggi bila dibandingkan dengan perbankan asal negara ASEAN-5 lainnya. Berdasarkan data Bank Dunia, tingkat suku bunga pinjaman di Indonesia mencapai 11,7% pada tahun 2013. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan Singapura (5,4%), Filipina (5,8%), dan Thailand (7%).

Grafik 1. Tingkat Suku Pinjaman Sektor Perbankan ASEAN-5 2009 – 2013 (dalam %)

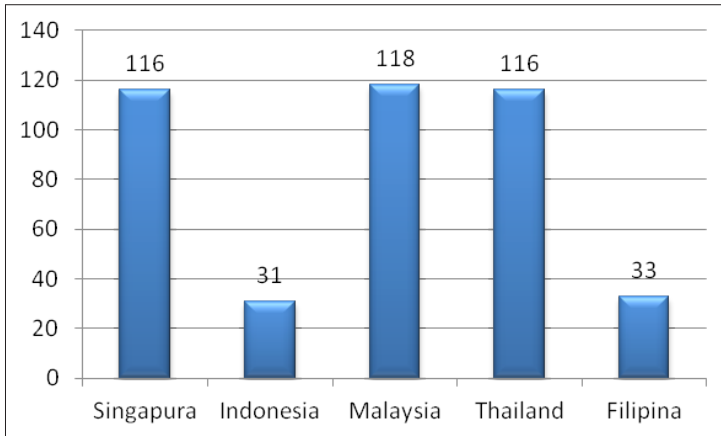


Sumber : *World Development Indicators*, Bank Dunia (2014)

Berbagai tantangan di atas perlu di atasi agar sektor perbankan Indonesia dapat berpartisipasi dan mengambil manfaat dari integrasi perbankan tersebut. Apabila tidak diatasi dan perbaikan daya saing tidak segera dilakukan maka dikhawatirkan pangsa pasar Indonesia akan direbut oleh perbankan asal negara ASEAN lainnya. Data *Global Financial Inclusion* dari Bank Dunia menunjukkan bahwa penduduk Indonesia dengan usia 15 tahun ke atas yang memiliki tabungan di lembaga keuangan formal hanya mencapai 20% pada tahun 2011. Angka tersebut jauh di bawah Singapura (98%), Thailand (73%), dan Malaysia (66%). Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menawarkan potensi pasar yang besar karena masih banyak masyarakat Indonesia yang dapat menjadi sasaran perbankan asal negara ASEAN lainnya.

Lebih khusus lagi, Indonesia juga memiliki masyarakat kalangan menengah ke atas yang terus meningkat. Pada tahun 2020, diprediksi jika lebih dari setengah populasi Indonesia yaitu 53% adalah masyarakat kalangan menengah ke atas (Forbes, 2014). Semakin banyaknya masyarakat kaya di Indonesia artinya akan semakin tinggi pula kebutuhan dan akses kepada sektor keuangan seperti perbankan. Apabila pemerintahan baru tidak mengantisipasi hal ini, maka perbankan asing justru akan memanfaatkan kondisi tersebut.

Grafik 2. Rasio Kredit terhadap PDB di ASEAN-5 Tahun 2012 (dalam %)



Sumber: *World Development Indicators*, Bank Dunia (2014)

Di samping itu, belum maksimalnya penyaluran kredit oleh sektor perbankan Indonesia ke sektor riil membuat pasar Indonesia sangat menarik bagi perbankan asing. Mengacu pada data Bank Dunia, rasio kredit perbankan terhadap PDB di Indonesia hanya 31%. Sementara itu, rasio penyaluran kredit di Singapura, Malaysia, dan Thailand sudah lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pasar di ketiga negara tersebut sudah jenuh sehingga bank-bank negara tersebut akan mencari pasar lain seperti Indonesia.

Ke depannya, pemerintahan Joko-Widodo dan Jusuf Kalla harus mendorong perbankan nasional untuk lebih gencar dalam menyalurkan kredit kepada sektor riil. Dengan demikian, peranan bank domestik dalam mendorong perekonomian Indonesia dapat meningkat dan sektor riil pun mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan bisnisnya.

REKOMENDASI

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintahan baru di bawah Joko Widodo untuk memperkuat sektor perbankan Indonesia dalam menghadapi integrasi perbankan. *Pertama*, melakukan konsolidasi. Bank-bank di Indonesia yang berjumlah 119 bank umum saat ini perlu dikonsolidasikan karena jumlah tersebut dinilai terlalu besar. Sebaiknya pemerintah membentuk setidaknya satu atau dua bank utama dengan modal yang besar untuk dapat bersaing di tingkat ASEAN. Pada dasarnya *merger* dapat dilakukan apabila pembuat kebijakan merasa jika terjadi *overbanked* dan terdapat bank yang tidak efisien (Abdullah dan Santoso, 2001, hal. 89). Selain itu, konsolidasi perbankan akan mengurangi jumlah bank di Indonesia sehingga dapat lebih memudahkan OJK dalam melakukan pengawasan.

Konsolidasi perbankan merupakan salah satu cara pemerintah Singapura untuk meningkatkan skala dan efisiensi sektor perbankan. Lee Hsien Loong pernah menyatakan, "If we want strong banks, then they have to be big banks, and if they are to be big banks, then we must have fewer banks" (Loong, 2001, hal. 1-2). Inilah yang dilakukan oleh pemerintah Singapura pada sektor perbankannya sejak tahun 1998. DBS melakukan akuisisi terhadap *Post Office Savings Bank* (POSB) dan pada bulan April 2001 DBS mengakuisisi *Dao Heng Bank* yang merupakan bank keempat terbesar dari Hong Kong. Pada bulan Juni 2001, *Keppel Capital Holdings* (KCH) diakuisisi oleh OCBC. Pada 29 Juni 2001, *Overseas Union Bank* (OUB), bank keempat terbesar di Singapura, diakuisisi oleh UOB (Hew, 2002, hal. 5-6). Dengan konsolidasi tersebut, saat ini Singapura memang memiliki sedikit bank lokal namun tiga diantaranya yaitu DBS, OCBC, dan UOB memiliki kualitas bank kelas dunia.

Hal yang sama juga turut dilakukan oleh bank-bank asal Malaysia. Pada pertengahan tahun 2014, CIMB Group Holdings mengakuisisi RHB Capital dan Malaysia Building Society setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Negara Malaysia. Konsolidasi perbankan tersebut menjadikan CIMB sebagai bank dengan aset terbesar di Malaysia. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sektor perbankan Malaysia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terutama integrasi perbankan.

Kedua, memperjuangkan kepentingan nasional perbankan domestik melalui negosiasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK. Salah satu hal yang harus diperjuangkan adalah terlaksananya asas resiprokal. Dengan demikian, bank-bank asal Indonesia dapat melakukan ekspansi ke negara-negara ASEAN lainnya ketika integrasi perbankan terjadi pada tahun 2020.

Ketiga, memperkuat *financial safety net*. Seiring dengan semakin meningkatnya persaingan antarbank ketika integrasi perbankan terwujud, risiko keuangan juga akan meningkat. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperkuat *financial safety net*. Penguatan koordinasi dengan otoritas moneter negara ASEAN lainnya juga diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari integrasi perbankan.

Keempat, mendorong perbankan nasional untuk menguasai pangsa pasar domestik dan juga melakukan ekspansi ke negara ASEAN lainnya terutama ke negara CLMV. Integrasi perbankan melalui *ASEAN Banking Integration Framework* harus dijadikan peluang bagi perbankan domestik untuk memperluas bisnis ke negara lain.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Burhanuddin, dan Santoso, Wimboh. (2001). "The Indonesian Banking Industry: Competition, Consolidation, and Systemic Stability" dalam "The Banking Industry in The Emerging Economies: Competition, Consolidation, and Systemic Stability", *BIS Paper No. 4*, August 2001, pp. 80-92.
- ASEAN. (2008). *ASEAN Economic Community Blueprint*. Jakarta : ASEAN.
- Asian Development Bank. (2013). *The Road to ASEAN Financial Integration: A Combined Study on Assessing The Financial Landscape and Formulating Milestones for Monetary and Financial Integration in ASEAN*. Mandaluyong City : Asian Development Bank.
- Demirguc-Kant, Asli dan Klapper, Leora. (2012). "Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database." *World Bank Policy Research Paper 6025*.
- Bank Dunia. (2014). *World Development Indicators*. Di akses pada tanggal 9 September 2014 dari <http://data.worldbank.org/indicator>.
- Bank Indonesia. (2014). *Statistik Perbankan Indonesia Edisi Juli 2014*. Jakarta : Bank Indonesia.
- BBC. (2011, 22 Desember). Malaysia to Liberalise Foreign Ownerships of Banks. Diakses tanggal 15 September 2014 dari <http://www.bbc.co.uk/news/business-16297225>.
- Chu, Kam Hon. (2011). "Deposit Insurance and Banking Stability." *Cato Journal*, Vol. 31, No. 1 (Winter 2011), pp. 99 – 117.
- Diamond, D. dan Dybvig, P. (1983). "Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity." *Journal of Political Economy* 91 : 401-19.
- Djaafara, Rizal A., et. al. (Eds). (2012). *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 : Proses Harmonisasi di Tengah Persaingan*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Forbes. (2013, 7 Mei). The Investment Case for Indonesia. Di akses tanggal 11 September 2014 dari <http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2013/03/07/the-investment-case-for-indonesia/>

- Ganie, Yassa Ardhie. (2012). Kiprah BI Menyongsong MEA 2015. *Gerai Info : Newsletter Bank Indonesia*, Edisi 28, Juli 2012, Tahun 3.
- Hew, Denis. (2002). Singapore As a Regional Financial Centre. Makalah dipresentasikan pada AT10 Research Conference, 7-8 Maret 2002. Di akses dari http://www.arengufond.ee/upload/Editor/teenused/finants%20lugemine/Anal%C3%BC%C3%BCs_Singapur_kui%20_aasia_finantskeskus_Denis_Hew2002.pdf.
- _____. (2007). *Brick by Brick : The Building of An ASEAN Economic Community*. Singapura : ISEAS.
- Hayashi, Hiromi. (2014). "Recent Changes in ASEAN Limits on Foreign Ownership of Banks." *Nomura Journal of Capital Markets Summer*, 2014, Vol. 6, No. 1.
- Kalemli-Ozcan, S. dan Manganelli, S. (2008). "Financial Integration and Risk Sharing: The Role of the Monetary Union" dalam *5th European Central Banking Conference on The Euro at Ten: Lessons and Challenges*. Frankfurt: ECB.
- Kok, Wong Liang; Bhutia, Tshering; dan Chin, Tan Peng. (2010). Shaping an Attractive Financial Services Industry. <http://www.iflr1000.com/pdfs/Directories/13/Slovak-Rep.pdf>. pp. 744-755.
- Kompas. (2014, 15 Juli). Bank Nasional Bakal Bebas Ekspansi ke ASEAN. Di akses tanggal 10 September 2014 dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/07/15/112100826/Bank.Nasional.Bakal.Bebas.Ekspansi.ke.ASEAN>.
- _____. (2014, 12 Agustus). Ini 10 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia. Diakses tanggal 9 September 2014 dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/12/095520626/Ini.10.Bank.dengan.Aset.Terbesar.di.Indonesia>.
- Loong, Lee Hsien. (2001). Consolidation and Liberalisation : Building World-Class Banks. Pidato dalam Association of Banks Annual Dinner pada 29 Juni 2001, Singapura. Di akses dari <http://www.bis.org/review/r010702b.pdf>.

- Siswanto, Joko dan Wihardja, Maria Monica. (2012, 31 Mei). ASEAN Banking Integration : Positioning Indonesia. Di akses tanggal 15 September 2014 dari <http://www.eastasiaforum.org/2012/05/31/asean-banking-integration-positioning-indonesia/>.
- Stavarek, Daniel; Repkova, Iveta; dan Gajdosova, Katarina. (2011). "Theory of Financial Integration and Achievements in the European Union." *Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper No. 34393*.
- Suara Pembaruan. (2014, 14 Mei). OJK : Kepemilikan Asing di Bank Bisa Dibatasi.
- Tempo. (2010, 21 April). Bank Indonesia Bersiap Integrasi Sektor Keuangan ASEAN. Di akses tanggal 10 September 2014 dari <http://www.tempo.co/read/news/2010/04/21/087242227/Bank-Indonesia-Bersiap-Integrasi-Sektor-Kuangan-ASEAN>.
- _____. (2014, 5 Mei). Indonesian Banks Assets Value Lowest in ASEAN. Di akses tanggal 10 September 2014 dari <http://en.tempo.co/read/news/2014/05/05/056575479/Indonesian-Banks-Assets-Value-Lowest-in-ASEAN>
- The Jakarta Post. (2012, 4 Desember). ASEAN Banks Not Ready for ASEAN Turf, Says BI. Di akses pada 17 September 2014 dari <http://www.thejakartapost.com/news/2012/12/04/ri-banks-not-ready-asean-turf-says-bi.html>.
- Wihardja, Maria Monica. (2013). Financial Integration Challenges in ASEAN Beyond 2015. *ERIA Discussion Paper Series*, ERIA-DP-2013-27.
- _____. (2014). Financial Integration Challenges in ASEAN Beyond 2015. *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia Policy Brief*, No. 2014-08. August 2014.
- World Economic Forum. (2012a). *The Financial Development Report 2012*. Jenewa : World Economic Forum.
- _____. (2012b). *The Global Competitiveness Report 2014-2015*. Jenewa : World Economic Forum.

PROYEKSI PELAKSANAAN POLUGRI RI ERA JOKOWI

Steven Yohanes

Peneliti ASEAN Studies Program, The Habibie Center

Email: steven@habibiecenter.or.id

PENDAHULUAN

Pemilu Presiden yang telah dilaksanakan 9 Juli lalu telah menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI pada periode 2014-2019. Bentuk pemerintahan baru yang disusun oleh Presiden secara otomatis akan mempengaruhi pelaksanaan Politik Luar Negeri –polugri– baik dalam membentuk sebuah kerangka logika kebijakan yang baru atau tetap mempertahankan *status quo* pelaksanaan Polugri seperti yang dilakukan dalam era Presiden SBY.

Pentingnya orientasi dan pemberian prioritas dalam pelaksanaan Polugri telah menjadi perdebatan publik. Sebab, hal ini menunjukkan bahwa Polugri adalah isu penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam rangka untuk terus menjaga eksistensi kedaulatan negara sekaligus menjamin tercapainya kepentingan nasional secara konkret.

Dalam konteks Polugri, Jokowi telah menawarkan konsepsi dan prioritas kebijakan yang akan ditempuh selama masa pemerintahannya.

Dalam Visi-Misi dan Program Aksi yang dirumuskan bagi pemerintahannya, Jokowi mengelaborasi bahwa terdapat empat prioritas dalam pelaksanaan Polugri nantinya. Empat prioritas tersebut antara lain adalah *Pertama*, menekankan identitas Indonesia sebagai Negara Arcipelago dalam Polugri; *Kedua*, menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional melalui diplomasi sebagai negara *middle power*; *Ketiga*, memperluas keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik; *Keempat*, merumuskan dan melaksanakan Polugri yang melibatkan peran, aspirasi dan kepentingan masyarakat (Jokowi-JK, 2014).

Berdasarkan hal ini, Polugri Bebas-Aktif terlihat akan tetap menjadi pilihan rasional Indonesia untuk melaksanakan proses hubungan luar negeri sejak berdirinya republik ini. Berdasarkan UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Polugri didefinisikan sebagai dasar akan kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Indonesia dalam melakukan hubungan dengan Negara lain, organisasi internasional, subyek hukum internasional dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Oleh karena itu, secara sederhana dapat diartikan bahwa pemerintah Indonesia menginginkan pelaksanaan Politik Luar Negeri pada dasarnya merupakan kalkulasi kepentingan nasional dan pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh negara, meskipun situasi kontemporer mengisyaratkan bahwa keterlibatan aktor hubungan internasional selain negara seperti organisasi masyarakat sipil, perusahaan multinasional maupun tokoh individu.

Review ini akan membahas mengenai proyeksi pelaksanaan Polugri yang diimplementasikan dalam era pemerintahan Jokowi, dengan menekankan analisa berdasarkan debat capres ketiga mengenai Polugri dan ketahanan nasional, serta merujuk pada visi-misi program aksi Jokowi-JK 2014-2019. Namun penulis menambahkan gambaran mengenai pelaksanaan Polugri pada era SBY dengan tujuan memberikan batas dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan Polugri yang telah berlangsung, sehingga pelaksanaan Polugri era Jokowi dapat memperkuat bahkan mengkonsolidasikan keberhasilan pelaksanaan Polugri sebelumnya. Di bagian akhir tulisan ini, penulis menyertakan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan Polugri Indonesia era Jokowi.

PENCAPAIAN PELAKSANAAN POLUGRI ERA SBY

Perlu ada pembahasan mengenai pencapaian dalam pelaksanaan Polugri era presiden SBY. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan kebijakan serta peranan Indonesia melalui Polugri, sehingga apa yang dianggap strategis dan sejalan dengan pencapaian kepentingan nasional, dapat dilanjutkan bahkan dikonsolidasikan kembali oleh Jokowi. Selain itu, relevansi pelaksanaan Polugri era SBY dapat memperkuat pelaksanaan Polugri era Jokowi.

Keterkaitan antara pelaksanaan Polugri dan perkembangan situasi internasional juga telah membentuk kebijakan luar negeri Indonesia. Pada masa pemerintahan SBY, Polugri Bebas-Aktif diinterpretasikan dalam *adagium* yang disebut sebagai “*Navigating a Turbulent Ocean* (Berlayar ditengah Samudera yang Bergejolak)” dan “*Thousand Friends – Zero Enemy* (Seribu Kawan, Tanpa Musuh)”.

Pada pelaksanaan Polugri periode pertama 2004-2009 era SBY, setidaknya terdapat beberapa kebijakan utama yang secara umum orientasinya adalah untuk pemantapan pelaksanaan Polugri pasca reformasi. Kebijakan utama yang menjadi cerminan pelaksanaan Polugri pada pemerintahan era SBY pertama antara lain adalah (1) menekankan pada pelaksanaan dan tindak lanjut agenda pembentukan *ASEAN Community*, (2) peningkatan peran diplomasi perbatasan, (3) upaya penyelesaian beragam isu HAM, (4) pelaksanaan *Inter-Faith Dialogue*, (5) partisipasi aktif dalam perdamaian dunia, (6) upaya perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), (7) peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral dalam kerangka kebijakan kemitraan strategis dalam upaya pencapaian kepentingan nasional (Djafar, 2013).

Berdasarkan pemberian prioritas Polugri yang demikian, maka dapat terlihat kebijakan-kebijakan yang menggambarkan prioritas-prioritas tersebut, seperti penegasan pelaksanaan Bali Concord II yang dengan signifikan berkontribusi terhadap proses integrasi kawasan dimana sebelumnya disepakati pada KTT ASEAN pada 2003 di Indonesia. Selain itu, terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB pada periode 2007-2008, serta teladan yang diberikan Indonesia sebagai *role model* anggota dewan HAM PBB pada tahun 2007-2010 yang menjalani pengkajian *Universal Periodical Review* (UPR) yang pertama. Dalam bidang ekonomi, Indonesia juga terpilih

dalam keanggotaan G-20 sebagai satu-satunya Negara yang berasal dari Negara-Negara ASEAN pada tahun 2009.

Secara nasional, periode pertama pemerintahan SBY ditekankan pada upaya pelaksanaan Polugri yang berkontribusi terhadap penjaminan stabilitas nasional, yang kemudian terealisasi dalam kebijakan seperti *Peace Process Aceh* tahun 2005 (*Helsinki Agreement*). Dengan kata lain, seluruh prioritas pelaksanaan Polugri ini telah diimplementasikan pada beberapa kebijakan terkait, dimana ukuran keberhasilan maupun efektifitas pelaksanaan Polugri juga dapat dinilai.

Sementara itu, pada pelaksanaan Polugri di periode pemerintahan SBY kedua pada 2009-2014, prioritas pelaksanaan Polugri SBY mengalami perubahan meskipun tidak signifikan. Orientasi dan pemberian prioritas pelaksanaan Polugri lebih ditujukan untuk membentuk posisi internasional Indonesia atau dapat dikatakan lebih bersifat *Outward-Looking*. Adagium-adagium seperti “*Navigating a Turbulent Ocean* (Berlayar ditengah Samudera yang Bergejolak)” dan “*Thousand Friends – Zero Enemy* (Seribu Kawan, Tanpa Musuh)” diremajakan kembali, serta diterjemahkan oleh Kementerian Luar Negeri –yang menjadi pelaku utama hubungan luar negeri –dalam sebuah Rencana Strategis Kemlu 2010-2014 yang lebih detail menerjemahkan Polugri Bebas-Aktif terhadap pencapaian beberapa delapan prioritas utama.

Delapan prioritas tersebut antara lain adalah (1) meningkat peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN, (2) meningkatkan peranan Indonesia ditingkat global untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, (3) memperkuat implementasi diplomasi perbatasan, (4) meningkatkan pelayanan dan perlindungan warga Negara Indonesia di luar negeri, (5) meningkatkan peranan Indonesia untuk mempromosikan demokrasi dan HAM, (6) menjalin kerjasama strategis dengan seluruh kawasan, (7) meningkatkan implementasi diplomasi ekonomi, dan (8) meningkatkan Kerjasama Selatan-Selatan (Kemlu, 2009).

Prioritas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Polugri pada era SBY yang kedua ini, ditegaskan dalam kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menempatkan posisi Indonesia secara strategis di dunia internasional, baik secara regional dan global. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa pertemuan internasional yang menempatkan kepemimpinan Indonesia sebagai isu sentralnya, seperti dalam keketuaan ASEAN pada

tahun 2011, terus memperkuat inisiasi *Bali Democracy Forum* yang sudah berlangsung sejak 2008, bertindak sebagai *Co-chair* dalam High-Level Panel (HLP) of *Eminent Person for Post-Development Agenda-2015*, keketuaan APEC (*Asia-Pasific Economic Cooperation*) tahun 2013, *Lead Chair* dalam *Open Government Partnership* (OGP) tahun 2014, serta baru-baru ini adalah melalui keketuaan UNAOC (*United Nations Alliance of Civilization*) 2014.

Pelaksanaan Polugri pada periode pertama (2004-2009) dan periode kedua (2009-2014) pemerintahan era SBY memberikan arti yang cukup signifikan bagi pelaksanaan Polugri Indonesia. Pada satu sisi, periode pertama pemerintahan SBY menekankan pada pelaksanaan Polugri yang lebih berorientasi pada pembentukan stabilitas keamanan di tingkat domestik dan pembangunan rasa percaya komunitas internasional pada Indonesia, sedangkan pada sisi yang lainnya pelaksanaan Polugri pada periode kedua era SBY menekankan pelaksanaan Polugri yang lebih cenderung bersifat *Outward-Looking*, dengan tujuan memposisikan Indonesia pada lingkungan strategis bilateral, regional dan global. Lebih lagi, indikator pelaksanaan Polugri era SBY dalam kedua periode bersifat gradual, sehingga keberhasilan pelaksanaan Polugri dapat diukur berdasar pada signifikansi peningkatan hubungan luar negeri bilateral, regional, dan global.

Pemerintahan baru di bawah Jokowi-Jusuf Kalla perlu memperhatikan pelaksanaan Polugri Indonesia pada masa pemerintahan era SBY. Hal ini disebabkan bahwa, Indonesia bisa dikatakan telah berhasil memposisikan dirinya pada konteks hubungan luar negeri di tingkat bilateral, regional, dan global secara strategis, sekaligus berhasil memperkuat stabilitas ditingkat domestik melalui kontribusi pelaksanaan Polugri. Oleh karena itu, fondasi Polugri dan posisi internasional Indonesia yang telah dikonstruksikan oleh pemerintahan sebelumnya, dapat menjadi dasar untuk dikembangkan oleh pemerintahan selanjutnya di era Jokowi. Dengan kata lain, meskipun terjadi perubahan orientasi dan prioritas dalam pelaksanaan Polugri, pencapaian-pencapaian pelaksanaan Polugri pada masa SBY yang dapat dinilai berhasil dapat memberi kontribusi untuk memperkuat prioritas pelaksanaan Polugri selanjutnya.

ANALISA POLUGRI JOKOWI

Sebagaimana telah dikutip sebelumnya, bahwa terdapat empat prioritas yang menjadi fokus perhatian Jokowi dalam pelaksanaan Polugri. Meskipun sudah secara jelas disampaikan secara tertulis melalui visi-misi maupun secara lisan melalui debat ketiga capres, namun pembedahan prioritas pelaksanaan Polugri harus secara konkret terkonstruksi. Bagian ini akan memberikan elaborasi melalui analisa terhadap pelaksanaan Polugri era Jokowi.

1. *Negara Arcipelago Sebagai Identitas Utama Polugri*

Untuk mendukung prioritas pertama pelaksanaan Polugri-nya, Jokowi merumuskan beberapa rencana aksi konkret, seperti untuk memperkuat diplomasi maritim dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan Indonesia (termasuk juga perbatasan darat), menjamin wilayah kedaulatan NKRI, menjamin kedaulatan maritim beserta pulau-pulau terluar, mengamankan Sumber Daya Alam beserta dengan Zona Eksekutif Eksklusif (ZEE), mengintensifkan diplomasi pertahanan, juga memberi perhatian pada upaya penjaminan stabilitas dalam kerangka meredam rivalitas maritim diantara negara-negara besar (*Great Powers*) sekaligus mengupayakan penyelesaian sengketa teritorial.

Jokowi menekankan seakan-akan terdapat urgensi pentingnya meremajakan kembali (*Rejuvenating*) identitas nasional sebagai negara kepulauan, khususnya bahwa gagasan ini secara implisit menegaskan kembali masa kejayaan Indonesia yang berasal dari wilayah kemaritiman. Dalam salah satu kesempatan, Jokowi menagaskan bahwa, "*Dengan demikian (mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan), Indonesia menjadi berwibawa dan dihormati negara-negara lainnya*" (Kompas, 2014). Oleh sebab itu, hal ini dapat dikatakan sebuah doktrin pelaksanaan Polugri yang menjadi fokus Jokowi –Doktrin Jokowi¹.

1 Penulis menggunakan konsepsi "Doktrin Jokowi" untuk menyebut gagasan "Poros Maritim Dunia". Subjektifitas Penulis menyebutkan Doktrin Jokowi dengan mempertimbangkan bahwa Doktrin secara definitif merupakan serangkaian prioritas yang ditetapkan oleh suatu Negara, beserta dengan cara untuk mencapai prioritas-prioritas tersebut (Lihat: Barry R. Posen, "*The Sources of Military Doctrine*", Cornell University Press, Ithaca, 1984). Dalam konteks "Poros Maritim Dunia" yang disampaikan Jokowi, "Poros Maritim Dunia" menjadi prioritas pelaksanaan Polugri, serta memberikan elaborasi mengenai aksi konkret dalam mendukung

Doktrin Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai “*Poros Maritim Dunia*” merupakan suatu upaya interpretasi pelaksanaan Polugri Bebas-Aktif yang memberi perhatian khusus terhadap perubahan struktur kawasan yang dinamis dimana realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi Indonesia akan bergantung dan pada saat bersamaan memberikan dampak terhadap dinamika yang terjadi di kawasan, khususnya di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia (Sukma, 2014).

Doktrin Jokowi memiliki setidaknya dua sumbu utama, dimana porosnya adalah pelaksanaan Polugri, yaitu doktrin ini memperkuat pencapaian kepentingan nasional yang bersifat *inward-looking* dan juga bersifat *outward-looking*. Dimensi kepentingan *inward-looking* salah satunya adalah dalam upaya untuk menjamin batas-batas wilayah kedaulatan NKRI berserta dengan pulau-pulau terluarnya. Menurut Kemlu, Indonesia sampai saat ini masih memiliki 10 masalah perbatasan dengan Negara lain, yaitu dengan Malaysia, Singapura, Thailand, India, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, Australia, dan Timor Leste (Kemlu, Permasalahan Di Perbatasan RI, 2013). Ditambah lagi, terdapat 92 pulau terluar Indonesia, dimana 12 pulau diantaranya sangat berpotensi terhadap terjadinya konflik (Tempo, 2011). Dengan demikian hal ini dapat sejalan dengan pelaksanaan Doktrin Jokowi nantinya. Sebaliknya, Doktrin Jokowi juga relevan untuk diimplementasikan dalam aksi konkret tersebut.

Selain berorientasi kepada kepentingan nasional secara *inward-looking*, Doktrin Jokowi juga diarahkan terhadap pencapaian kepentingan nasional yang bersifat *outward-looking*. Hal ini relevan dengan perubahan struktur geopolitik dan geoekonomi kawasan Asia Tenggara bahkan Asia-Pasifik. Jokowi menyatakan relevansi mengenai hal tersebut sebagai berikut,

“Kami menilai pergeseran geopolitik dan geoekonomi dari Barat ke Asia, harus kita hadapi karena ini kesempatan kita menjadi Negara besar. Ke depan, kita harus menangkan pertarungan di samudera, di maritim” (Kompas, 2014) .

Jelas bahwa Asia Tenggara sebagai kawasan dinamis dan lingkaran konsentris Polugri Indonesia menjadi sangat penting bagi Indonesia, dimana menurut Jokowi fokus pelaksanaan Polugri harus diarahkan

pelaksanaan Polugri tersebut. Maka, pemberian konsepsi Doktrin Jokowi untuk menyebut gagasan “Poros Maritim Dunia adalah relevan dan tepat”.

pada hal-hal yang dapat berkaitan dengan isu tersebut. Faktor Geopolitik dan Geoekonomi serta kehadiran Negara-Negara besar seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tidak terelakan dalam membentuk distribusi hubungan kekuatan di kawasan, dimana hal ini juga dapat menimbulkan potensi konflik sekaligus kerjasama di kawasan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, rasionalitas pelaksanaan Polugri dalam Doktrin Jokowi mengenai “Poros Maritim Dunia” menjadi sangat relevan dan signifikan untuk merespon struktur politik internasional yang terbentuk di kawasan.

Faktor Geopolitik dan Geoekonomi dikatakan relevan dan signifikan secara konkret pada konflik di Laut Cina Selatan, dimana beberapa Negara ASEAN (Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam) dengan RRT terlibat dalam klaim sengketa teritorial. Bukan sebuah keniscayaan, bahwa stabilitas kawasan menjadi terdistraksi, sehingga berkonsekuensi terhadap terhambatnya pembangunan ekonomi di kawasan. Dalam konteks ini, peranan Indonesia sangat kritikal khususnya untuk menjadi mediator antar pihak-pihak yang berkonflik di Laut Cina Selatan.

2. Negara Middle-Power Dalam Forum Internasional Secara Aktif

Jokowi juga dalam penyampaian Visi-Misi pelaksanaan Polugri-nya menekankan akan Indonesia sebaga *Middle-Power State*. Secara sederhana, pemahaman definitif mengenai *middle-power* dapat diartikan sebagai berikut,

“...are those which by reason of their size, their material resource, their willingness and ability to accept responsibility, their influence and stability are close to being great power (Szondi, 2008, p. 4)”

Pemahaman definitif ini juga terbentuk dengan didasari oleh adanya dukungan faktor material seperti kekuatan militer, populasi, tingkat kesejahteraan, serta faktor non-material seperti pengaruh dan prestasi suatu negara. Oleh karena itu, kalkulasi Polugri yang menempatkan Indonesia sebagai negara *middle-power* merupakan proses rasionalisasi faktor-faktor material dan non-material yang dimiliki oleh Indonesia.

Meskipun Indonesia merupakan negara besar, namun realitas kekuatan politik Indonesia dalam konteks dinamika politik internasional memang tergolong sebagai Negara dengan kekuatan sedang. Berdasarkan definisi konseptual *middle-power states* diatas, dari segi kekuatan militer Indonesia hanya mengalokasikan anggaran militer kurang dari 1% dari GDP. Hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan *middle-power states* lain seperti India (2.6% GDP) dan Australia (2% GDP). Bahkan di lingkungan Asia Tenggara, anggaran belanja militer Indonesia berada dibawah Singapura (7.6% GDP) dan Malaysia (2.2% GDP) (Kemhan, 2008). Sedangkan pada indikator ekonomi, GDP Indonesia menempati posisi 16 dunia dengan rata-rata angka pertumbuhan ekonomi mencapai 5%, dengan kelas menengah mencapai 45 Juta dari populasi (McKinsey, 2012). Bahkan dalam konteks pembangunan, Indonesia dapat dikatakan berada dibelakang Negara-Negara ASEAN seperti Brunei, Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Dari perspektif non-material, pengaruh Indonesia sebagai *middle-power states* yang dihormati juga menjadi bagian erat yang tidak dipisahkan untuk membentuk identitas Indonesia. Identitas Indonesia yang terbentuk saat ini menggambarkan Indonesia sebagai negara demokrasi dimana perkembangan pluralisme dan modernisasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang positif. Merujuk pada konsepsi Morgenthau (Morgenthau, 1991) yang menekankan kuantitas sejarah sebuah negara, keadaan serta posisi geografis, dan demografis sebagai ukuran kekuatan nasional sebuah negara, maka dapat dikatakan tepat bahwa dalam perspektif non-material Indonesia merupakan Negara yang memiliki kredibilitas dan pengaruh dalam ruang lingkup internasional yang positif. Indonesia dapat digolongkan sebagai sebuah negara netral dalam politik internasional dimana tidak memiliki pakta aliansi dengan negara manapun, serta memiliki kecenderungan pasifisme internasional sehingga hal ini berdampak pada kepercayaan internasional pada Indonesia.

Modal material dan non-material sebagai negara *middle-power* inilah yang menempatkan bagaimana sikap, peran, dan kebijakan Polugri dilakukan pada era Jokowi. Terkait dengan *middle-power*, Jokowi juga terlihat ingin menempatkan Indonesia pada sebuah posisi di politik internasional sebagai kekuatan regional yang lebih selektif untuk bergabung dalam forum-forum internasional yang berdampak

langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia. Dengan kata lain adalah melalui diplomasi selektif (*selective engagement*), khususnya yang berkaitan dengan urusan-urusan yang tidak merupakan ranah *High Politics*, namun juga berurusan pada ranah *Low Politics*, khususnya urusan ekonomi.

Dalam kerangka perspektif liberalisme, penempatan posisi Indonesia sebagai *middle-power states* setidaknya didasari oleh tiga asumsi utama dalam konteks politik internasional, yaitu *Pertama*, menyadari bahwa dalam sistem internasional terdapat prinsip saling keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan; *Kedua*, sebagai negara *middle-power* hal ini berarti bahwa Indonesia ingin menjadikan kerjasama multilateral sebagai wadah yang paling logis dalam menyelesaikan beragam persoalan; *Ketiga*, Indonesia secara langsung menyadari bahwa terdapat peluang bagi kepemimpinan Indonesia dalam tatanan politik internasional, setidaknya di kawasan Asia Tenggara (Wood, 1987).

3. Memperluas Regionalisme Indo-Pasifik

Prioritas pelaksanaan Polugri era Jokowi nantinya juga memberikan cara pandang baru akan lingkungan strategis Indonesia yang tidak hanya terbatas di wilayah Asia Tenggara. Namun cara pandang ini diperluas pada kawasan Asia-Timur bahkan wilayah Pasifik, yaitu hingga Jepang disebelah Utara, Australia disebelah Tenggara, dan India di bagian Barat Daya, dimana secara khusus juga pada wilayah maritim di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang saling menghubungkannya. Hal ini menurut Jokowi disebut sebagai kawasan yang harus diintegrasikan.

Perluasan lingkungan strategis Indonesia pada regionalisme Indo-Pasifik pada dasarnya memiliki keterkaitan terhadap kepentingan domestik Indonesia untuk memberdayakan sektor maritim dan Doktrin Jokowi tentang "Poros Maritim Dunia". Secara khusus, regionalisme Indo-Pasifik menempatkan Indonesia sebagai poros (*core*) secara geografis di kawasan. Hal ini menjadikan pentingnya regionalisme yang stabil, harmonis, dan damai menjadi penting bagi Indonesia.

Rasionalitas perluasan regionalisme Indo-Pasifik pada dasarnya bukanlah tanpa alasan. Setidaknya keterkaitan Geopolitik dan Geoekonomi daratan-lautan di kawasan Indo-Pasifik menjadi krusial

dalam menentukan sikap politik Indonesia di masa yang akan datang. Bahkan, dibandingkan penggunaan konsep perluasan kawasan sebagai “Asia-Pasifik”, Jokowi lebih memilih menggunakan konsepsi “Indo-Pasifik”. Meskipun tidak dielaborasi lebih dalam oleh Visi-Misi Jokowi, setidaknya konseptualisasi regionalisme Indo-Pasifik memiliki dimensi geografis, strategis, historis, serta ekonomis yang menjadi relevan. Regionalisme Indo-Pasifik merupakan area jalur perdagangan maritim terbesar ketiga di dunia dengan kepadatan jalur perdagangan sebesar 2/3 dari total perdagangan dunia (ICRIER, 2013). Regionalisme Indo-Pasifik merupakan rumah bagi tiga milyar penduduk dunia, dimana demokrasi terbesar juga berada didalamnya. Ditambah lagi, regionalisme Indo-Pasifik juga merupakan kawasan yang melibatkan 2/3 perdagangan global, dimana lima Negara di Indo-Pasifik merupakan bagian dari 20 Negara dengan ekonomi terbesar dunia (Natalegawa, 2013). Berdasarkan hal ini, maka regionalisme Indo-Pasifik memang logis menggambarkan mengenai kepentingan nasional Indonesia yang terbentuk.

Untuk memperluas regionalisme Indo-Pasifik menjadi konkret, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan menurut Jokowi nantinya. Hal tersebut antara lain adalah melalui konsolidasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN untuk menjamin sentralitas ASEAN, memperkuat arsitektur kawasan regional yang mampu untuk mencegah hegemoni Negara besar, memperkuat sekaligus mengembangkan kerjasama bilateral strategis, dan juga untuk mendorong kerjasama maritim yang strategis (Jokowi-JK, 2014).

Berdasarkan hal ini, maka dapat terlihat bahwa sentralitas ASEAN merupakan hal penting yang menjadi prasyarat dalam pelaksanaan perluasan regionalisme Indo-Pasifik. Alasan ini tidak lain adalah karena belum terdapatnya institusi kerjasama kawasan baik di kawasan Asia Timur, Asia Selatan, maupun Pasifik yang kokoh untuk membentuk regionalisme Indo-Pasifik. Oleh karena itu, ASEAN sebagai satu-satunya institusi kawasan yang dikatakan stabil serta berorientasi pada pembentukan perdamaian dan pembangunan ekonomi menjadi satu-satunya motor penggerak dalam pembentukan regionalisme Indo-Pasifik. Namun, penguatan ASEAN sebagai institusi kerjasama kawasan harus diperkuat. Melihat perkembangan ASEAN, Indonesia perlu

meningkatkan peran kepemimpinan dalam membawa ASEAN sebagai poros utama pembentuk regionalisme Indo-Pasifik.

Penguatan ASEAN menjadi penting, sebab kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan dengan struktur politik internasional yang dinamis, sehingga kehadiran negara-negara besar akan mempengaruhi bentuk distribusi kawasan yang juga signifikan. Dalam konteks ini maka diperlukan paradigma baru untuk mengatur hubungan antar negara di regionalisme Indo-Pasifik. Menlu Marty Natalegawa dalam sebuah kesempatan menegaskan bahwa terdapat tiga tantangan kawasan Indo-Pasifik dalam pembentukan arsitektur keamanan kawasan. Beliau menyebutkan bahwa terdapat defisit kepercayaan, sengketa teritorial yang tidak kunjung selesai, dan dampak perubahan akibat distribusi kekuatan kawasan (Natalegawa, 2013). Oleh karena itu perlu diciptakan sebuah kawasan yang disebut sebagai *Dynamic Equilibrium* (Keseimbangan Dinamis).

Keseimbangan Dinamis adalah sebuah kondisi yang ditandai oleh tidak adanya kekuatan yang mendominasi di kawasan, melainkan pendekatan melalui kerjasama yang saling menguntungkan dan konstruktif, dengan paradigma *Win-Win Solution* dan bukan *Zero Sum Game* (Kemlu, Buku Diplomasi 2010, 2011). Keseimbangan Dinamis juga akan menjadi penanda pelaksanaan Polugri yang senantiasa tetap mendorong pencapaian stabilitas bersama (*Common Stability*), keamanan bersama (*Common Security*), dan kesejahteraan bersama (*Common Prosperity*) (Kemlu, Pernyataan Pers Tahunan Menlu Tahun 2012, 2012). Konseptualisasi Keseimbangan Dinamis inilah yang menjadi tawaran paradigma pembentuk arsitektur kawasan yang baru (Natalegawa, 2013).

Dalam kaitan proyeksi pelaksanaan Polugri Jokowi nantinya, maka regionalisme Indo-Pasifik merupakan perluasan lingkungan strategis Indonesia yang hanya dapat tercapai apabila penguatan Doktrin Jokowi secara domestik terlaksana dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN untuk menjaga sentralitasnya tercapai.

4. Merumuskan dan melaksanakan Polugri yang melibatkan peran, aspirasi, dan kepentingan masyarakat Indonesia.

Secara sederhana, prioritas ini merupakan upaya pelaksanaan Polugri dalam konteks untuk memperluas Diplomasi Publik (memanfaatkan artikulasi dukungan domestik baik birokrasi, masyarakat, kelompok untuk memperkuat kebijakan luar negeri). Konsepsi prioritas ini dapat merujuk pada pelaksanaan instrumen diplomasi publik, yang hasil akhirnya digunakan untuk memperkuat pelaksanaan Polugri. Diplomasi Publik secara sederhana adalah sebuah cara yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan terhadap audiens luar negeri mengenai pembentukan citra bangsa (*Nation Branding*), meskipun juga memiliki dimensi pada kepentingan audiens domestik dengan tujuan penyerapan aspirasi serta akomodasi kepentingan publik domestik (Szondi, 2008).

Secara sederhana, dapat dipahami juga bahwa pelaksanaan diplomasi publik seperti ini akan memberikan setidaknya dua manfaat utama. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan penguatan legitimasi publik domestik untuk memperkuat pelaksanaan Polugri dan, yang kedua adalah untuk menjadikan citra bangsa sebagai alat mempromosikan kepentingan nasional pada publik internasional.

Ada beberapa isu Polugri Indonesia yang memiliki tendensi perhatian publik sehingga Jokowi merasa bahwa perlu ada artikulasi dukungan publik terhadap kebijakan strategis yang diambil olehnya. Isu tersebut misalnya adalah mengenai isu perlindungan Warga Negara Indonesia dalam hal ini TKI, isu kemerdekaan Palestina, isu perlindungan pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia dan lainnya. Meskipun demikian, penyertaan aspirasi dan dukungan masyarakat domestik dalam Polugri sarat isu politis karena kepentingan dalam pemilu. Dalam konteks ini, isu pelaksanaan Polugri dapat dijadikan salah satu upaya Jokowi untuk memperoleh suara. Alasannya, karena hal ini dapat memberikan keuntungan pada Jokowi, baik untuk membangun citra seorang capres sebagai pemimpin populer dalam konteks Polugri, mengabaikan isu utama dari lawan, dan memohon dukungan terhadap kelompok tertentu (Clapp, 2006, pp. 66-67).

Misalnya, dalam isu Palestina, Jokowi dalam debat Capres pada 22 Juni lalu menegaskan bahwa, "*mendukung penuh Palestina untuk menjadi*

*negara yang merdeka, berdaulat, serta menjadi anggota PBB*². Tampaknya artikulasi dukungan dari publik domestik sebagai negara dengan mayoritas penduduk islam moderat dalam hal ini coba dimanfaatkan oleh Jokowi tidak hanya dalam kepentingan pelaksanaan Polugri, namun juga sebagai kepentingan pemilu. Selain menunjukkan tentang masyarakat Indonesia yang muslim moderat, dukungan Palestina juga dapat menempatkan Indonesia untuk berperan lebih konstruktif dalam perdamaian Palestina. Lebih spesifik relevansinya dengan pemilu, upaya mengangkat isu Palestina memiliki tendensi politis untuk memohon dukungan pada organisasi massa berbasis agama Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dimana keduanya memiliki basis massa yang besar.

Dalam konteks rumusan untuk menyerap aspirasi dan dukungan masyarakat terhadap isu Polugri, dapat dikatakan belum bisa terlihat apakah dalam pelaksanaannya akan berlangsung dengan efektif. Hal ini juga disebabkan karena tantangan Indonesia untuk berperan lebih dalam kontestasi politik di Timur Tengah harus bertemu dengan hambatan yang bersifat kultural, maupun juga terhambat pada kepentingan aktor-aktor internasional yang memiliki kepentingan di isu Timur tengah.

Meskipun demikian, isu yang menjadi ranah bagian dari diplomasi publik Jokowi nantinya juga memperlihatkan bahwa Jokowi ingin memperkuat instrumen diplomasi yang tidak hanya akan didominasi oleh antar pemerintah (*Government-Government Diplomacy*), melainkan juga menyertakan diplomasi antar pelaku bisnis, dan diplomasi antar masyarakat (*People-People Diplomacy*).

Dari empat prioritas utama dan aksi konkret dalam pelaksanaan Polugri yang dirumuskan oleh Jokowi, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Polugri akan berubah haluan menjadi lebih bersifat *inward-looking*. Secara umum dapat tergambar dengan jelas orietasi yang akan dilakukan sangat mempertimbangkan aspek pembangunan kapabilitas domestik yang pada akhirnya akan memperkuat pelaksanaan Polugri. Meskipun demikian, hal tersebut juga tidak semata-mata diartikan bahwa prioritas pelaksanaan Polugri akan memiliki kecenderungan bersifat politik 'isolasi', melainkan bersifat selektif dalam melaksanakan

2 Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi dalam debat ketiga Capres pada 22 Juni 2014, mengenai "Politik Internasional dan Ketahanan Nasional"

kebijakan yang berdampak langsung terhadap kepentingan nasional di tingkat domestik.

Selain itu perlu diberi perhatian pada konsepsi pelaksanaan Polugri yang ingin menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”, hal ini dikarenakan pada hakikatnya konsepsi ini memberikan sebuah pemahaman sederhana akan peranan ideal Indonesia dalam konteks pelaksanaan Polugri-nya. Pembentukan poros maritim dunia pada satu sisi merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin pencapaian prioritas-prioritas dalam Polugri, khususnya berkaitan dengan upaya memunculkan Indonesia sebagai “*Middle-Power State*” dan memperluas integrasi kawasan Indo-Pasifik. Sedangkan pada sisi lainnya, pelaksanaan Polugri untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia akan tergantung pada penguatan kapasitas domestik. Logika sederhana mengenai hal ini adalah bahwa terdapat isu intermestik³ yang tidak terhindarkan akan penguatan poros maritim dengan pembentukan struktur politik internasional kawasan dan peranan Indonesia.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Proyeksi pelaksanaan Polugri Indonesia era Jokowi akan memberikan tendensi terhadap peranan serta kebijakan dalam konteks geopolitik dan geoekonomi yang berkembang di kawasan. Meskipun demikian, pelaksanaan Polugri oleh Jokowi nantinya harus tetap memperhatikan pencapaian pelaksanaan Polugri sebelumnya yang telah dilakukan pada era presiden SBY.

Setidaknya ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil pada pelaksanaan Polugri era Jokowi nantinya. Rekomendasi tersebut antara lain adalah:

1. Pelaksanaan Polugri untuk membentuk Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia” harus menjamin kedaulatan negara di wilayah kemaritiman terlebih dahulu, yang ditandai dengan penyelesaian permasalahan perbatasan dengan negara lain. Kemudian, penguatan peranan Tentara Nasional Indonesia dalam konteks Alutsista juga harus mengimbangi.

3 Intermestik adalah sebuah konsep yang memberikan gambaran bahwa semakin besarnya perbedaan antara isu-isu internasional dan domestik.

Secara ekonomi, perhatian pada pengembangan konsep pembangunan berbasis maritim (*Blue Economy*) dan kepulauan juga menjadi penting.

2. Menjamin Sentralitas ASEAN adalah harga mutlak yang harus dilakukan Indonesia, khususnya menyebarkan pengaruh terhadap negara-negara ASEAN untuk memiliki kesepahaman akan pentingnya sentralitas ASEAN melalui peran kepemimpinan Indonesia sebagai *Middle-Power*. Penyelesaian isu di Laut Cina Selatan harus menjadi prioritas utama pelaksanaan Polugri Jokowi di ASEAN, untuk tetap menjamin terciptanya stabilitas kawasan yang berkonsekuensi pada pembangunan ekonomi kawasan.
3. Perluasan regionalisme Indo-Pasifik membutuhkan konsepsi pembentukan arsitektur kawasan yang konkret. Konseptualisasi Keseimbangan Dinamis (*Dynamic Equilibrium*) harus dapat diterjemahkan pada kebijakan konkret, khususnya melalui forum-forum diplomasi multilateral (seperti *East Asia Summit*), bahkan forum-forum dialog antar negara-negara berkonflik dalam kerangka lokakarya maupun *informal meetings*.
4. Memberikan ruang positif bagi diplomasi publik tidak hanya ditingkat nasional melalui Kementerian Luar Negeri, namun juga memberdayakan pemerintahan ditingkat provinsi. Hal ini bertujuan sebagai upaya pencakupan diplomasi yang menyerap aspirasi rakyat, misalnya dengan membagi beberapa klaster spesialisasi pelaksanaan kebijakan terhadap isu-isu tertentu pada provinsi tertentu.
5. Pentingnya sinergi akan pencapaian-pencapaian positif pelaksanaan Polugri dibawah pemerintahan SBY pada era pemerintahan Jokowi. Peningkatan peran internasional Indonesia harus berhasil ditransformasikan dalam bentuk peluang-peluang ekonomi, seperti misalnya dalam keanggotaan G-20 maupun pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).

Di luar tataran kebijakan, secara teknis aktor pelaksana Polugri juga perlu mendapatkan perhatian penting, dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri harus mendapatkan perhatian penuh dari sisi anggaran dari APBN maupun pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para diplomat. Saat ini anggaran Kemlu masih terhitung sangat rendah, yaitu hanya sekitar Rp 5.2 Triliun dari APBN (Setkab, 2014). Khususnya periode Jokowi memiliki kecenderungan untuk melaksanakan Polugri yang lebih memberi manfaat langsung pada urusan ekonomi. Jokowi menginginkan bahwa peningkatkan kemampuan korps diplomatik untuk lebih bersifat “*Marketer*” – meminjam istilah Jokowi – adalah sebuah kewajiban. Selain itu, korps diplomatik yang dapat mempromosikan ekonomi nasional demi mendapatkan pasar-pasar baru di negara lain, yang dengan lebih spesifik pelaksanaan diplomasi dilakukan 80% untuk kepentingan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu penambahan Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri (HELN) di Kemlu juga menjadi relevan dan signifikan apabila fokus ekonomi akan juga menjadi ranah pelaksanaan Polugri.

Selain itu, peningkatan kapasitas keterampilan serta jumlah diplomat juga perlu diperhatikan oleh pemerintahan era Jokowi, baik keterampilan yang bersifat praktikal seperti *Policy Capable* atau *Forward Analysis* (Kemlu, Wamenlu RI: Perkuat Jaringan, Analisis Ke Depan dan Kepemimpinan, 2014). Peningkatan kapasitas diplomat sebagai salah satu aktor utama pelaksana Polugri juga harus diimbangi dengan internal birokrasi Kemlu yang baik. Hal ini juga masih sejalan dengan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sejak tahun 2010 berdasarkan Perpres No.81 tahun 2010. Dalam reformasi tersebut, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa prioritas reformasi termasuk restrukturisasi yang mengatur baik Kemlu, maupun perwakilan di luar negeri.

Peningkatan kapabilitas korps diplomatik menjadi kunci bagi pelaksanaan Polugri era Jokowi nantinya. Khususnya, kecenderungan bahwa diplomasi ekonomi yang lebih diutamakan dalam pelaksanaan Polugri era Jokowi nantinya. Oleh karena itu, menempatkan Dubes di berbagai perwakilan RI yang memiliki latar belakang kuat dalam perekonomian dapat menjadi alternatif untuk mengembangkan pelaksanaan Polugri yang juga bisa berorientasi pada isu ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Clapp, M. H. (2006). *Bureaucratic Politics and Foreign Policy*. Washington D.C.: Brookings Institution Press.
- Djafar, Z. (2013). *Menuju Peran Strategis Indonesia di Lingkungan Regional dan Global*. Bandung: Pustaka Jaya.
- ICRIER. (2013). *Reimagining the Region: "Asia-Pacific" or "Indo-Pacific"*. New Delhi: Indian Council for Research on International Economic Relations.
- Indonesia, R. (1999). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Jokowi-JK. (2014). *Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi*. Jakarta.
- Kemhan. (2008). *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Kemhan.
- Kemlu. (2009, September 6). *Arah Kebijakan Luar Negeri*. Retrieved Agustus 19, 2014, from www.kemlu.go.id: <http://www.kemlu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=21&l=id>
- Kemlu. (2011). *Buku Diplomasi 2010*. Jakarta: Kemlu.
- Kemlu. (2012). *Pernyataan Pers Tahunan Menlu Tahun 2012*. Jakarta: Kemlu.
- Kemlu. (2013, February 15). *Permasalahan Di Perbatasan RI. Tabloid Diplomasi*, pp. 14-15.

- Kemlu. (2014, Agustus 11). *Wamenlu RI: Perkuat Jaringan, Analisis Ke Depan dan Kepemimpinan*. Retrieved Agustus 21, 2014, from www.kemlu.go.id: <http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=7026&l=id>
- Kompas. (2014, Juni 22). *Jokowi: Indonesia Harus Menangkan Pertarungan di Samudera*. Retrieved Agustus 19, 2014, from www.kompas.com: <http://nasional.kompas.com/read/2014/06/22/2046409/Jokowi.Indonesia.Harus.Menangkan.Pertarungan.di.Samudera>
- Kompas. (2014, Juni 23). *Ketegasan Capres Terlihat*. Retrieved Agustus 19, 2014, from www.kompas.com: <http://nasional.kompas.com/read/2014/06/23/1530293/Ketegasan.Capres.Terlihat>
- McKinsey. (2012). *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential*. Washington: McKinsey Global Institute.
- Morgenthau, J. Hans (1991). *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Natalegawa, M. (2013). *An Indonesian Perspective On The Indo-Pacific*. Washington: Centre For Strategic and International Studies.
- Setkab. (2014, Mei 20). *Inpres No.4/2014: Total Penghematan Negara K/L Capai Rp. 100 Triliun*. Retrieved Agustus 21, 2014, from www.setkab.go.id: <http://www.setkab.go.id/berita-13054-inpres-no-42014-total-penghematan-anggaran-86-kl-capai-rp-100-triliun.html>
- Sukma, R. (2014, Agustus 21). *Gagasan Poros Maritim*. Retrieved Agustus 22, 2014, from www.kompas.com: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/21/080000726/Gagasan.Poros.Maritim>

- Szondi, G. (2008). *Public Diplomacy and Nations Branding: Conceptual Similarities and Differences*. Den Haag: Clingendael.
- Tempo. (2011, January 25). *TNI AL Tingkatkan Pengamanan 12 Pulau Terluar*. Retrieved August 11, 2014, from [www.tempo.co: http://www.tempo.co/read/news/2011/01/25/173308782/TNI-AL-Tingkatkan-Pengamanan-12-Pulau-Terluar](http://www.tempo.co/read/news/2011/01/25/173308782/TNI-AL-Tingkatkan-Pengamanan-12-Pulau-Terluar)
- Wood, B. (1987). *Middle Powers in the International System: A Preliminary Assesment of Potential*. Heslinski: United Nations.

POLITIK LUAR NEGERI *HIGH PROFILE* INDONESIA

Rizka Azizah

Communication Officer, The Habibie Center

Email: azizah@habibiecenter.or.id

PENDAHULUAN

Politik luar negeri Indonesia lahir sebagai akibat dari bagaimana keadaan politik dunia dapat mempengaruhi keadaan domestik suatu negara. Adu kekuatan pada masa Perang Dingin memaksa Indonesia, yang saat itu baru saja merdeka, memilih arah jalannya untuk dapat bertahan diantara tekanan kedua blok, barat dan timur. Sutan Sjahrir adalah orang pertama yang mengutarakan ide awal tentang arah politik luar negeri Indonesia di depan puluhan representatif negara-negara Asia dalam *Asian Relations Conference* di New Delhi, India pada April 1947. Sjahrir berkata di dalam pidatonya:

We are now living in troubled times, in a world which is very much in a state of flux. When changes of far-reaching consequences take place in the relationship between nations, there is bound to rise an atmosphere filled with doubt and difficulties and sometimes tensions too. Yet this is the time for action – for firm definite action which will have as its objectives

the betterment of the world in which we live. But even while we initiate measures or execute plans aimed at improving our countries and common lot, it is incumbent on us to act in such a manner that the consequences of our measures will be palatable to other people and will serve to strengthen the bonds which exist between the various races and nations of the world.

May I remind that we must exercise the greatest care that the Asian sentiment which has brought us here today is preserved as a holy flame which will spur us on to greater endeavors towards justice, truth, idealism, and humanitarianism. We have cultivated that Asian sentiment with such fervor that it is now a powerful force – and a powerful force for good I believe – which wisely used should help us realize not only the vision of ONE WORLD we have been striving for but also the dream of the oneness of mankind. I am of the opinion what has impelled the nations of Asia to struggle for independence is not only based on truth but also in keeping with the dictates of humanity. (Mrazek, 1994)

Terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan lebih lanjut dari isi pidato Sutan Sjahrir tersebut karena sebenarnya inilah cikal bakal dari prinsip-prinsip dasar kebijakan serta politik luar negeri Indonesia. Sjahrir menekankan bahwa penting bagi negara-negara Asia, yang pada masa itu masih berada di dalam jeratan kolonialisme, untuk meraih kemerdekaan yang didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keterbukaan (Ide Anak Agung, 1990) . Menurutnya pula, negara-negara Asia yang baru merdeka ini hendaklah menjadi suatu kekuatan baru namun tidak menambah tekanan terhadap kedua kubu yang sedang berkonflik. Justru negara-negara yang baru berkembang ini menjadi pen jembatan untuk mengusung tujuan akhir bersama, yaitu perdamaian dunia. Negara-negara Asia termasuk juga Indonesia yang baru terbebas dari jerat kolonialisme negara-negara Eropa perlu menyadari bahwa kemerdekaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan suatu langkah awal pembuka perjalanan kedepannya untuk membangun suatu masyarakat dunia yang didasari nilai-nilai kemanusiaan yang setara dan sederajat serta masyarakat dunia yang demokratis.

Melalui pidato yang sangat ikonik pada tahun 1948, Mendayung Diantara Dua Karang, Mohammad Hatta mulai menyebarkan apa dan bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia yaitu dengan tidak memilih untuk berpihak pada salah satu blok sekaligus untuk tidak menjadi pihak yang pasif didalam area politik internasional melainkan sebagai agen yang ikut berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia. Berikut cuplikan dari pidato Hatta yang disampaikan pada tahun 1948 di Yogyakarta, Jawa Tengah. Dalam sidang Kelompok Kerja Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

“Mestikah kita bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan Negara kita, hanya harus memilih antar pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus menjadi subjek yang menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Perjuangan kita harus diperjuangkan diatas dasar semboyan kita yang lama, percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengambil keuntungan daripada pergolakan politik internasional. Memang tiap-tiap politik untuk mencapai kedudukan yang kuat ialah mempergunakan pertentangan internasional yang ada itu untuk mencapai tujuan nasional.” Hatta (1988)

Hatta menekankan kembali sudut pandangya tersebut di dalam sebuah artikel yang berjudul ‘Indonesia’s Foreign Policy’. Ia menegaskan:

The [foreign] policy of the Republic of Indonesia is not one of neutrality, because it is not constructed in reference to belligerent states but for the purpose of strengthening and upholding peace. Indonesia plays no favorites between the two opposed blocs and follows its own path through the various international problems. It terms this policy ‘independent’, and further characterizes it by describing independent and ‘active’. By active is meant the effort to work energetically for the

preservation of peace and the relaxation of tension generated by two blocs, through endeavors supported if possible by the majority of the members of the United Nations. (Hatta, 1953: p. 444.)

Dalam artikel tersebut, Hatta menegaskan bahwa desain besar utama Bebas Aktif bukanlah soal menjadi netral dalam keadaan Perang Dingin kala itu. Konsep politik luar negeri Indonesia tidak hanya mengacu kepada adanya dua negara yang sedang berperang yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, melainkan untuk jangka panjang dan cakupan yang lebih luas yaitu menjaga dan memperkuat perdamaian dunia. Cita-cita awal Moh. Hatta adalah untuk membuat suatu pedoman politik luar negeri yang abadi namun selalu fleksibel.

PENERAPAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DARI MASA KE MASA

Dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia tidak selalu memakai pola dan strategi yang sama. Tentu saja hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari beberapa faktor, mulai dari faktor eksternal seperti dinamika perpolitikan dunia internasional dan faktor internal, seperti karakteristik pemerintahan di Indonesia serta keadaan dalam negerinya. Meskipun begitu, pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia pastilah tetap mengarah pada tujuan yang sama yaitu mencaai kepentingan nasional dan ikut menciptakan perdamaian dunia. Selain itu, sifat dari pelaksanaan kebijakan politik luar negeri pun menjadi penting yang ikut mendapatkan pengaruh, apakah *high profile* dengan mencoba menonjol di tingkat regional maupun global atau justru cenderung *low profile* dengan tidak melakukan sesuatu gebrakan di tingkat dunia karena berfokus dengan masalah domestik.

Selama 68 tahun Indonesia menjadi negara yang utuh, merdeka, dan berdaulat, banyak tantangan dan rintangan yang telah dihadapi oleh Indonesia baik dalam konteks domestik maupun internasional. Tidak bisa dilupakan pula prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Indonesia baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya yang kini menempatkan Indonesia tidak lagi di dalam kelompok negara miskin maupun berkembang, melainkan sebagai pemain utama baru di politik dunia.

Indonesia juga menunjukkan komitmen yang lebih terhadap dunia internasional dengan lebih terlibat aktif, seperti arah politik luar negerinya untuk selalu ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Keaktifannya di dunia internasional hingga saat ini ditandai dengan bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi-organisasi internasional dan keterlibatannya dalam kerjasama-kerjasama baik secara multilateral maupun bilateral dengan negara-negara lain seperti yang diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia:

Kebijakan umum Pemri pada organisasi-organisasi internasional didasarkan pada Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, Bab 8 tentang Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Melalui penetapan RJPM, Pemerintah berusaha meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.

Prioritas politik luar negeri Indonesia dalam 5 tahun ke depan dituangkan dalam 3 program utama yaitu program pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia, program peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan untuk memanfaatkan secara optimal berbagai potensi positif yang ada pada forum-forum kerjasama internasional dan program penegasan komitmen terhadap perdamaian dunia.

Sesuai dengan Keppres No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan negara. (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2014a)

Terlihat selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia menjalankan kebijakan politik luar negerinya dengan *high profile*. Kemajuan yang cukup signifikan dalam performa politik luar negerinya ini tidak akan bisa

terjadi tanpa diikuti keadaan politik domestiknya yang cenderung stabil terlebih jika dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya.

POSISI INDONESIA DI KANCAH PERPOLITIKAN DUNIA

Indonesia saat ini disebut sebagai *Emerging Power* karena Indonesia sedang mendapatkan perhatian dari negara-negara di dunia akan pencapaiannya baik dalam bidang ekonomi, politik, diplomasi, serta pengaruhnya di kancah internasional. Menurut buku *International Relations Theory* karangan Viotti dan Kaupi (1999), beberapa pakar realisme berpendapat bahwa “*power to be the sum of military, economic, technological, diplomatic, and other capabilities at the disposal of the state.*”. Selain itu, *power* juga didefinisikan sebagai “*an attribute of the state that is the sum of its capabilities whether considered alone or relative to other state.*”

Indonesia berada di dalam 16 negara dengan ekonomi terkuat berdasarkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan diprediksi meningkat ke tujuh besar dunia pada tahun 2030 (Santikajaya, 2011). Dikatakan pula bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di jalur tercepatnya semenjak kiris di Asia, pada tahun 2012 PDB Indonesia diprediksi meningkat hingga 6.6% pada tahun 2013 dimana hal tersebut akan menjadi pencapaian terbaik Indonesia semenjak tahun 1996 berdasarkan data yang dimiliki IMF (Manurung, 2012). Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah melampaui pertumbuhan sebagian besar negara-negara di Asia, Pertumbuhan ini dapat terlihat pula dari pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akhir-akhir ini.

Indonesia juga menjadi satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota dari G-20, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ini diselenggarakan sebagai respon dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2007 dan diperlukan adanya suatu forum yang permanen dan intensif dalam rangka menciptakan stabilitas dan integrasi ekonomi dunia (Kementerian Luar Negeri, 2014b). Indonesia berperan untuk memajukan kepentingan negara berkembang dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan G-20 sendiri bagi Indonesia merupakan wadah yang sangat penting sebagai instrumen politik luar

negeri RI dalam rangka mendukung upaya Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2025.

Secara diplomatis Indonesia pun tengah berada di masa keemasannya di arena global selain dengan bergabung dalam G-20, Indonesia juga *co-chairing* dalam *UN High-Level Panel* mengenai *Post 2015 Development Agenda*. Dalam lingkup regional, ASEAN, Indonesia turut aktif dalam membangun kekuatan dan memberikan pengaruh.. Kestabilan politik, keamanan, dan ekonomi di Indonesia akan mempengaruhi negara-negara Asia Tenggara dan negara tetangga lainnya. Indonesia berperan aktif dalam lingkup regional mulai dari peran sertanya dalam AICHR atau *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* untuk mempromosikan dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia serta membangun jaringan dalam menjaga perdamaian diantara negara-negara anggota ASEAN. Peran lainnya adalah sebagai mediator dalam konflik yang tengah berlangsung diantara Thailand dan Kamboja. Peran yang paling penting dalam lingkup ASEAN adalah peran Indonesia dalam mewujudkan cita-cita besar ASEAN Community 2015 (Alexandra, 2011).

Dalam bidang militer kekuatan Indonesia masih perlu banyak peningkatan. Kurangnya alutsista dan sistem pertahanan Indonesia membuat militer Indonesia kurang kuat apabila dibandingkan oleh negara-negara lain di dunia. Meskipun begitu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa mengungkapkan bahwa peran Indonesia dalam ranah global adalah dengan 'memasukkan Indonesia di dalam radar' dengan menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan patut diperhitungkan di kawasan. Indonesia masih diperhitungkan sebagai kekuatan baru yang sedang bergerak kearah yang lebih baik. Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang raya dan kaya akan sumber daya alamnya. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia sekaligus negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Dua hal ini merupakan tantangan bagi Indonesia karena di dalam demokrasi dan agama terdapat beberapa hal yang cukup bertolak belakang dan seringkali menjadi masalah di Indonesia khususnya keberadaan kelompok ekstrimis agama yang seringkali mengaitkan urusan negara dengan agama, namun pada prakteknya sejauh ini Indonesia mampu menjalankannya secara beriringan meskipun belum sepenuhnya sempurna.

ERA BARU POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Status baru Indonesia sebagai *emerging power* telah membawa Indonesia kedalam cakupan yang lebih besar di dunia, sehingga dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktifnya Indonesia dapat mengambil peran yang lebih besar pula di sistem politik internasional demi terpenuhinya kepentingan-kepentingan nasional Indonesia. Sebenarnya politik luar negeri adalah cerminan dari politik domestik suatu negara. Keduanya berkaitan secara langsung dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Salah satu bentuk kebijakan politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara adalah dengan menjalin hubungan bilateral dengan negara lain. Dari hubungan bilateral ini, akan terbentuk kerjasama atau perjanjian-perjanjian yang jelas akan menguntungkan kedua negara. Indonesia menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara lain semenjak merdeka, hingga saat ini Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa *non-self governing territory* (Kementerian Luar Negeri, 2014c). Menurut PBB, *non-self governing territory* artinya adalah negara-negara yang saat ini masih berada dibawah kolonisasi negara lain.

Indonesia kini memasuki era barunya setelah pada Juli lalu merayakan pesta demokrasi terbesar, Pemilihan Presiden periode 2014-2019 dengan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini jelas akan mempengaruhi bagaimana bentuk dan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Ibarat sebuah grafik, saat ini posisi Indonesia tengah menanjak dengan performa politik luar negerinya yang bersifat *high profile*. Idealnya grafik performa politik tersebut stabil atau terus menanjak dan tidak mengalami penurunan. Ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru Indonesia dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri bebas aktif kedepannya.

Jika melihat dari rancangan kebijakan politik luar negeri yang disusun oleh Jokowi dan JK, ada beberapa hal yang memang sudah diprioritaskan. Salah satunya adalah untuk meningkatkan pertahanan maritim. Sebagai negara yang dikelilingi lautan, memang sudah seharusnya pemerintah berfokus kepada peningkatan pertahanan maritim mengingat angkatan laut yang sejak dulu berada diurutan bawah skala prioritas pertahanan Indonesia, yang dapat dilihat dari jumlah sumber daya manusia serta dari kelengkapan alutsista.

Indonesia yang secara geografis berbentuk kepulauan dan berbatasan langsung dengan laut, membuatnya menjadi jalur penting perdagangan dunia. Ini juga menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia memegang peranan penting di kawasannya. Mantan duta besar Indonesia, Hasjim Djalal pada pertemuan dengan Kedutaan Cina di The Habibie Center tahun 2014, mengatakan bahwa negara-negara lain akan membutuhkan Indonesia karena letaknya yang strategis tepat diantara dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sehingga mau tidak mau, menjaga hubungan baik dengan Indonesia menjadi suatu keharusan bagi mereka.

PENUTUP

Sifat politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang memang dirancang untuk fleksibel dalam mengikuti perubahan zaman dan keadaan internasional ini sebenarnya memberikan kemudahan bagi Indonesia dalam menjalankan rencana arah politik luar negerinya. Cita-cita Jokowi sebagai Presiden ke 7 yang baru saja dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 untuk menjadikan Indonesia kembali berjaya di lautan merupakan suatu langkah berani yang mencerminkan kebesaran Indonesia dan politik luar negerinya yang *high profile* diantara negara-negara lain baik di lingkup regional maupun di tingkat global. Sudah saatnya Indonesia kini benar-benar memaksimalkan semua kekuatan dan kesempatan yang selama ini dimiliki. Mengutip pidato pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia, "Selama ini kita sudah terlalu lama memungungi lautan, sudah saatnya kita kembali berjaya. Jalasveva Jayamahe."

Resiko akan selalu ada dalam penerapan politik luar negeri setiap negara. Dalam hal ini adalah resiko keberpihakan Indonesia dengan negara lain. Namun jika kita kembali lagi kepada pernyataan Hatta bahwa bebas dan aktif tidak berarti netral dan diam tidak memilih untuk bertindak. Justru ketika Indonesia misalnya memilih untuk menjalin suatu hubungan dengan aktor lain, baik negara ataupun non-negara, demi memenuhi kepentingan nasionalnya, itulah tanda bahwa Indonesia sedang sebebaskan-bebasnya menentukan arah dan memegang kuasa akan negaranya sendiri tanpa mendapat tekanan dari pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ide Anak Agung Gede. (1990). *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965*. The Hague: Mouton.
- Alexandra, Lina. (2011). *Indonesia Emerging*. The Diplomat. <http://thediplomat.com/2011/08/indonesia-emerging/>
- Hatta, Mohammad. (1988). *Mendayung Antara Dua Karang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2014a). Organisasi Internasional. Diakses tanggal 29 Oktober 2014 dari <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFP.aspx?P=OrganisasiInternasional&l=id>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2014b). Kerjasama Multilateral: G-20. Diakses tanggal 29 Oktober 2014 dari <http://www.deplu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=11&P=Multilateral&l=id>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2014c). Kerjasama Bilateral. Diakses tanggal 29 Oktober 2014 dari <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFP.aspx?P=Bilateral&l=id>
- Manurung, Novrida. (2012). *Indonesia Sees at Least 6.6% Growth Next Year, Ratnawati Says*. <http://www.bloomberg.com/news/2012-11-05/indonesia-s-growth-exceeds-6-for-eighth-quarter-on-investments.html>
- Mrazek, Rudolf. (1994) *Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia*. New York: Southeast Asia Program Publications.
- Santikajaya, Awidya. (2011). *Emerging Indonesia and Its Global Posture*. East Asia Forum. <http://www.eastasiaforum.org/2013/03/07/emerging-indonesia-and-its-global-posture/>
- Viotti, Paul. R. dan Mark V. Kauppi. (1999). *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond, third edition*. Boston: Allyn and Bacon.

**INDONESIA'S FOREIGN POLICY: REFLECTIONS ON THE
YUDHOYONO YEARS AND PROSPECTS FOR THE NEXT
GOVERNMENT**

A. Ibrahim Almuttaqi

ASEAN Studies Program Coordinator, The Habibie Center

Email: ibrahim@habibiecenter.or.id

INTRODUCTION

On October 20, 2014 Susilo Bambang Yudhoyono officially step down as the sixth President of the Republic of Indonesia after serving his maximum two terms in office. After a decade at the helm, Yudhoyono's place has been taken over by Joko Widodo who will be sworn in as Indonesia's new President for the period 2014-2019 having secured 53.15% of the votes during the June 9, 2014 Presidential Elections. The change in personnel at the highest executive office of state has naturally raised questions about the likely changes in government policies between that of the outgoing Yudhoyono Administration and that of the incoming Widodo Administration. This is especially so in the area of foreign policy given that: (a) Yudhoyono was widely lauded for his efforts and achievements on the international stage; and (b) the general perception that Widodo lacks sufficient foreign policy experience and knowledge.

Due to the inherent uncertainty that exists during any transition, question marks regarding Indonesia's foreign policy will persist until the official transfer of power from Yudhoyono to Widodo and the formation of Widodo's Cabinet. Chief among these questions are: Will Indonesia's foreign policy change with the new Government? If so, how will Indonesia's foreign policy change and why? If not, how not and why won't Indonesia's foreign policy change?

It is in this sense that a reflective review of the Yudhoyono Years and a prospective look at the next Government becomes an appropriate topic to study and serves as the motivation for this paper, *'Indonesia's Foreign Policy: Reflections on the Yudhoyono Years and Prospects for the Next Government'*.

GENERAL ACHIEVEMENTS OF THE YUDHOYONO YEARS

The overall consensus of Indonesia's foreign policy during the Yudhoyono Years has generally been positive. Compared to the country's position back in 2004 when Yudhoyono first assumed office to the current situation today, Indonesia has emerged as a more active and assertive player on the international stage. Indeed it is easy to forget that in the early years of Indonesia's *Reformasi* period, many feared the country's "Balkanization" due to the insecurity and instability that gripped the nation. Writing just before Yudhoyono's election as President, Armstrong (2004) warned Indonesia appeared to have "impeccable credentials to be the next Yugoslavia." On the international stage Emmers (2005) highlighted how Indonesia suffered the indignity of renouncing its sovereignty over East Timor and the desperate embarrassment of needing a collective ASEAN position to support Indonesia's remaining territorial integrity.

Fast forward ten years and Indonesia under the Yudhoyono government has been praised for its "renewed international confidence and activism flowing from domestic normalization" (MacIntyre&Ramage, 2008). Observers have noted that during Yudhoyono's two terms in office Indonesia has: cemented its position in the G-20; was at the forefront of the drive for a robust ASEAN Charter; made efforts to ease the troubles of the Middle East; played a leading role in the UN Framework Convention on Climate Change and the UN Anti-Corruption Conference; and chaired

two important regional meetings, the East Asia Summit and the APEC Forum (Connelly 2014, and MacIntyre&Ramage, 2008).

To this, one can add Indonesia's chairmanship of ASEAN in 2011 and the time it served as a non-permanent member of the UN Security Council in 2007-2008. Indonesia's chairmanship of ASEAN in particular saw Jakarta deftly handle two major incidents that threatened to bring instability and uncertainty to the Southeast Asian region, namely: (1) the outbreak of armed clashes between Thai and Cambodian forces in the Preah Vihear vicinity and (2) Myanmar's push to chair ASEAN in 2014 amidst international doubts about its suitability and the genuineness of its democratic reforms. Indonesia has since sustained its active and assertive role in the Southeast Asian region even when not holding the ASEAN Chair. This was best demonstrated by the shuffle diplomacy conducted by Indonesia's Foreign Minister Marty Natalegawa following the unprecedented inability of ASEAN Foreign Ministers to issue a joint communiqué due to disagreements over the South China Sea.

The Yudhoyono Years also witnessed Indonesia enhancing its bilateral relations with major powers in the region. Indonesia entered into a Comprehensive Partnership Agreement with the U.S in 2010, a Strategic Partnership Agreement with China in 2005 (which was then upgraded to a Comprehensive Strategic Partnership in 2013), and the Lombok Treaty with Australia in 2006.

For Macintyre and Ramage (2008) much credit should go to Yudhoyono who they describe as an "internationalist" and "the personal embodiment of this new, confident and more outward-looking mood." Mietzner (2009) highlights Yudhoyono's interest in international affairs, polished English, and global connections which "provided him with a solid foundation from which to launch diplomatic initiatives, and boost Indonesia's reputation."

The Yudhoyono Years has not only seen Indonesia emerge with a greater say in ASEAN affairs and a strengthened role in the regional organization, but also an increased weight in international relations and "a voice on the global stage" (Mietzner, 2010).As Mietzner (2010) notes, Indonesia "attracted the envy of other Southeast Asian states" and crucially,

“There is no doubt that the country is increasingly viewed as a regular actor in global forums, in sharp contrast to the first decade of the post-Soeharto period.”

Thus, as Yudhoyono steps down as President he may arguably look back on his two terms in office with the satisfied feeling that his ambitions for a larger Indonesian role in international affairs were successfully realized during the Yudhoyono Years.

CRITICAL REEXAMINATION OF THE YUDHOYONO YEARS

Although the overall consensus of Indonesia’s foreign policy during the Yudhoyono Years has generally been positive, it is interesting to observe how many of the academic literature written during Yudhoyono’s time in office were not always kind to him. While observers now look back on Yudhoyono’s foreign policy in a positive light, it is surprising how Yudhoyono’s foreign policies faced its fair share of criticisms at the time. For example, Mietzner (2009) describes a “trend of ineffective diplomatic initiatives” and “Indonesia’s peripheral role.” Mietzner (2010) later notes “previous [foreign] policy defeats” as well as “weaknesses that had undermined its [Indonesia’s] previous international efforts.”

Indeed, in many of the achievements listed above, there were some aspects which raise questions over how successful the Yudhoyono government really was in its foreign policy. As such, this paper shall critically reexamine the Yudhoyono government’s foreign policy efforts in the five area of: (1) ASEAN Chairmanship; (2) regional role in Southeast Asia; (3) Non-permanent membership of UN Security Council; (4) relationships with major powers in the region; and (5) involvement in major international conferences.

1.1. ASEAN Chairmanship

The main achievements of Indonesia during its chairmanship of ASEAN in 2011 were its handling of two major incidents, namely the Thai-Cambodian conflict and the issue of Myanmar as stated earlier.

Indonesia’s response to the Thai-Cambodian conflict was to undertake a series of intensive diplomatic efforts. These included: hosting three-way

talks between President Yudhoyono, Thailand's then-Prime Minister Abhisit Vejjajiva and Cambodia's Prime Minister Hun Sen at the sidelines of the 18th ASEAN Summit in Jakarta; requesting the foreign ministers of Thailand and Cambodia stay an extra day after the 18th ASEAN Summit to hold further talks with Indonesia's Foreign Minister Natalegawa; facilitating a meeting of the bilateral Thai-Cambodian Joint Border Commission (JBC) in Bogor, Indonesia; and embarking on an exhaustive shuttle diplomacy mission that involved travelling to Bangkok, Phnom Penh and even as far as New York to attend an urgent session of the UN Security Council to discuss the conflict. A notable contribution of Jakarta was its proposal to post unarmed Indonesian military observers along the Thai-Cambodian border with the task of reporting back to ASEAN and the UN Security Council.

Indonesia's efforts received generally positive reactions from the two belligerent sides and were praised by the international community – including from the UN Security Council, the US, China and France among others (Xinhua, 2011, February 23, Jakarta Post 2011, February 16, ABC News 2011, April 26 and Agence Kampuchea Presse 2011, May 4). Tellingly, at the 19th ASEAN Summit in Bali, Indonesia, it was reported that the then-Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra was “walking side by side at one stage with Cambodian Prime Minister Hun Sen [and that] there were smiles all around” (Bangkok Post, 2011, November 18).

However it is worth noting that on several occasions Indonesia faced a great deal of resistance and obstacles from Thailand and Cambodia. Phnom Penh made it clear it had no qualms about bypassing bilateral and (Indonesian-led) regional peace talks by pleading directly to the UN Security Council and International Court of Justice (ICJ) for help, arguing ‘only the clarification of the ICJ's verdict can solve this issue, while ASEAN...cannot’ (Agence Kampuchea Press 2011, February 23). Meanwhile Bangkok at times insisted peace talks should be strictly bilateral and opposed outside mediation efforts (Agence Kampuchea Press 2011, February 17). This was made clear when Thailand's Foreign Minister did not attend the JBC meeting in Bogor, Indonesia – a move one expert said meant “Thailand had humiliated Indonesia as the agreed broker” (The Jakarta Post, 2011, April 9).

Also, Indonesia's proposal to send observers to the Thai-Cambodian border never materialized due to its final rejection by Thailand. This was despite Bangkok initially welcoming the idea and informally agreeing to it. A headline by *The Bangkok Post* (2011, March 24) reported, "Indonesia not wanted, Prayuth insists" – referring to Thailand's army chief – a stance that was in the end adopted by the Thailand government.

Instead, it has been suggested that the end of fighting between Thailand and Cambodia was largely due to the change in Thailand's government following the election of Yingluck Shinawatra as Prime Minister. This "breakthrough" was due to the fact that Cambodia's Prime Minister Hun Sen was personally close to Yingluck Shinawatra's older brother (and former Prime Minister) Thaksin Shinawatra and suggests the efforts of Indonesia had a limited contribution (National Institute for Defense Studies, Japan 2012).

Regarding the issue of Myanmar, Indonesia had to address Naypwidaw's request to chair ASEAN in 2014 amidst international doubts over its suitability and/or the genuineness of its democratic reforms. International pressure had previously forced Myanmar to forego its turn to take up the ASEAN chairmanship in 2006 – concerned about the country's poor human rights record – and Naypwidaw was adamant it should not be forced to give up its turn again for a second time. Despite the democratic reforms the country had initiated, Myanmar remained a pariah state with Western governments calling on ASEAN to seriously consider the implications of rewarding Naypwidaw with the ASEAN chairmanship. Human Rights Watch, for example, argued a Burmese chairmanship of ASEAN would "create a reputational risk to ASEAN that would be far too great ... [and] make ASEAN the laughing stock of intergovernmental forums" (Voice of America, 2011, May 5).

Indonesia's response to the issue of Myanmar was to dispatch Foreign Minister Natalegawa on a fact-finding mission in October 2011 and task him with evaluating Myanmar's reform progress. The mission had the full backing of the other ASEAN leaders with Foreign Minister Natalegawa citing the mandate given to him by ASEAN. After holding discussions with the Burmese government, opposition leaders (including Aung San Suu Kyi) and other stakeholders over three days, Foreign Minister Natalegawa returned to Jakarta praising Myanmar for taking positive steps (Myanmar Times, undated).

Based on Indonesian's assessment, the Chairman's Statement of the 19th ASEAN Summit read,

“We welcome the significant positive developments in Myanmar throughout 2011 and underscored the importance of maintaining a strong momentum in this regard. We further support these positive developments, and their continued progress contributes to promote conditions conducive for our decision to accord Myanmar the Chairmanship of ASEAN in 2014.”

Two points are worth observing here. Firstly, Naypwidaw agreed to submit itself to an assessment by Indonesia's Foreign Minister. Even though Indonesia's effort had the full mandate of ASEAN, Myanmar had every right to reject such an examination of its domestic affairs in a similar way that Thailand refused to allow Indonesian military observers on the Thai-Cambodian border. Secondly, the acceptance Indonesia's assessment received from the international community. On the back of Foreign Minister Natalegawa's visit to Myanmar, Naypwidaw played host to a series of high-profile diplomats including the then-US Secretary of State Hilary Clinton in December 2011 and the then-UK Foreign Secretary William Hague in January 2012 (the first visits by foreign affairs officials from the two countries to Myanmar since 1955). Arguably, Indonesia's positive assessment was instrumental in the shift of international opinion towards Myanmar's reforms which culminated in the historic visit of US President Barack Obama to Naypwidaw in 2012.

However, it is worth noting that despite Indonesia's efforts to support Myanmar – not only with its request to take up the 2014 ASEAN chairmanship but also in the wider sense of Myanmar's reforms, which Jakarta continues to push for – very little recognition or appreciation has been forthcoming. Outside of the Burmese government circle, little is known among other Burmese stakeholders of Indonesia's contributions in Myanmar's reintegration with the international community. As Santikajaya (2013) points out,

“For years, Indonesia has devoted much political and diplomatic energy to resolving conflicts in Cambodia, Vietnam and Myanmar, but it has not reaped any great economic benefit from those countries once the conflicts ended. Indonesia's

investment in Myanmar, for instance, is much smaller than investments by Singapore, Malaysia and Thailand, despite Indonesia's important diplomatic engagement in helping to open up the country."

Indonesia's national news agency *Antara* reported in April 2013 that 15 state-owned enterprises intended to invest in Myanmar that year. However Indonesia's Minister for State-Owned Enterprises stated only three had been granted business licenses by Naypyidaw to operate in Myanmar (Antara, 2013, April 22). On the one hand, this may simply reflect the lack of competitiveness of Indonesia's companies and/or the bureaucratic challenges of operating in a Myanmar that has only recently opened up to the global economy. However it may also indicate some weaknesses in Indonesia's foreign policy in terms of socializing and raising awareness of Jakarta's efforts and achievements, especially with those it has assisted.

1.2. Regional Role in Southeast Asia

Indonesia's active and assertive foreign policy in Southeast Asia was not limited to 2011 when it held the chairmanship of ASEAN. Instead, the Yudhoyono Years saw Indonesia play an increasing regional role in the years prior and following 2011. Of particular note were its efforts to: (1) advance democracy and human rights in the region and (2) mediate and resolve tensions in the region.

Indonesia's effort to advance democracy and human rights in the region can be seen in its championing of the ASEAN Charter. Together with Singapore, Indonesia was seen as a "decisive actor pushing for the Charter" but had to face resistance from some ASEAN member-states "who did not want to move at all" (Volkman, 2008). While the ASEAN Charter was still being formulated, Yudhoyono (2007, August 7) gave a keynote speech in 2007 making clear Indonesia's vision of an ASEAN Charter that should incorporate Jakarta's democratic and human rights agenda. Indonesia's President declared,

"All over the world people want to take their destiny in their own hands, to take part in the making of decisions that affect their lives—this is the pressure of democracy. Not only that: people also want to assert the essential worth of their

humanity. They demand the respect that is their due by virtue of the fact that they are human beings. This is the pressure of human rights.”

However, despite Indonesia’s strong advocacy for its vision of an ASEAN Charter that advanced democracy and human rights in the region, Mietzner (2009) pointed out Jakarta was forced to accept “a severely watered down version” of the ASEAN Charter. MacIntyre&Ramage (2008) add that Indonesia’s Parliament “balked at approving the charter” contending that the finalized version was “insufficiently pro-democracy and simply ends up associating all of ASEAN...in a ‘community’ with an odious human rights oppressor in Myanmar.”

It is also worth noting that in recent years, the ASEAN region has witnessed what some observers consider a democratic reversal. Most illustrative is the military coup in Thailand which saw the removal of the democratically-elected civilian government earlier this year. Pongsudhirak (2014) further argues “Cambodia, Malaysia and Myanmar have exhibited signs of regression” whilst Keck (2014) adds that more authoritarian ASEAN states such as Brunei Darussalam, Lao PDR and Vietnam “have halted all reforms and have in some instances also begun rolling back previous reforms.”

Despite Yudhoyono stating, “Frankly speaking, Indonesia is concerned because a military coup (in Thailand) is not democratic” and Jakarta calling for ASEAN to be involved, Thailand’s new junta leaders have insisted that a return to civilian government and democratic elections will not take place until at least 15 months (Antara, 2014, May 24). Taken together with ASEAN’s democratic reversal, these suggest that Indonesia during the Yudhoyono Years has not been effective enough in advancing its democratic and human rights agenda for the region.

With regards to mediating and resolving tensions in the region, Indonesia played a key role following the unprecedented inability of ASEAN Foreign Ministers to issue a joint communiqué due to disagreements over the South China Sea in 2012. A war of words erupted between officials from Cambodia and the Philippines in what observers described as the biggest challenge ASEAN had ever faced. Indeed ASEAN’s public disunity led to critical questions over the very existential purpose of ASEAN (Baviera, 2012).

In response, Yudhoyono dispatched Foreign Minister Natalegawa to conduct a shuffle diplomacy mission that saw the latter visit not only the capitals of Cambodia, the Philippines and Vietnam (the key ASEAN member-states in disagreement with one another) but also to Malaysia and Singapore. As a result of Indonesia's efforts, the ten member-states of ASEAN were able to agree on a Six-Point Principle on the South China Sea, which according to Foreign Minister Natalegawa showed ASEAN was "back to business as usual" (Thayer, 2012). Indonesia's efforts were widely praised although Cambodian officials have complained the document produced by Indonesia was similar to Phnom Penh's proposal during the ill-fated 45th ASEAN Ministerial Meeting of 2012. It is also worth noting that the Indonesian-drafted Six-Point Principle provided very little in terms of anything new or of significance beyond a simple reiteration and reaffirmation of ASEAN's commitment to resolve the South China Sea issue. Tellingly, tensions in the South China Sea have since worsened, thus raising questions about Indonesia's efforts. In this year alone, China and Vietnam were involved in a serious stand-off over Beijing's decision to construct an oil rig in disputed waters, while the Philippines have continued with its case against China at an international tribunal of The Hague (as opposed to employing ASEAN mechanisms).

Mietzner (2009) further points out that Indonesia's active and assertive foreign policy to mediate and resolve tensions in the region has not always been welcomed. In 2008, for example, Thailand was angered when Indonesia held peace talks between a "Bangkok delegation" and a delegation from Thailand's restive Deep South. Thailand's Foreign Ministry declared that its government was "not involved in any talks in Indonesia and it had not asked Jakarta to act as a mediator" (Bangkok Post, 2008, September 22). In Mietzner's (2009) view, Jakarta's move was a "blunder" that demonstrated its "marginal" international role.

1.3. Non-Permanent Membership of UN Security Council

If the most prestigious responsibility bestowed upon Indonesia during Yudhoyono's second term in office was the chairmanship of ASEAN, then sitting as a non-permanent member of the UN Security Council in 2007-2008 was arguably Jakarta's most prestigious responsibility during his first term. Indonesia was elected with 158 votes among the then-

192 UN members, beating Nepal to be the sole non-permanent Asian representative at the UN Security Council.

In his 2007 State Address, Yudhoyono declared that as a non-permanent member of the UN Security Council, Indonesia would continue to play a constructive role in order to further world peace and security. This would be based on Indonesia's "*bebas dan aktif*" ("free and active") foreign policy, with Yudhoyono stressing that on principle, Jakarta viewed and called for peaceful non-military means to resolve conflict and other global issues. However, some observers have criticized Indonesia's non-permanent membership of the UN Security Council as disappointing. Mietzner (2009) argues that Indonesia "was unable to substantially raise its international profile" pointing out that Yudhoyono "feared the domestic impact of possibly sensitive decisions taken in New York, making him even more cautious than usual."

A case in point was Indonesia's stance regarding Iran's nuclear program. In 2007, Indonesia voted in favor of UN Security Council Resolution 1747 to toughen sanctions against Tehran. The move sparked a strong backlash in Indonesia with the Yudhoyono government facing accusations of being a U.S. "pawn" and of "betraying" Muslim solidarity with Iran (Asia Sentinel, 2007, April 7). An opinion poll by Indonesia's national news agency *Antara* found 72% of the public opposed Jakarta's stance (Press TV, 2007, March, 31) and Yudhoyono was confronted by an angry Parliament.

A majority in the Indonesian House of Representatives (*Dewan Perwakilan Rakyat* or DPR) – including its Speaker – agreed to exercise Parliament's right of interpellation demanding Yudhoyono personally stand before Parliament to explain his government's support for UN Security Council Resolution 1747 (The Jakarta Post, 2007, June 7 and Asia Sentinel, 2007, April 7). Of the 10 factions in the House of Representatives for 2004-2009, 7 were in favor of interpellation (*Partai Golkar*, PDI-P, PAN, PPP, PKB, BPD and PKS), 2 opposed (*Partai Demokrat* and *Partai Damai Sejahtera*) and 1 abstained (PBR) (BBC Indonesia, 2007, May 15).

In all, Yudhoyono's support for tougher sanctions against Iran was said to have damaged his personal political standing with parliamentarians and the public alike, making him and the Indonesian government "even more cautious than usual" in its future voting at the UN Security

Council (Mietzner, 2009). However, this would only marginalize Jakarta's influence and in the following year the UN Security Council once again voted on a resolution on Iran's nuclear program where Indonesia found itself isolated as the only abstaining vote.

1.4. Relationships with Major Powers in the Region

The Yudhoyono Years have seen Indonesia significantly enhance its relationships with major powers in the Asia-Pacific region. Most notably are its relationship with the US, China and Australia, which Jakarta has strengthened through the Indonesia-US Comprehensive Partnership Agreement, Indonesia-China Strategic Partnership Agreement, and the Indonesia-Australia Lombok Treaty respectively.

Indonesia-US relations are now underpinned by the Comprehensive Partnership Agreement of 2010. Through this agreement, Jakarta and Washington D.C. have pledged to "broaden, deepen and elevate" cooperation between the second and third largest democracies in the world, on a wide-range of issues that include: "education, environment, security, science and technology, trade and investment, democracy, human rights, health, energy, food, entrepreneurship, and more" (The White House, 2010, June, 27 and The White House, 2009, November, 9). With Indonesia-US relations described as "on sound footing" by MacIntyre & Ramage in 2008, this was undoubtedly raised a notch following the election of Obama as US President. His childhood experience in Indonesia coupled with Yudhoyono's own personal experiences as a post-graduate student in the US have introduced a new, personal element to the Indonesia-US relations.

Despite this, it is worth remembering how Obama had caused "significant disappointment" in Indonesia over his repeated failures to visit Jakarta. Mietzner (2010) recalls how Jakarta was particularly disappointed over Obama's decisions to select Turkey as the first Muslim country to visit and Egypt as the site of his keynote speech to the Muslim World. Despite being the world's most populous Muslim country, "Indonesia's increased international stature still fails to impress the White House staff in charge of Obama's travel schedule" (Mietzner, 2010). While Obama did eventually travel to Indonesia for a state visit in 2010 followed by a regional summit a year later, the US President made global headlines

when he was forced to cancel his attendance at the APEC Summit that was held in Bali 2013. While the cancellation was forced upon Obama on account of the “government shutdown”, questions were again raised in Indonesia and beyond regarding the US commitment to the region.

The Yudhoyono Years have seen Jakarta continue to build on improving Indonesia-China relations, marking a remarkable turnaround from decades of frozen ties during Soeharto’s New Order regime. Indonesia first signed a Strategic Partnership Agreement with China in 2005 that laid out potential collaboration in defense and other areas. This was later upgraded to a Comprehensive Strategic Partnership in 2013 in order to also enhance cooperation in the fields of industry, infrastructure, transportation, financial services, tourism, education, and the creative industry, among others.

While MacIntyre&Ramage (2008) point to booming economic relationships, tighter defense ties, and concrete collaboration between Jakarta and Beijing, they also highlight Indonesia’s continued wariness of China. As far back as the beginning of Yudhoyono’s presidency, Indonesia took steps to “’hedges’ against the possibility of unwanted Chinese regional dominance” (MacIntyre&Ramage, 2008). A case in point was Jakarta’s insistence in 2005 that the East Asian Summit should include Australia, New Zealand and India – “a position that was pushed successfully over the objections of China” who wished to keep the East Asian Summit as a purely ASEAN+3 (China, Japan and South Korea) affair (MacIntyre&Ramage, 2008).

In recent years, Beijing has become ever more forceful in its claims to the South China Sea. Interestingly, though there have been suggestions that China’s “Nine-Dashed Line” overlaps with Indonesian waters near Natuna islands, Jakarta has traditionally preferred to adopt a policy of strategic ambivalence over the matter. This policy has enabled Indonesia to portray itself as a non-claimant party in the South China Sea dispute and position itself as a neutral and honest mediator between China and four ASEAN member-states (Brunei Darussalam, Malaysia, the Philippines and Vietnam).

Significantly in March 13, 2014 however, an Indonesian navy official publicly declared, “China has claimed Natuna water as their territorial waters...What China has done is related to the territorial zone of the

Unitary Republic of Indonesia” (Antara, 2014, March 13). A few weeks earlier, Indonesia’s Commander-in-Chief, General Moeldoko had declared the military would deploy additional forces around Natuna waters and boost its army and air force presence on the island itself (Antara, 2014, February 27). Both announcements were carried on Indonesia’s national news agency *Antara* and resulted in observers questioning if Indonesia had abandoned its policy of strategic ambivalence. For example, Singapore’s *The Strait Times* (2014, April 24) ran an opinion article headlined, “South China Sea: Is Jakarta no longer neutral?”

Confusingly, only a few days later on March 18, Foreign Minister Natalegawa would contradict the previous announcements of military officials by insisting, ““There is no territorial dispute between Indonesia and China” (The Strait Times, 2014, April 24). He maintained the same position after the issue became a topic during a televised presidential candidate debate between JokoWidodo and PrabowoSubianto (The Jakarta Globe, 2014, June 24). Adding to the confusion however was a revelation on March 29, 2014 that Natalegawa had indeed protested to Beijing over its controversial new passport design that included a map of its “Nine-Dashed Line” (Financial Times, 2014, March 29).

Two points are worth observing here. Firstly, despite the improving relations between Indonesia and China, Jakarta continues to be negatively impacted by the uncertainty over Beijing’s “Nine-Dashed Line” claims over the South China Sea. Secondly, the Yudhoyono government has failed to ensure the military and foreign ministry present a consistent stance on the matter.

Due to geopolitical realities, the Indonesia-Australia relationship has always been of immense importance to both the governments in Jakarta and Canberra. However, over the decades relations have experienced their ups and downs. While Australia played a significant role in Indonesia’s independence struggle, it was also blamed for the role it played in Timor-Leste’s separation from the Indonesian Republic in the late 1990s. Relations soured to an all-time low following the latter event with Indonesia cancelling a 1995 security agreement, criticizing Australia for being “inconsistent with both the letter and spirit of the agreement” (KBRI Canberra, 2005, March 1).

However, prior to late-2013, the Yudhoyono Years had witnessed “a steadily improving bilateral relationship and return to normalcy” (MacIntyre&Ramage, 2008). Jakarta and Canberra agreed on a new treaty known as the Lombok Treaty in 2006 which pledged “closer cooperation across a range of areas, including closer military links, cooperation against terrorism, joint patrolling of the maritime boundary, and taking a harder line against West Papuan activists” (Kingsbury, 2007).

Particular credit has gone to Yudhyohonowho has frequently been described as “one of the best friends we’ve [Australia] ever had” (Sydney Morning Herald, 2014, June 8). Indeed in 2010, Yudhoyono was given the distinct honor of addressing Australia’s Federal Parliament, something the President acknowledged when he stated, “I know that you invite foreign leaders to address this chamber only on very rare, very auspicious occasions, so I am very humbled by the honor of this historic occasion” (Yudhoyono, 2010, March 10).

However, in the past year, relations have once again soured following revelations Australian intelligence services spied on the phone communications of Yudhoyono and his inner circle including the First Lady. Yudhoyono spoke of his personal sense of betrayal – employing Twitter to publicly vent his anger – and this was not helped by Australia’s unapologetic stance. Subsequently Jakarta officially downgraded its relations, withdrawing Indonesia’s ambassador to Canberra and suspending bilateral cooperation in crucial areas such as defense, intelligence and people smuggling. Indonesia moreover demanded a Code of Conduct to prevent future spying incidents as a requirement before any restoration of normal relations. While Indonesia has remained firm with its demands for a Code of Conduct, it is interesting to note that Jakarta has restored its ambassador to Australia.

Thus, despite the steadily improving Indonesia-Australia relationship during the Yudhoyono Years, ties between the two countries are still easily susceptible to taking a dramatic turn for the worst. Canberra seemingly continues to view Indonesia with a degree of suspicion and distrust (as evident by their need to spy), while Jakarta remains highly sensitive to anything touching on its sovereignty, often reacting in an extreme manner (contrast Indonesia’s downgrading of relations with Germany’s reaction to US spying).

1.5. Involvement in Major International Conferences

During the Yudhoyono Years, Indonesia was involved in a number of major international conferences. Of particular note was the UN Climate Change Summit in 2007 and the UN Anti-Corruption Conference in 2008, where Indonesia “hosted and played a leading role” in both (MacIntyre&Ramage, 2008). The following year in 2009 at the G-20 Summit meeting in Pittsburgh, Yudhoyono was invited by US President Barack Obama to give a keynote speech on climate change; a speech that “resonated well with most summit participants, and even with some of the activists protesting outside against the meeting” (Mietzner, 2010). More recently, Indonesia hosted the Ninth Ministerial Conference of the World Trade Organization (WTO) in December 2013 which saw for the first time a historic agreement approved by all WTO members after a decade of failed negotiations.

However, observers noted some shortcomings in Indonesia’s involvement at these UN/international conferences. Yudhoyono’s well-received keynote speech at the G20 Summit in Pittsburgh was seen as “strong in offering dramatic rhetoric and idealistic proposals but weak in outlining concrete policy steps” (Mietzner, 2010). Yudhoyono’s speech was branded “highly unrealistic and purely driven by public relations” with critics pointing out Indonesia was also engaged in a program to build 35 coal power plants – a move that raised concerns over its likely detrimental environmental impact (Mietzner, 2010 and MacIntyre&Ramage, 2008). In addition, Jakarta continued to face environmental problems such as systematic forest burning, illegal logging, and deforestation (MacIntyre&Ramage, 2008).

Yudhoyono was also left humiliated by an announcement he made at the UN Climate Change Summit his country hosted in 2007. There he boasted the supposed discovery of “Blue Energy” which it was claimed could convert water into fuel. Subsequently, the “discovery” was revealed as a hoax, the “inventor” imprisoned and “Yudhoyono was widely criticized for naively supporting the initiative” (Mietzner, 2010).

KEY LESSONS FROM THE YUDHOYONO YEARS/CHALLENGES FOR THE NEXT GOVERNMENT

From the critical examination of the Yudhoyono Years, there are a number of key lessons that emerged, which will likely be challenges that the next government under Widodo must deal with.

1.6. Key Lesson/Challenge No. 1: Relationship with Parliament

The Yudhoyono Years have shown the importance of building and maintaining good relations between the Government and Parliament in order for Indonesia to have a foreign policy that is active and assertive. The example of Parliament's anger over the Government's stance regarding Iran's nuclear program at the UN Security Council is indicative of this point. As was shown in this paper, Parliament's strong reaction to Yudhoyono's stance resulted in the Government taking a cautious stance in its future foreign policy on the issue. Parliament was also very vocal with its opinions on the ASEAN Charter which it deemed insufficiently pro-democracy. As such Indonesia was one of the last to ratify the ASEAN Charter which would have undoubtedly resulted in some embarrassment for the President among his ASEAN peers.

Since the *Reformasi* era, Indonesia's Parliament has emerged as a key actor in terms of Indonesia's foreign policy. Crucially it has not been afraid to use its powers. For example in 2008, the House of Representatives refused to accept I Nyan Lin as Myanmar's new ambassador to Indonesia citing the country's poor human rights and democracy record (The Jakarta Post, 2008, March 8). Underlining the strong influence of the legislative branch on Jakarta's foreign policy, MacIntyre&Ramage (2008) stated that, as "the Indonesian Government must take into account the views of the Indonesian Parliament, so must other governments seeking to collaborate with Jakarta."

This is one area where the next Government under Widodo will likely face its biggest challenge. The coalition of parties that supported the presidential candidacy of JokoWidodo-Jusuf Kalla (PDI-P, Hanura, NasDem, and PKB) command just 207 of the total 560 seats in the House of Representatives following the April 9, 2014 legislative elections. This figure represents only 36.96%. Meanwhile the coalition of parties that supported the rival presidential candidacy of PrabowoSubianto-

HattaRajasa command a majority with 353 seats or 63.04% of the House of Representatives. The current situation of a Widodo Government and a Prabowo-dominated Parliament makes likely that the 2014-2019 period will see a difficult Government-Parliament relationship, both in general government policy and specifically over foreign policy.

Indeed, the Prabowo-Hatta coalition has already signaled its intent to make life difficult for the next government. The passage of the Revised Law on Legislative Institutions (*RevisiUndang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD* or MD3) – where the Speaker of the House of Representative will no longer automatically come from the largest party at the legislative elections (in this case Widodo’s PDI-P) but will instead be up for a parliamentary vote (thus making it likely that a figure from the majority Prabowo-Hatta coalition will take up the role) – is indicative of the difficult dealings the Widodo Government will face from Parliament. Similarly the Prabowo-Hatta coalition may likely form a Special Committee (*PanitiaKhusus* or *Pansus*) of the House of Representatives to investigate alleged fraud surrounding the July 9, 2014 Presidential Elections in order to undermine the legitimacy of the next Government and consequently any government policy including in the area of foreign affairs.

1.7. Key Lesson/Challenge No. 2: Maximizing Parliamentary Support vs Commanding an Effective Ruling Coalition

Yudhoyono famously embraced a “big-tent” cabinet with 20 of his 35 ministers in the United Indonesia Cabinet of 2004-2009 being affiliated to political parties (Liddle&Mujani 2006). Despite Yudhoyono’s initial pledge to form a cabinet dominated by technocrats, his desire to maximize support in Parliament saw Yudhoyono award cabinet positions to a wide array of political parties including those that did not support his presidential candidacy. However by attempting to maximize parliamentary support, Yudhoyono arguably suffered from an unruly and unwieldy ruling coalition. As Liddle and Mujani (2006) observe, “The bond between the president and all the legislative parties except his *Partai Demokrat* was tentative and weak” and, “The policy agendas and priorities of PKS, PAN, and PBB [parties within the ruling coalition] were often at odds with those of the president” (Liddle&Mujani 2006).

On several occasions during the Yudhoyono Years, the Government was unable to assert its will over its own ruling coalition. This was most clear when several parties of the ruling coalition voted in favor of interpellation regarding the Yudhoyono Government's stance on Iran's nuclear program at the UN Security Council. Demonstrating the "tentative and weak" position of Yudhoyono vis-a-vis his ruling coalition, the President was unwilling in 2012 to expel *Partai Golkar* and PKS from the ruling coalition after they voted against the Government's key proposal to cut fuel subsidies.

As such, a key decision facing the next government under Widodo is whether to maximize parliamentary support at the expense of an unruly and unwieldy ruling coalition. Given that the coalition of parties supporting the presidential candidacy of JokoWidodo-Jusuf Kalla command just 36.96% of seats in the House of Representatives, the Widodo government may have no choice other than to embrace a "big-tent" cabinet like his predecessor in order for government policies (including on foreign affairs) to pass easily through Parliament. However, Widodo has publicly declared his firm commitment that cabinet positions will not be based on transactional politics and that appointments will be based on merit.

Another point worth observing is Widodo's position within his own PDI-P. If the bond between Yudhoyono and his ruling coalition was "tentative and weak" with the exception of his own *Partai Demokrat* (which he founded and serves as chairman), one wonders the bond between Widodo and PDI-P given that Megawati remains the party chairwoman. Indeed, there have been some concerns expressed over the influence Megawati may have over the Widodo government and its policies, including in the area of foreign affairs.

1.8. Key Lesson/Challenge No. 3: Appointment of Foreign Minister

Earlier on in this paper it was noted that much credit for the general achievements during the Yudhoyono Years should go to the president himself. Despite Yudhoyono's description as an "internationalist" and "the personal embodiment of this new, confident and more outward-looking mood, the critical examination of the Yudhoyono Years instead show the important role played by Indonesia's Foreign Minister Natalegawa. This

was obvious in Natalegawa's fact-finding mission to Myanmar in October 2011, the shuffle diplomacy mission following the outbreak of the Thai-Cambodian conflict in 2011, and the shuffle diplomacy mission following the unprecedented inability of ASEAN Foreign Ministers to issue a joint communiqué due to disagreements over the South China Sea in 2012.

As Connelly (2014) observed, "Yudhoyono left much of the heavy lifting to his talented foreign ministers, Hasan Wirajuda and Marty Natalegawa." Liddle and Mujani (2006) back this view arguing, "Yudhoyono appears as a legitimator of the acts of others...rather than a significant player in his own right." The contradicting positions taken by Indonesia's foreign ministry and military officials over the South China Sea and Natuna islands is indicative of the *carte blanche* given by Yudhoyono to his foreign minister.

While this is not a criticism of Yudhoyono himself, it nonetheless highlights the importance attached to whoever Widodo appoints as his foreign minister. A likely option will be for Natalegawa to continue in his role as Foreign Minister. This would ensure a sense of continuation and stability in very much the same way that Yudhoyono initially asked the then-Foreign Minister in Megawati's government, Hasan Wirajuda to carry on. This sense of continuation and stability is all the more crucial given that 2015 marks a significant year for Indonesia's foreign policy with the introduction of the ASEAN Community 2015.

At the same time however, Widodo announced several innovative ideas regarding foreign policy. For example, during a televised presidential candidate debate on June 22, 2014 Widodo pledged that if elected, he would ensure Indonesian ambassadors spent 80% of their time marketing Indonesian products overseas (The Jakarta Post, 2014, June 23). The Widodo-Kalla "vision and mission" electoral campaign document also pledged to "realize a free and active foreign policy and strengthen Indonesia's identity as a maritime nation" ("*Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jatidiri sebagai Negara maritim*"). As such Widodo may look to appoint a new foreign minister that can implement his innovative ideas. If so, it is interesting to note Santikajaya (2014) who highlighted the important role played by Rizal Sukma – Widodo's foreign policy advisor during the election campaign - and who "should be closely watched as a leading candidate to be the next foreign minister." Another

highly tipped for the job is current Deputy Foreign Minister Dino Patti Djalal although his chances may be limited having participated in *Partai Demokrat's* failed convention to find a presidential candidate.

1.9. Key Lesson/Challenge No. 4: Translating Rhetoric into Concrete Action

The critical examination of the Yudhoyono Years reveals the need to translate rhetoric into concrete action as one of the key lessons from the current government. Indicative of this point was the ASEAN Charter where Yudhoyono had earlier promised a groundbreaking document incorporating Jakarta's democratic and human rights agenda, but was finally forced to accept a severely watered down version. Similarly, Yudhoyono's speeches at several major international conferences were lauded as strong in dramatic rhetoric and idealistic proposals but nevertheless highly unrealistic and driven purely by public relations considerations. The Yudhoyono government was at times left embarrassed when its rhetoric did not align with its actions. Illustrative of this point was Yudhoyono's keynote speech on climate change at the G-20 Summit in Pittsburgh which contradicted the government's decision to build 35 coal power plants.

As Mietzner (2009) points out, "While respected in the West as a symbol of a consolidating Muslim democracy, Indonesia has not been able to translate this appreciation into concrete diplomatic weight." In other words, while the Yudhoyono government has made the most of talking up its potential and credentials, at times it has not been able to match this with concrete action that carry real weight.

Here it will be interesting to observe how the next government under Widodo manages this challenge. As touched on earlier, Widodo has already made much rhetoric about realizing Indonesia's identity as a maritime nation as part of its foreign policy. It remains to be seen how this rhetoric will be translated into concrete action and in what ways the Widodo government will position itself viz-a-viz maritime issues such as the South China Sea, illegal, unregulated and unreported (IUU) fishing, and asylum seekers going to Australia, among others.

Encouragingly, Widodo's popularity owes much to his image as "an ordinary person with the necessary political will to deliver quick results" (Palatino, 2012). As the Governor of DKI Jakarta and before that as mayor of Solo, Widodo caught the public's attention due to "his outstanding performance as a public servant" (Palatino, 2012). These include easing business procedures, improving basic health services, reducing traffic congestion, and improving the living conditions of the poor – earning Widodo third place in the 2012 World Mayor Prize (Palatino, 2012). As such, if any person is capable of translating rhetoric into concrete action (including on foreign policy matters), arguably Widodo is that man. Nevertheless question marks still remain as to whether or not Widodo can transfer his achievements at the local and regional level of government on to the national and international stage as President.

1.10. Key Lesson/Challenge No. 5: Ensuring Cooperation with External Parties

A final key lesson/challenge is ensuring the cooperation with external parties. During the Yudhoyono Years, Indonesia proposed a number of good initiatives to external parties but often found an unwillingness to cooperate. For example, Indonesia's proposal to send military observers to the Thai-Cambodian border never materialized due to its final rejection by Thailand, despite Bangkok initially welcoming the idea and informally agreeing to it. Similarly, Jakarta's strong advocacy for a groundbreaking ASEAN Charter incorporating Indonesia's democratic and human rights agenda met resistance from some ASEAN member-states unwilling to depart radically from the status quo, finally resulting in a severely watered down version.

Perhaps the best example of the need to ensure cooperation with external parties was in Indonesia's relationships with major powers in the region. The signing of the Lombok Treaty with Australia was meant to signal closer cooperation across a range of areas, yet senior Indonesian government officials including the President himself found themselves the victims of Australian spying, forcing Jakarta to officially downgrade ties. Similarly, despite the Strategic Partnership Agreement with China in 2005 (which was then upgraded to a Comprehensive Strategic Partnership in 2013), Indonesia has not been able to definitively resolve the uncertainty over

Beijing's "Nine-Dashed Line" claims over the South China Sea, especially the waters surrounding Indonesia's Natuna islands.

Therefore, a challenge for the next government under Widodo will be to ensure that cooperation from external parties is materializing, genuine, and consistent. This is one area where Widodo may excel given his abilities for persuasive and conciliatory approach to dialogue. In the past Widodo has effectively used this approach to relocate hawkers off the streets of Tanah Abang or move slum dweller from the banks of the Pluit reservoir. Thus, it will be interesting to see whether or not Widodo can apply his persuasive and conciliatory approach to ensure cooperation with external parties on issues of international politics.

SUMMARY AND CONCLUSION

Over the past decade, Indonesia's foreign policy has grown ever more assertive and active. The Yudhoyono Years have seen Jakarta enthusiastically act on its ambitions for a larger Indonesian role in international affairs. Led by an "internationalist" president, Indonesia has notched up a number of foreign policy achievements during the Yudhoyono Years. These include: holding the chairmanship of ASEAN; serving as a non-permanent member of the UN Security Council; becoming a member of the G-20; playing a greater regional role in ASEAN and the wider Asia-Pacific; playing leading roles in important international conferences; and enhancing its bilateral relations with major powers in the region.

However a critical reexamination of the Yudhoyono Years revealed a number of shortcomings and failings in Jakarta's attempts to be more assertive and active in its foreign policy. As this paper revealed, many of the academic literature written during Yudhoyono's time in office were not always kind to Yudhoyono highlighting a "trend of ineffective diplomatic initiatives", "Indonesia's peripheral role" and "previous [foreign] policy defeats." In five areas of foreign policy that were critically reexamined by this paper, there were some aspects which raised questions over how successful the Yudhoyono government really was.

From the critical examination of the Yudhoyono Years, the paper identified a number of key lessons that will likely be challenges for the

next government under Widodo. Chief among the major challenges for the next President are: (1) building and maintaining a good relationship with Parliament; (2) deciding whether to maximize parliamentary support at the expense of an unruly and unwieldy ruling coalition; (3) appointing a Foreign Minister that can both create a sense of continuation and stability as well as implement Widodo's innovative ideas regarding foreign policy; (4) translate rhetoric into concrete action by transferring Widodo's ability to achieve results at the local and regional level of government onto the national and international stage; & (5) ensure that cooperation with external parties is materializing, genuine and consistent.

Remembering the questions that were raised at the outset of this paper – Will Indonesia's foreign policy change with the new Government? If so, how will Indonesia's foreign policy change and why? If not, how not and why won't Indonesia's foreign policy change? –, the answers depend very much on how Widodo manages the five challenges the next government must face. Encouragingly, Widodo has a proven track record of achieving results and his abilities for persuasive and conciliatory approach may turn out to be an effective diplomatic tool when dealing with external parties. However, on the other hand Widodo faces a potentially major encounter with the ever-influential and increasingly-strident Parliament. Given that the Widodo-Kalla coalition is a minority one in the House of Representatives, Widodo's stated commitment to appoint cabinet positions based on merit rather than transactional politics may be difficult to keep. Like Yudhoyono, the next President may be forced to maximize parliamentary support at the expense of an unwieldy and unruly ruling coalition, which will undoubtedly impact Indonesia's ability to project an assertive and active foreign policy. Moreover, unlike Yudhoyono, the next President does not even control his own party putting Widodo in a very unique position whereby the bonds between himself and all parties in Parliament are weak and his powers of patronage limited.

Overall, from this reflective review of the Yudhoyono Years and prospective look at the next Government, it is clear that the past decade were a high point in Indonesia's foreign policy. Certainly the Yudhoyono Years will be remembered for an assertive and active Indonesia in the field of foreign policy. However, due to several shortcomings and failures, missing in this equation is "effective". While we should applaud the fact that Indonesia's foreign policy grew ever more assertive and active, it is

somewhat meaningless if it is not always effective. As such it is greatly hope that in five (or ten years) time when Indonesians look back on the Widodo Years, Jakarta's foreign policy can be regarded as assertive, active, and effective.

REFERENCES

- ABC News. (2011, April 26). "US Backs Effort to Resolve Thai-Cambodian Violence." Retrieved from <http://abcnews.go.com/US/wireStory?id=13454629#.TuO6AmNkb80>
- Agence Kampuchea Press. (2011, February 17). "Thailand Should not Fear or Avoid Multi-lateral Mediation to Resolve Preah Vihear Conflict." Retrieved from <http://www.akp.gov.kh/?p=2507>
- Agence Kampuchea Press. (2011, February 23). "Cambodia Sends Documents to the ICJ." Retrieved from <http://www.akp.gov.kh/?p=2767>
- Agence Kampuchea Press. (2011, May 4). "France Supports Indonesia's Role in Cambodia-Thailand Border Dispute." Retrieved from <http://www.akp.gov.kh/?p=5839>
- Antara. (2013, April 22). "Indonesia Seeks Closer Economic Ties with Myanmar." Retrieved from <http://www.antaranews.com/en/news/88556/indonesia-seeks-closer-economic-ties-with-myanmar>

- Antara. (2014, February 27). "TNI to increase its forces around Natuna waters." Retrieved from <http://www.antaranews.com/en/news/92881/tni-to-increase-its-forces-around-natuna-waters>
- Antara. (2014, March 13). "China includes part of Natuna waters in its map." Retrieved from <http://www.antaranews.com/en/news/93178/china-includes-part-of-natuna-waters-in-its-map>
- Antara. (2014, May 24). "ASEAN must address coup in Thailand: Yudhoyono." <http://www.antaranews.com/en/news/94188/asean-must-address-coup-in-thailand-yudhoyono>
- Armstrong, D. (2004). "The Next Yugoslavia? The Fragmentation of Indonesia". *Diplomacy and Statecraft* 15(4): 783-808, 2004
- ASEAN Secretariat. (2011, November 17). *Chair's Statement of the 19th ASEAN Summit, Bali, 17 November 2011*. Retrieved from <http://www.asean.org/archive/documents/19th%20summit/CS.pdf>
- Asia Sentinel. (2007, April 7). "Yudhoyono Paints Himself into the West's Corner." Retrieved from <http://www.asiasentinel.com/politics/yudhoyono-paints-himself-into-the-wests-corner/>
- Asia Times. (2012, July 27). "Behind the scenes of ASEAN's breakdown." Retrieved from http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/NG27Ae03.html
- Bangkok Post (2008, September 22). "Govt 'not party' to peace talk." Retrieved from ftp://202.60.207.28/BP/2008/09_BP_Sep/22092008/BK220908001.pdf
- Bangkok Post. (2011, March 24). "Indonesia not wanted, Prayuth insists" Retrieved from <http://www.bangkokpost.com/news/security/228300/indonesia-not-wanted-prayuth-insists>
- Bangkok Post. (2011, November 18). "All smiles as Yingluck makes her debut." Retrieved from <http://www.bangkokpost.com/news/local/266766/all-smiles-as-yingluck-makes-her-debut>
- Baviera, Aileen S.P. (2012). "South China Sea dispute: Why ASEAN must unite." *East Asia Forum* July 26. Retrieved from <http://www.eastasiaforum.org/2012/07/26/south-china-sea-disputes-why-asean-must-unite/>

- BBC Indonesia. (2007, May 15). "DPR interpelasi soal nuklir Iran." Retrieved from http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/05/printable/070515_irandpr.shtml
- Connelly, Aaron L. (2014). "Indonesia's Jokowi Eyes Mideast Involvement." *CNN* July 21. Retrieved from <http://edition.cnn.com/2014/07/20/world/asia/indonesia-jokowi-analysis/>
- Cotan, Imron. (2005, March 1). "*Indonesia-Australian Relations: East Timor, Bali Bombing, Tsunami and Beyond.*" Retrieved from <http://www.kbri-canberra.org.au/speeches/2005/050301e.htm>
- Emmers, R. (2005). "Regional Hegemonies and the Exercise of Power in Southeast Asia: A Study of Indonesia and Vietnam". *Asian Survey*, Vol. 45, No. 4 (July/August 2005), pp. 645-665.
- Financial Times. (2014, March 29). "Indonesia Protested over China Passports." Retrieved from <http://www.ft.com/cms/s/0/1cab01c2-9794-11e2-b7ef-00144feabdc0.html>
- The Jakarta Globe (2014, June 24). "Jakarta Not a Claimant to South China Sea as Prabowo Suggests: Marty." Retrieved from <http://www.thejakartaglobe.com/news/jakarta-claimant-south-china-sea-prabowo-suggests-marty/>
- The Jakarta Post. (2007, June 7). "Major factions insist SBY must show up at House." Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2007/06/07/major-factions-insist-sby-must-show-house.html>
- The Jakarta Post. (2008, March 8). "House rejects new Myanmar Ambassador." Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2008/03/07/house-rejects-new-myanmar-ambassador.html>
- The Jakarta Post. (2011, April 9). "Thai FM no show as JBC meeting ends." Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2011/04/09/thai-fm-no-show-jbc-meeting-ends.html>
- The Jakarta Post. (2011, February 16). "UN backs ASEAN in Thai-Cambodian row." Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2011/02/16/un-backs-asean-thaicambodia-row.html>

- The Jakarta Post. (2014, June 23). "Jokowi wins on Prabowo's turf." Retrieved from <http://m.thejakartapost.com/news/2014/06/23/jokowi-wins-prabowo-s-turf.html>
- Keck, Zachary. (2014). "Southeast Asia Retreats from Democracy." *The Diplomat* May 29. Retrieved from <http://thediplomat.com/2014/05/southeast-asia-retreats-from-democracy/>
- Kingsbury, D. (2007). "Indonesia in 2006: Cautious Reform". *Asian Survey*, Vol. 47, No. 1 (January/February 2007), pp. 155-161
- Liddle, R.W. and Mujani, S. (2005). "Indonesia in 2004: The Rise of Susilo Bambang Yudhoyono". *Asian Survey*, Vol. 45, No. 1 (January/February 2005), pp. 119-126
- MacIntyre, A & Ramage, DE. (2008). *Seeing Indonesia as a Normal Country: Implications for Australia* (Barton ACT: Australian Strategic Policy Institute). Retrieved from https://www.aspi.org.au/publications/seeing-indonesia-as-a-normal-country-implications-for-australia/Seeing_Indonesia.pdf
- Mietzner, M. (2010). "Indonesia in 2010: Electoral Contestation and Economic Resilience." *Asian Survey* Vol. 50., Issue 1, pp. 185-194
- Mietzner, M. (2009). "Indonesia in 2008 - Yudhoyono's Struggle for Reelection". *Asian Survey*, Vol. 49, Issue 1, pp. 146-155
- Myanmar Times (Undated). "Indonesian FM backs political changes." Retrieved from <http://www.mmmtimes.com/index.php/87-national-news/1887-indonesian-fm-backs-political-changes.html>
- National Institute for Defense Studies, Japan. (2012). *East Asian Strategic Review 2012* (Tokyo: The Japan Times)
- Palatino, Mong. (2012). "Indonesia's Rising Star: Jokowi." *The Diplomat* November 14. Retrieved from <http://thediplomat.com/2012/11/indonesias-rising-star-jokowi/>

- Pongsudhirak, Thitinan. (2014). "Jokowi saves Indonesia's democracy (and maybe Southeast Asia's too)." *East Asia Forum* July 28. Retrieved from <http://www.eastasiaforum.org/2014/07/28/jokowi-saves-indonesias-democracy-and-maybe-southeast-asias-too/>
- Press TV. (2007, March, 31). "Can Indonesia's leader justify anti-Iran vote?" Retrieved from <http://edition.presstv.ir/detail/4456.html>
- Santikajaya. (2013). "Emerging Indonesia and its global posture." *East Asia Forum* March 7. Retrieved from <http://www.eastasiaforum.org/2013/03/07/emerging-indonesia-and-its-global-posture/>
- Santikajaya, Awidya. (2014). "Indonesia: Foreign Policy Under Jokowi and Prabowo." *The Diplomat* June 5. Retrieved from <http://thediplomat.com/2014/06/indonesia-foreign-policy-under-jokowi-and-prabowo/>
- The Strait Times. (2014, April 24). "South China Sea: Is Jakarta no longer neutral?" Retrieved from <http://www.straitstimes.com/news/opinion/eye-the-world/story/south-china-sea-jakarta-no-longer-neutral-20140424>
- Sydney Morning Herald. (2014, June 8). "Tony Abbott is testing the friendship with Indonesia." Retrieved from <http://www.smh.com.au/comment/smh-editorial/tony-abbott-is-testing-the-friendship-with-indonesia-20140608-zs14b.html>
- Voice of America. (2011, May 5). "Burma Bids to Head ASEAN in 2014." Retrieved from <http://www.voanews.com/content/burma-bids-to-head-asean-in-2014-despite-human-rights-objections-121378554/167420.html>
- Volkman, Rabea. (2008). "Why does ASEAN need a Charter? Pushing actors and their national interests." *ASIEN* 109 (Oktober 2008), S. 78-87. Retrieved from www.asienkunde.de/content/.../109_researchnotes_2_volkman.pdf
- The White House. (2010, June, 27). "The US-Indonesia Comprehensive Partnership." Retrieved from <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/us-indonesia-comprehensive-partnership>

- The White House (2009, November, 9). "Joint Declaration on the Comprehensive Partnership between the United States of America and the Republic of Indonesia." Retrieved from <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/11/09/joint-declaration-comprehensive-partnership-between-united-states-america>
- Xinhua. (2011, February 23). "China Backs Indonesia's Efforts to Tackle Cambodia-Thailand Conflict." Retrieved from http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-02/22/c_13744168.htm
- Yudhoyono, Susilo Bambang. (2010, March 10). "*Speech by Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, President Of Republic Of Indonesia Before The Australian Parliament.*" Speech presented at Great Hall, Parliament House, Canberra. Retrieved from <http://www.presidentri.go.id/index.php/eng/pidato/2010/03/10/1353.html>
- Yudhoyono, Susilo Bambang. (2007, August 16). "*Pidato Kenegaraan Presiden RI serta Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2008 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR-RI.*" Speech presented at Gedung DPR./MPR, Jakarta. Retrieved from <http://presidenri.go.id/index.php/pidato/2007/08/16/723.html>
- Yudhoyono, Susilo Bambang. (2007, August 7). "*Keynote Speech by H.E. Susilo Bambang Yudhoyono President Republic of Indonesia At the ASEAN Forum: Rethinking ASEAN Towards the ASEAN Community 2015*" Speech presented at ASEAN Forum, Jakarta. Retrieved from <http://www.asean.org/resources/2012-02-10-08-47-56/leaders-view/item/keynote-speech-by-he-susilo-bambang-yudhoyono-president-republic-of-indonesia-at-the-asean-forum-rethinking-asean-towards-the-asean-community-2015-jakarta-7-august-2007>

Ketentuan Penulisan THC Review

Karya ilmiah yang dipertimbangkan dapat dimuat adalah karya yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan karya orisinal penulis mengenai masalah aktual selama satu tahun terakhir dan belum pernah dipublikasikan.
2. Jumlah halaman antara 15-20 (tidak termasuk daftar pustaka) diketik dengan spasi 1,5 pada kertas ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan jenis huruf Times New Roman 12pt dalam bentuk Ms Word.
3. Penulisan referensi/kutipan/daftar pustaka menggunakan gaya penulisan American Psychological Association (APA). Beberapa contoh panduan, antara lain:
 - (a) Keterangan referensi dalam teks untuk setiap kutipan diberikan berupa nama pengarang dan tahun terbit dalam tanda kurung. Contoh: (Habibie, 2008).
 - (b) Penulisan daftar pustaka dilakukan dengan membalik suku kata terakhir nama penulis. (tahun). Judul Buku. Kota terbit: Penerbit. Kemudian diurutkan secara alfabetis. Contoh:
Habibie, BJ. (2008). Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi. Jakarta: THC Mandiri.
 - (c) Ketentuan penulisan kutipan dengan gaya penulisan APA ini bisa dilihat di www.apastyle.org.

The Habibie Center
Jl. Kemang Selatan no.98, Jakarta 12560, Indonesia
Telp: +62 21 7817211 Fax: +62 21 7817212
e-mail: thc@habibiecenter.or.id
www.habibiecenter.or.id

ISSN 2339-2959



9 772339 295907